

**APLIKASI KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PERS MAHASISWA
UIN SUNAN KALIJAGA**

(Analisis Isi Dalam Laporan Utama Buletin Silit Arena UIN Sunan Kalijaga)



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

**Nurul Hidayati Yunaida
NIM. 12210107**

Pembimbing:

**Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.phil
NIP. 196009051986031006**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DD/PP.00.9/01/2016

Tugas Akhir dengan judul : APLIKASI KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PERS MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA (ANALISIS ISI DALAM LAPORAN UTAMA BULETIN SLILIT ARENA UIN SUNAN KALIJAGA)

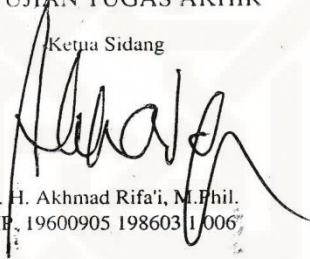
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL HIDAYATI YUNANDA
Nomor Induk Mahasiswa : 12210107
Telah diujikan pada : Rabu, 01 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

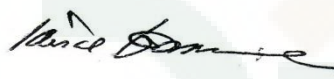
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil.
NIP. 19600905 198603 1 006

Penguji I


Prof. Dr. H. Faisal Ismail, M.A.
NIP. 19470515 197010 1 001

Penguji II


Drs. Mukhammad Sahlan, M.Si
NIP. 19680501 199303 1 006

Yogyakarta, 01 Juni 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
DEKAN


Dr. Nurjannah, M.Si.
NIP. 19600310 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nurul Hidayati Yunaida
NIM : 12210107
Judul Skripsi : Aplikasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Pers Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (Analisis Isi Dalam Laporan Utama Bulletin Silit Arena UIN Sunan Kalijaga)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Komunikasi Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 19 Mei 2016

Mengetahui,

Ketua Jurusan KPI



Khoiro Ummatm, S.Ag, M.Si
NIP. 197103281997032001

Pembimbing

Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.phil
NIP. 196009051986031006

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Hidayati Yunaida
NIM : 12210107
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Aplikasi Aplikasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Pers Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (Analisis Isi Dalam Laporan Utama Bulletin Silit Arena UIN Sunan Kalijaga) adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Mei 2016

Yang menyatakan,



Nurul Hidayati Yunaida

NIM. 12210107

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

Almamater UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam

Bapak dan Ibu yang telah membesarkanku dan
mengajariku banyak hal di dunia ini.

HALAMAN MOTTO

“Aku tidak sebaik apa yang kau ucapkan, aku juga tidak seburuk apa yang terlintas di hatimu”. (Ali Bin Abi Thalib)

== THERE IS A WILL, THERE IS A WAY ==

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Aplikasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Pers Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (Analisis Isi dalam Laporan Utama Buletin Silit Arena UIN Sunan Kalijaga)”. Sholawat serta salam peneliti haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Peneliti menyadari, bahwa penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti haturkan kepada:

1. Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Dr. Nurjannah, M.Si., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Khoiro Ummatin, S.Ag., M.si., selaku ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Akhmad Rifa'i, M. Phil selaku pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, kritikan, saran, dan nasehat demi penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Sunarto dan Ibu Tumilah yang telah memberikan semangat, motivasi dan dukungan pada peneliti agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Mbak Lulus Novita, Mbak Winda Efanur, Mbak Ida, Mbak Sinta, Marwah dan Mas Toni terima kasih atas kebaikan kalian yang selalu setia mendengarkan keluh kesah penyelesaian skripsiku, serta memberikan motivasi dan informasi baru untukku.
7. Teman-teman seperjuangan di kelas KPI 2012, Eki Paradisi, Chika Sukaca, Ani Maghfiroh, Dewi Maesaroh (Dedew), Ita Kurniawati, Naim, Rahmawati, Isty Flo, Sari, Tsania, Enes, Anisatul, Arinta dan masih banyak lagi yang tak bisa disebut satu per satu. Terima kasih telah berjuang bersama dan saling mengisi, saling menyemangati dan saling memotivasi. All the best, kawan.
8. Kawan-kawan UKM KORDISKA UIN Sunan Kalijaga yang telah mengajarku untuk saling menghargai akan arti dari sebuah perbedaan, keberagaman dan kebhinekaan dalam bermasyarakat. Untuk kalian semua yang tak bisa kusebut satu-satu, terima kasih yang sebesar-besarnya kawan.
9. Kawan-kawan crew Penerbitan Kinasih, Binti, Helza, Darty, May terima kasih yang telah berjuang bersama selama satu tahun kepengurusan.
10. Kawan-kawan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) BUKIT, teruntuk semua team crew, Tsania, Isty, Dedew, Enes, Kak Dieny, Mas Adihoo, Rusdi, Nadia, Ahcok, pokoknya semuanya. Terima kasih telah mengajarku banyak hal terutama di dunia jurnalistik.

11. Kawan-kawan penghuni kos pink yang selalu menyemangati peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, teruntuk Ifa, Auna, Eka, Desy, Ira, Zola dan Maria. Terima kasih buat kalian semua yang selalu setia menemani hari-hariku di kos. All the best, kawan.
12. Temen-teman seperjuangan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Ekalia, Erika, Rio Candra, Nasik Ulwan, Endah, Adinna Asca, Abdoel, Mas Budi dan Mas Amin. Terima kasih telah menjadi warna di kehidupan peneliti, berkat kalian peneliti belajar untuk memahami arti perbedaan. So, kalian sungguh luar biasa. ☺

Jazakumullahu khoiron katsiron. Semoga Allah senantiasa melimpahkan segala Rahmat-Nya. Semoga penelitian sederhana ini dapat bermanfaat untuk penulis, pembaca, UIN Sunan Kalijaga, serta masyarakat umum. Amin.

Yogyakarta, 25 Maret 2016

Penyusun



Nurul Hidayati Yunaida

ABSTRAK

Nurul Hidayati Yunaida 12210107. Aplikasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Pers Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (Analisis Isi Dalam Laporan Utama Bulletin Slilit Arena UIN Sunan Kalijaga. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Pers mahasiswa merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengasak kreatifitas melalui dunia jurnalistik. Mahasiswa bebas menulis berupa berita, artikel, opini, surat pembaca, bahwa karya sastra sebagai produk jurnalistik. Produk tersebut dapat dirangkum dalam bentuk Bulletin Kampus. Salah satu produk jurnalistik adalah berita. Berita merupakan laporan keseharian tentang peristiwa yang terjadi. Dalam proses pembuatan berita, jurnalis mahasiswa harus paham dengan penerapan Kode Etik Jurnalistik. Bagaimana aplikasi kode etik jurnalistik dalam berita mahasiswa. Apakah sudah menerapkan kode etik jurnalistik hingga disebut layak dikonsumsi mahasiswa.

Penelitian ini mencoba meneliti tentang salah satu Bulletin pers mahasiswa Arena yang merupakan lembaga pers tingkat UIN Sunan Kalijaga. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif sebanyak 17 berita yang dianalisis, dan dibantu 6 pengkoding untuk menganalisis setiap berita menggunakan dimensi yang diturunkan dari Kode Etik Jurnalistik. Terdapat 5 pasal yang dioperasionalkan pada produk jurnalistik, hingga diturunkan menjadi 12 dimensi yaitu; kesesuaian judul dengan isi berita, kelengkapan peristiwa, penggunaan data pendukung, berimbang, kesesuaian subjek dan objek, relevansi sumber berita, jelas sumber berita, menguji informasi, percampuran fakta dan opini, kebohongan berita, unsur fitnah, dan diskriminasi berita. Pengujian hipotesis dilakukan dengan rumus *chi quadrat*.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis didapatkan angka *chi quadrat* 0,083 lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya bahwa H_0 (Belum menerapkan kode etik jurnalistik dalam pers mahasiswa Arena UIN Sunan Kalijaga) ditolak dan H_a (Sudah menerapkan kode etik jurnalistik dalam pers mahasiswa Arena UIN Sunan Kalijaga) diterima.

Kata Kunci: *Berita. Kode Etik Jurnalistik. Pers Mahasiswa*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK ..	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Kerangka Teori	11
F. Hipotesis	30
G. Sistematika Pembahasan	31
BAB II: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Analisis Penelitian	32
B. Definisi Konseptual	32
C. Definisi Operasional	37
D. Populasi dan Sampel	43
E. Instrumen Penelitian	45

F. Teknik Pengumpulan Data	45
G. Validitas dan Raliabilitas	46
H. Analisis Data	48

BAB III: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Dan Perkembangan Lembaga Pers Mahasiswa Arena	50
B. Profil Umum	52
C.Lambang Lembaga Pers Mahasiswa Arena	53
D. Visi Dan Misi	53
E. Susunan Kepengurusan Lembaga Pers Mahasiswa ARENA	54
1. Divisi Redaksi	54
2. Divisi Pusat Data Dan Analisa	55
3. Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM)	55
4. Divisi Perusahaan Dan Produksi	56
5. Divisi Jaringan Komunikasi Dan Informasi	57
F. Kebijakan Redaksi Lembaga Pers Mahasiswa Arena	57

BAB IV: ANALISIS APLIKASI KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PERS MAHASISWA ARENA UIN SUNAN KALIJAGA

A. Kode Etik Jurnalistik Dalam Bulletin Silit Arena 1. Pasal 1	59
a. Kesesuaian Judul Dengan Isi Berita	59
b. Kelengkapan Peristiwa	61
c. Data Pendukung	65
d. Keberimbangan Berita	70

2. Pasal 2	79
a. Kesesuaian Subjek Dan Objek Berita	79
b. Relevansi Sumber Berita	84
c. Kejelasan Sumber Berita	88
3. Pasal 3	92
a. Pengujian Informasi	92
b. Percampuran Fakta Dan Opini	96
4. Pasal 4	99
a. Kebohongan Berita	99
b. Unsur Fitnah	102
5. Pasal 8	105
a. Unsur Diskriminasi	105
B. Aplikasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Pers Mahasiswa Arena	107

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Kode Etik Jurnalistik
2. Lembar Coding Penelitian
3. Pengisian Lembar Coding
4. Struktur Keredaksian Lembaga Pers Mahasiswa Arena
5. Hasil Perhitungan Validitas Korelasi Person SPSS v. 16
6. Perhitungan Reliabilitas
7. Berita Bulletin Silit Arena
8. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Definisi Konseptual Kode Etik Jurnalistik	33
Tabel 2	Definisi Operasional Kode Etik Jurnalistik Pasal 1	37
Tabel 3	Definisi Operasional Kode Etik Jurnalistik Pasal 2	39
Tabel 4	Definisi Operasional Kode Etik Jurnalistik Pasal 3	40
Tabel 5	Definisi Operasional Kode Etik Jurnalistik Pasal 4	41
Tabel 6	Definisi Operasional Kode Etik Jurnalistik Pasal 8	42
Tabel 7	Berita Utama Buletin Silit Arena Periode 2014-2015	44
Tabel 8	Frekuensi Dimensi 1	60
Tabel 9	Frekuensi Dimensi 2	62
Tabel 10	Frekuensi Dimensi 3	65
Tabel 11	Frekuensi Dimensi 4	71
Tabel 12	Frekuensi Dimensi 5	80
Tabel 13	Frekuensi Dimensi 6	85
Tabel 14	Frekuensi Dimensi 7	88
Tabel 15	Frekuensi Dimensi 8	93
Tabel 16	Frekuensi Dimensi 9	97
Tabel 17	Frekuensi Dimensi 10	100
Tabel 18	Frekuensi Dimensi 11	102
Tabel 19	Frekuensi Dimensi 12	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Logo LPM Arena UIN Sunan Kalijaga	54
Gambar 2	Berita Dimensi Data Pendukung (Ilustrasi Gambar)	66
Gambar 3	Berita Dimensi Data Pendukung (Foto)	67
Gambar 4	Berita Dimensi Data Pendukung (Diagram Statistik)	68
Gambar 5	Berita Dimensi Data Pendukung (Buku)	69
Gambar 6	Berita Dimensi Tanpa Data Pendukung	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pers merupakan kebebasan untuk berekspresi, berpendapat dan mengeluarkan aspirasi. Namun kebebasan pers tetap terikat oleh sistem yang telah ada. Hal tersebut senada dengan pernyataan John C. Merrill bahwa semua konsep sistem pers memiliki tanggung jawab atas dirinya. Namun, bergantung pada manusia yang membuat sistem tersebut yaitu antara hak atau tanggung jawab yang ia pertingkatkan.¹

Mengenai tanggung jawab dalam pers telah ditetapkan beberapa aturan-aturan yang harus ditaati terutama dalam dunia jurnalistik. Aturan-aturan tersebut telah tercantum dalam kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik merupakan panduan moral dan etika kerja yang disusun untuk menegakkan integritas dan profesionalitas jurnalis. Tujuannya untuk mengontrol kinerja jurnalis dari pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar. Di dalam Al Qur'an telah ada surat yang menjelaskan tentang berita yang tidak benar, yaitu surat An-Nur ayat 11 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكَلِّ الْأَمْرِ
مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١١)

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu.

¹ Sedia Willing Barus, *Jurnalistik; Petunjuk Teknis Menulis Berita*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 225.

Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa diantara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.²

Konteks ayat tersebut, memberikan peringatan untuk berhati-hati dalam menyiarkan dan menyebarluaskan berita. Hal tersebut sangat penting bagi seorang jurnalis, terlebih dalam posisinya dianggap dipercaya oleh publik. Untuk itu, pengaturan kode etik jurnalistik perlu dipahami lebih dalam oleh seorang jurnalis agar tidak terjadi penyelewengan-penyelewangan yang merugikan salah satu pihak, atau kedua belah pihak.

Kode etik jurnalistik isinya berupa pasal-pasal yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers dan komunitas pers. Pasalnya terdiri atas 11 pasal yang mengatur dua hal, yaitu produk jurnalistik dan perilaku jurnalistik. Produk jurnalistik mencakup berita dalam berbagai bentuk surat pembaca, tajuk rencana, artikel opini, analisis pakar, dan resensi buku. Sementara perilaku jurnalistik mencakup sikap dan tindakan wartawan ketika menjalankan kerja jurnalistik termasuk ketika berhubungan dengan narasumber.³ Akan tetapi dalam kode etik jurnalistik hanya mengatur jurnalis yang terikat oleh perusahaan pers, bukan para pegiat pers mahasiswa.

² QS. An-Nuur (24): 11. Semua terjemah ayat Al Qur'an skripsi ini diambil dari Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Dinas Islam dan Urusan Haji, 1971).

³ Agus Sudibyo, *50 Tanya Jawab Tentang Pers*, (Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2013), hlm. 3.

Pers mahasiswa merupakan penerbitan yang dikelola dan diterbitkan oleh mahasiswa dengan bercirikan idealisme kemahasiswaan.⁴ Aktifitasnya dimulai dari mencari, mengolah, menyiarkan berita serta pencarian dana penerbitan yang dilakukan oleh mahasiswa aktivis kampus. Namun dalam dunia jurnalistik memicu pertanyaan baru apakah jurnalis pers mahasiswa memiliki kesamaan dengan jurnalis pers di bawah perusahaan media?

Apabila disesuaikan dengan definisi jurnalis dalam Undang-Undang tentang Pers bab 1 pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa jurnalis merupakan orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.⁵ Maka apabila dikaji lebih dalam istilah jurnalis tidak hanya diperuntukkan bagi jurnalis yang bekerja di bawah perusahaan media pers. Artinya setiap orang yang melakukan kegiatan jurnalistik bisa dikatakan sebagai jurnalis, begitupun bagi para jurnalis mahasiswa. Maka kode etik jurnalistik pun bisa diperuntukkan bagi siapapun termasuk para pegiat pers mahasiswa yang ingin melakukan kegiatan peliputan secara profesional.

Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan universitas yang menjunjung tinggi demokrasi. Mahasiswa bebas mengeluarkan suaranya melalui dunia jurnalistik, sehingga dunia pers mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga berkembang baik dari

⁴ Wisnu Prasetya Utama, *Pers Mahasiswa Melawan Komersialisasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Indie Book Corner, 2013), hlm. 5.

⁵ Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, pasal 1 ayat (4) dalam <http://maluku.kemenag.go.id/file/file/UndangUndang/lvmk1385532960.pdf>, diakses tanggal 28 Januari 2016.

tingkat jurusan, fakultas maupun universitas. Salah satu pers mahasiswa pada tingkat universitas adalah pers mahasiswa Arena.

Misi utama dari pers mahasiswa Arena yaitu sebagai media komunikasi antar mahasiswa penumbuh kreasi, pembawa aspirasi mahasiswa dan sebagai media kontrol.⁶ Dalam realisasinya Arena menerbitkan beberapa media antara lain Majalah Arena “Kancah Pemikiran Alternatif”, Buletin SLILIT “Jelas dan Mengganjal”, Jurnal Kancah “Arena Berpikir Kreatif” serta buku-buku tentang jurnalistik dan gerakan mahasiswa.

Perjalanan penerbitan pers mahasiswa Arena dari tahun-tahun silam, sempat berkali-kali dibredel dan dilarang terbit karena beberapa pemberitaannya yang mengundang konflik. Antara lain di tahun 1988, pernah mendapat teguran keras oleh Pangdam IV Diponegoro terkait pemberitaan Waduk Kedung Ombo, tahun 1993 buletin Arena pernah dibredel oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga terkait pemberitaan Bisnis Keluarga Soeharto sebagai laporan utamanya.

Hal serupa juga berlanjut di tahun 2012, buletin Silit Arena pernah menerbitkan laporan utama berjudul “Mengurai Benang Kusut di Fakultas Dakwah” yang isinya mengenai transparansi birokrasi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga. Pemberitaan tersebut membuat salah satu pihak dalam konflik dirugikan nama baiknya dan mengatakan bahwa berita tersebut adalah berita tidak benar.⁷

⁶ Sejarah Lembaga Pers Mahasiswa Arena, lpm_arena@yahoo.com, diakses tanggal 28 Januari 2016.

⁷ Ibnu Hajar, Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Pers Mahasiswa (Lpm) Dalam Proses Peliputan Berita Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,

Berangkat dari pemahaman dan permasalahan di masa lalu tersebut, membuat peneliti tergugah ingin tahu lebih dalam lagi tentang perkembangan aplikasi kode etik jurnalistik dalam pers mahasiswa terutama di Buletin Silit Arena Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga saat ini, sebagai bentuk koreksi terhadap buletin Silit Arena yang sekarang. Peneliti mengangkat judul **“Aplikasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Pers Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (Analisis Isi Dalam Laporan Utama Buletin Silit Arena UIN Sunan Kalijaga)”**.

B. Rumusan Masalah

Apakah pers mahasiswa Arena UIN Sunan Kalijaga sudah menerapkan kode etik jurnalistik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui apakah pers mahasiswa UIN Sunan Kalijaga sudah menerapkan kode etik jurnalistik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan sekaligus keilmuan baru dalam bidang jurnalistik terkait penerapan kode

etik jurnalistik di kalangan pers mahasiswa. Sehingga mahasiswa menjadi mengerti bahwa proses penulisan produk jurnalistik bukan hanya sekedar menulis, tetap berpedoman pada standarisasi kode etik jurnalistik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini, diharapkan menjadi bahan masukan yang positif bagi obyek penelitian atau pers mahasiswa untuk memperdalam pemahaman jurnalistik terutama dalam penerapan kode etik jurnalistik. Apabila dalam pers mahasiswa telah menerapkan kode etik jurnalistik dengan baik, maka perlu dipertahankan, dan apabila belum, perlu untuk ditingkatkan lagi agar menjadi baik.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berfungsi sebagai gambaran peneliti dalam menyusun skripsi ini, dan membuktikan akan kejujuran penelitian ini bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Untuk melengkapi kajian-kajian penelitian ini, peneliti mengambil beberapa referensi untuk menambah wawasan penelitian.

Dalam beberapa referensi peneliti menemukan penelitian berjudul *Pelanggaran Etika Periklanan Pada Iklan Media Cetak (Analisis Isi Pelanggaran Etika Pariwisata Indonesia Terhadap Iklan Komersial Pada Surat Kabar Harian Tribun Jogja Periode 1 Maret-31 Maret 2015)* oleh

*Muhammad Irhas*⁸, jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tahun 2015.

Penelitian ini berumusan masalah apa bentuk-bentuk pelanggaran etika pariwisata Indonesia terhadap iklan komersial SKH Tribun Jogja periode 1 Maret-31 Maret 2015. Konsep yang dibentuk penelitian ini adalah menggunakan dua konsep yaitu konsep etika pariwisata Indonesia dan konsep iklan media cetak, kemudian diturunkan menjadi tiga unit analisis yakni tata krama isi iklan, jenis iklan komersial, dan jenis produk.

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Irhas, menggunakan metode analisis isi kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Sesuai kajian isinya, Irhas menyimpulkan bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran etika pariwisata Indonesia oleh SKH Tribun Jogja sebesar 20,75 %, dan yang tidak melanggar ada 79,24 %.

Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh saudara Irhas dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama menggunakan metode analisis isi kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian yaitu SKH Tribun Jogja dan objek penelitiannya iklan komersial.

Kedua, penelitian yang berjudul *Etika Jurnalisme Dalam Media Komunitas (Studi Analisis Isi Penerapan Etika Jurnalistik Berita Daerah Istimewa Yogyakarta di suarakomunitas.net Periode Januari-Desember*

⁸ Muhammad Irhas, *Pelanggaran Etika Periklanan Pada Iklan Media Cetak (Analisis Isi Pelanggaran Etika Pariwisata Indonesia Terhadap Iklan Komersial Pada Surat Kabar Harian Tribun Jogja Periode 1 Maret-31 Maret 2015)*, skripsi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2015.

2013) oleh Yosephine Dwi Wulandari⁹, jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Atmajaya, tahun 2014.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan kode etik jurnalistik pada berita Daerah Istimewa Yogyakarta di *suarakomunitas.net* periode Januari-Desember 2013. Penelitian ini mengkaji secara kuantitatif semi kualitatif yaitu penelitian dilakukan dengan analisis isi kuantitatif dengan melihat dari teks-teks berita *suarakomunitas.net* untuk mengungkapkan penerapan kode etik jurnalistik dan kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap penulis berita untuk menjawab elemen jurnalistik yang tidak bisa dioperasionalkan dalam teks.

Konsep yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah kode etik jurnalistik pewarta komunitas pasal 1 dan pasal 3 dan menurunkan ke unit analisis akurasi fakta, relevansi sumber berita, akurasi penyajian, berimbang dan pengujian informasi. Kesimpulannya bahwa *suarakomunitas.net* sudah menerapkan dan mematuhi kode etik jurnalistik pewarta komunitas dan hanya sedikit saja yang tidak menerapkan kode etik.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh saudara Yosephine dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan metode analisis isi kuantitatif dengan melihat dari pesan teks-teks berita yang tersurat. Perbedaannya terletak pada tidak adanya pemakaian metode

⁹ Yosephine Dwi Wulandari, *Etika Jurnalisme Dalam Media Komunitas (Studi Analisis Isi Penerapan Etika Jurnalistik Berita Daerah Istimewa Yogyakarta di suarakomunitas.net Periode Januari – Desember 2013)*, Skripsi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Atmajaya 2014.

wawancara untuk menjawab permasalahan elemen jurnalistik. Perbedaan selanjutnya adalah subjek penelitian yaitu media warga *suarakomunitas.net* dan objek penelitian yaitu Berita Daerah Istimewa Yogyakarta maka konsep yang diturunkan pun berbeda yakni terletak pada kode etik jurnalistik pewarta komunitas.

Ketiga, penelitian yang berjudul *Etika Jurnalistik Dalam Berita Kekerasan Seksual Anak Pada SKH Warta Kota Periode Januari-Juli 2013* oleh Prihartanto Dwi Saputra¹⁰, jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Atmajaya, tahun 2013.

Penelitian ini mengambil rumusan masalah bagaimana etika jurnalistik dalam pemberitaan kekerasan anak SKH Warta Kota periode Januari-Juli 2013. Isi penelitian ini hanya mengkaji konsep pasal 4, pasal 5, dan pasal 9 kode etik jurnalistik yang menjelaskan tentang bagaimana pemberitaan kekerasan anak dalam teks.

Kajian ini, Prihartanto menyimpulkan bahwa SKH Warta Kota belum cukup baik dalam menerapkan kode etik jurnalistik terutama pada pasal 5 yang isinya berita akan melakukan penyamaran identitas, akan tetapi dalam penelitiannya tidak diterapkan dalam teks pemberitaan.

Persamaan penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode analisis isi kuantitatif dengan tahapan pemilihan sampel, penarikan sampel, dan reliabilitas coding. Penarikan

¹⁰ Prihartanto Dwi Saputro, *Etika Jurnalistik Dalam Berita Kekerasan Seksual Anak Pada SKH Warta Kota Periode Januari – Juli 2013*, skripsi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atmajaya 2013.

sampel sama-sama menggunakan total sampel, karena jumlah populasi kurang dari 100 item berita yang diteliti.

Perbedaannya adalah subjek penelitian yaitu SKH Warta Kota dan objek penelitian berita kekerasan anak. Konsep yang diturunkan pun berbeda, yakni dari pasal 4, pasal 5, dan pasal 9 kode etik jurnalistik.

Keempat, penelitian berjudul *Kelayakan Berita Citizen Journalism (Studi Analisis Isi Kuantitatif Mengenai Kelayakan Berita Dalam Kolom Citizen Journalism Surat Kabar Harian Tribun Jogja Periode November 2012-Februari 2013)* oleh Fransiscus Asisi Aditya Yuda¹¹, jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Atmajaya, tahun 2013.

Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana kelayakan berita *citizen journalism* dalam SKH Tribun Jogja periode november 2012-Februari 2013. Penelitian ini menggunakan konsep kode etik jurnalistik indonesia pasal 1, pasal 2, pasal 3 dengan penurunan unit analisis pada kelengkapan 5W+1H, tipe liputan, sifat fakta, relevansi sumber berita, kelengkapan keterangan foto dan opini wartawan, dan format berita.

Persamaan penelitian ini adalah terletak pada metode penelitian menggunakan analisis isi kuantitatif dengan teknik dokumentasi serta memakai konsep kode etik Jurnalistik Indonesia. Perbedaannya terletak pada objek penelitian (*citizen journalism*) dan subjek penelitian (SKH Tribun

¹¹ Fransiscus Asisi Aditya Yuda, *Kelayakan Berita Citizen Journalism (Studi Analisis Isi Kuantitatif Mengenai kelayakan berita dalam kolom citizen journalism Surat Kabar Harian Tribun Jogja Periode November 2012-Februari 2013)*, skripsi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atmajaya 2013.

Jogja) serta konsep pasal yang diteliti. Peneliti mengambil pasal-pasal yang dapat dioperasionalkan dalam teks saja.

Fransiscus menyimpulkan bahwa berita *citizen journalism* SKH Tribun Jogja layak dikonsumsi masyarakat, karena telah memenuhi standar kode etik jurnalistik Indonesia, tetapi masih ada percampuran opini *citizen journalist* yang terletak pada *body* teks.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Jurnalistik

Jurnalistik jika ditinjau dari sudut pandang etimologi artinya kewartawanan atau kepenulisan. Kata dasarnya dari *journal*, artinya laporan atau catatan, atau *jour* dari bahasa Prancis berarti hari atau *day*. Asal muasalnya dari bahasa Yunani kuno, *du jour* yang berarti hari, maka dapat didefinisikan kejadian hari ini yang diberitakan dalam lembaran tercetak.¹²

Menurut Kustadi Suhandang definisi jurnalistik adalah seni atau keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya.¹³

¹² Indah Suryawati, *Jurnalistik, Suatu Pengantar Teori dan Praktik* (Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, 2014) hlm. 4

¹³ Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita Dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional* (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2008) hlm. 3

2. Sembilan Elemen Jurnalistik

Menurut Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, terdapat sembilan elemen jurnalisme dalam dunia jurnalistik yakni sebagai berikut:¹⁴

a. Kebenaran

Kebenaran yang dimaksud bukan kebenaran secara filosofis, melainkan kebenaran yang fungsional. Dimana kebenaran suatu berita dapat dibentuk melalui hari demi hari, lapisan demi lapisan. Ibaratnya stalagmit, tetes demi tetes kebenaran dapat membentuk stalagmit yang besar, begitupun dengan kebenaran sehari-hari dapat membentuk bangunan kebenaran yang lebih lengkap.

b. Loyalitas kepada Warga (*Citizens*)

Jurnalisme itu melayani kepentingan umum dan bukan melayani kepentingan sekelompok orang tertentu atau bahkan melayani kekuasaan politik. Apabila kita menengok masa sekarang media pemberitaan mulai dipertanyakan keberimbangan beritanya. Terlebih dalam kondisinya banyak perusahaan media massa yang memanfaatkan media sebagai ajang bisnis ataupun kampanye politik partai. Sehingga keberimbangan pemberitaan media jauh dari idealisme yang diharapkan.

c. Disiplin Dalam Melakukan Verifikasi

Disiplin verifikasi yang dimaksud adalah pemisahan antara jurnalisme dari hiburan, propaganda, fiksi, atau seni. Sebab, hiburan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 53-60.

fokus utamanya pada hal-hal yang membuat hati senang. Propaganda menyeleksi fakta atau mengarang fakta demi kepentingan yang lain, persuasi dan manipulasi.

d. Independensi

Independensi yang dimaksud adalah independensi pikiran, dari kelas atau status ekonomi, dan independensi dari ras, etnis, agama, dan gender. Ini berarti wartawan dalam menulis berita melepaskan semua yang ada pada dirinya. Ia bertugas melaporkan dan menunjukkan fakta apa adanya, tanpa takut kepada sebuah kelompok.

e. Memantau Kekuasaan

Media harus memfungsikan diri sebagai pengamat sosial. Pengamat sosial ini fungsinya meluruskan apa yang bengkok dan menjaga agar yang lurus tetap lurus. Memantau kekuasaan yang dimaksud adalah bertujuan untuk menegakkan demokrasi. Artinya, media tidak sekedar memberikan fakta-fakta telanjang saja, tetapi fakta-fakta itu benar-benar memperjelas duduk persoalannya.

f. Jurnalisme Harus Menghadirkan Sebuah Forum Untuk Kritik Dan Komentar Publik

Surat kabar harus menyediakan ruang agar masyarakat bisa menyampaikan keluhan, kritik, dan komentarnya kepada siapa saja, dan dimana saja. Maka dengan begitu fungsi jurnalisme sebagai forum publik sangat penting karena melalui forum tersebut dapat menegakkan demokrasi.

g. Jurnalisme Harus Memikat dan Relevan

Jurnalisme adalah bercerita dengan suatu tujuan. Tujuannya yakni menyediakan informasi yang dibutuhkan orang. Tantangan pertama adalah menemukan informasi yang orang butuhkan untuk menjalani hidup mereka. Kedua adalah membuatnya bermakna, relevan, dan enak disimak.

h. Kewajiban Wartawan Menjadikan Beritanya Proporsional Dan Komprehensif

Berita yang tidak proporsional salah satunya adalah judul-judulnya yang sangat provokatif dan sensasional. Bahkan antara judul dengan isi sering kali tidak ada kaitannya sama sekali. Judul yang sensasional biasanya hanya menurut wartawan pembuat judul, bukan berdasar informasi yang sebenarnya. Tentu saja diharapkan dengan judul seperti itu, pembaca akan menyimaknya.

i. Wartawan Memiliki Kewajiban Untuk Mendengarkan Suara Hati Nuraninya Sendiri

Setiap wartawan harus memiliki rasa etik dan tanggung jawab. Tantangan dan tekanan yang dihadapi wartawan baik dari luar atau dalam (ruang redaksi) membuat praktisi jurnalisme terkurung dalam batasan-batasan tertentu dalam menjalani pekerjaannya.

3. Produk Jurnalistik

Proses mencari, mengumpulkan, mengolah dalam dunia jurnalistik akan menghasilkan produk berupa berita. Berita menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Sementara menurut Haris Sumadiria, berita merupakan laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala.¹⁵

Penyusunan sebuah berita membutuhkan teknik tertentu yakni bisa menggunakan teknik melaporkan (*to report*), memakai pola piramida terbalik (*inverted pyramid*), serta mengacu pada unsur 5W+1H. Mengenai teknik melaporkan (*to report*), dalam proses peliputan berita jurnalis tidak boleh memasukkan pendapat pribadi dalam berita yang ditulis, dibacakan, atau ditayangkan. Sehingga dalam kaitannya berita diartikan sebagai fakta apa adanya, obyektif dan bebas dari intervensi siapapun dan dari pihak manapun termasuk dari kalangan jurnalis, editor, dan kaum investor media massa itu sendiri.

Teknik pola piramida terbalik (*inverted pyramid*) dalam berita biasanya disusun secara deduktif, yakni hal yang sangat penting dinyatakan dalam paragraf pertama, paragraf berikutnya penting, cukup penting, kurang penting, agak kurang penting, tidak penting, dan samasekali tidak penting. Rumusnya semakin kebawah semakin tidak penting.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 65.

Penggunaan rumus 5W+1H dalam berita dapat membuat berita menjadi lengkap, akurat, dan memenuhi standar teknis jurnalistik. Penjelasanannya yaitu unsur *what* berarti peristiwa apa yang akan dilaporkan kepada khalayak. *Who* berarti siapa yang menjadi pelaku dalam peristiwa berita itu. *When* berarti kapan peristiwa itu terjadi; tahun, bulan, minggu, hari, jam dan menit. *Why* berarti mengapa peristiwa itu sampai terjadi. *How* berarti bagaimana jalannya peristiwa atau bagaimana cara menanggulangi peristiwa tersebut.

4. Aplikasi Kode Etik Jurnalistik

Aplikasi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah penerapan atau penggunaan.¹⁶ Menurut Eka Noviansyah adalah penggunaan dan penerapan suatu konsep yang menjadi suatu pokok pembahasan.¹⁷

Kode artinya tanda (*sign*) yang secara luas diartikan “bangunan simbolik”. Adapun syarat perumusan sebuah kode etik harus bersifat rasional, tidak kering dari emosi, konsisten tetapi tidak kaku.¹⁸

Kode etik jurnalistik diartikan berupa nilai-nilai dasar yang disepakati secara universal atau disebut cita-cita yang didambakan setiap manusia atas kinerja jurnalistik. Kode etik jurnalistik dijadikan standart

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam kbbi.co.id diakses tanggal 8 Juni 2016.

¹⁷ PKW Satriya, “Lkp: Rancangan Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Data Pengabdian Masyarakat pada Bagian Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Stikom surabaya”, *Jurnal Komunikasi* (April, 2014), hlm. 11.

¹⁸ Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 49.

aktivitas profesi kewartawannya dalam melakukan proses mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita.

Maka disimpulkan bahwa aplikasi kode etik jurnalistik merupakan penerapan atau penggunaan yang berpedoman pada konsep kode etik jurnalistik.

Terdapat sejumlah kode etik jurnalistik yang dirumuskan dan diberlakukan oleh organisasi-organisasi kewartawanan yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) serta kode etik yang dibuat bersama yaitu Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Kode Etik Wartawan Indonesia atau KEWI merupakan kode etik yang disepakati semua organisasi wartawan cetak dan elektronik. Kode etik ini, awal mulanya disusun oleh 26 organisasi wartawan di Bandung pada tanggal 1 September 1999 kemudian disempurnakan kembali oleh 29 organisasi wartawan dan organisasi pers pada tanggal 14 Maret 2006 di Jakarta, dan kode etik jurnalistik ini dimuat sebagai Lampiran SK Dewan Pers No. 03/SK-DP/III 2006 tentang kode etik jurnalistik tertanggal 24 Maret 2006. Isi dari kode etik jurnalistik yang telah disepakati bersama berjumlah 11 pasal. Tetapi dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil beberapa pasal saja yang dapat dioperasionalkan dalam teks berita. Adapun kode etik jurnalistik yang dipakai dalam penelitian ini adalah terdiri dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal 8. Penjelasan pasal-pasalnya adalah sebagai berikut:

Pasal 1

“Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”.¹⁹

Penafsiran:

1. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
2. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
3. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
4. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Berdasarkan penafsiran dari pasal 1, peneliti mengambil point 2 dan 3 untuk mengaplikasikan kode etik jurnalistik pasal 1. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Akurat

Akurat merupakan pengukuran kejujuran suatu pemberitaan. Menurut Rahma Ida, akurasi pemberitaan dapat diukur melalui tiga kategorisasi yaitu kesesuaian judul berita dengan isi berita,

¹⁹ Indah Suryawati, *Jurnalistik, Suatu Pengantar Teori....*, hlm. 103.

pencantuman kelengkapan peristiwa dan adanya penggunaan data pendukung.²⁰

Kategori tersebut dijelaskan kesesuaian judul dengan isi berita yang dimaksud bahwa menyangkut aspek relevansi, yaitu apakah kalimat judul utama (bukan subjudul) merupakan bagian dari kalimat yang sama pada isi berita atau kutipan yang jelas-jelas ada dalam isi berita.

Pencantuman kelengkapan peristiwa dapat diukur dengan adanya pencantuman unsur 5W+1H. Adapun penjelasan unsur 5W+1H tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur *What* (apa), yaitu bila berita mencantumkan penjelasan mengenai peristiwa apa yang sedang terjadi.
2. Unsur *When* (kapan), yaitu bila berita mencantumkan waktu, bisa tanggal, kata-kata, atau pernyataan tentang waktu, bisa tanggal, kata-kata atau pernyataan tentang waktu atau keduanya sekaligus.
3. Unsur *Where* (dimana), yaitu bila berita mencantumkan penjelasan tentang tempat atau dimana peristiwa tersebut berlangsung.
4. Unsur *Who* (siapa), yaitu bila berita mencantumkan penjelasan tentang siapa pelaku atau orang yang mengalami peristiwa tersebut.
5. Unsur *Why* (mengapa), yaitu bila berita mencantumkan penjelasan tentang mengapa peristiwa tersebut terjadi.

²⁰ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 245.

6. Unsur *How* (bagaimana), yaitu bila berita mencantumkan penjelasan tentang bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi.

Adanya penggunaan data pendukung yang dimaksud adalah untuk mengukur kelengkapan informasi atas peristiwa yang ditampilkan, apabila dalam berita dapat dilihat dengan adanya penggunaan tabel, statistik, foto, ilustrasi gambar, dan lain sebagainya.

b. Berimbang

Pemberitaan yang berimbang merupakan pemberitaan yang memuat informasi dari berbagai pihak yang bersangkutan.²¹ Dalam pemberitaan dapat dikatakan seimbang apabila narasumber yang memberikan informasi bermuatan *pro* dan *kontra*, alias tidak memberitakan sepihak saja tetapi beberapa pihak yang bersangkutan.

Hal tersebut dapat dihitung dengan berapa banyak ruang dan waktu yang diberikan wartawan untuk menyajikan pendapat atau kepentingan salah satu pihak. Keberimbangan suatu berita dapat dilihat dari tipe peliputannya yaitu dari kategori satu sisi, dua sisi, dan multi sisi.

Dikatakan kategori satu sisi pemberitaan menghadirkan liputan satu pihak saja, atau menghadirkan beberapa pihak namun pendapatnya serupa.

²¹ *Ibid.*, hlm. 242.

Kategori dua sisi apabila pemberitaan menghadirkan liputan dengan memuat kedua belah pihak dengan pendapat dan pandangan yang berbeda.

Kategori multi sisi apabila pemberitaan menghadirkan liputan dari berbagai pihak dengan pendapat dan pandangan banyak pihak dan memungkinkan pemberitaan menjadi objektif.

Pasal 2

“Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”.²²

Penafsiran:

Cara-cara profesional adalah sebagai berikut:

1. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber.
2. Menghormati hak privasi.
3. Tidak menyuap.
4. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya.
5. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara seimbang.
6. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara.

²² Indah Suryawati, *Jurnalistik, Suatu Pengantar Teori....*, hlm. 103.

7. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan sebagai karya sendiri.
8. Penggunaan cara-cara tertentu dapat pertimbangan untuk peliputan investigasi bagi kepentingan publik.

Berdasarkan penafsiran pasal 2, peneliti mengambil point 4 saja untuk mewakili kode etik pasal 2 dalam penelitian ini. Definisinya adalah sebagai berikut:

a. Faktual

Faktual bisa dikatakan sebagai bentuk reportase yang berkaitan dengan peristiwa dan pernyataan yang bisa dicek ke narasumber dan bebas dari opini, atau setidaknya bebas dari komentar wartawan.²³ Faktual bisa disyaratkan adanya kebenaran. Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Hal tersebut bisa dikatakan kebenaran korespondensi. Berdasarkan teori tersebut, peneliti mengkategorisasikan faktual berdasarkan dua kategori yaitu kesesuaian pernyataan subjek dengan objek pemberitaan dan relevansi sumber berita, yang dapat diukur dengan kaitannya peristiwa yang terjadi dengan narasumber yang diwawancarai.

b. Jelas Sumber Berita

Sumber berita atau narasumber merupakan siapa atau apa saja yang berada pada posisi mengetahui suatu fakta, peristiwa atau kejadian, informasi, gagasan dan data yang mengandung nilai berita.

²³ Nurudin, *Jurnalisme Masa Kini*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 82.

Kedudukan sumber berita sangat penting, seperti yang diungkap oleh Deddy Iskandar Muda bahwa sumber berita harus layak dipercaya dan disebutkan nama sumbernya. Sumber-sumber yang tidak disebutkan identitasnya merupakan isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.²⁴

Berdasarkan teori tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa berita yang jelas sumbernya adalah berita yang terdapat kejelasan tentang identitas dan nama sumber berita atau narasumber. Dalam berita dapat dilihat dari penulisan nama narasumber, pekerjaan dan jabatan.

Pasal 3

“Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”.²⁵

Penafsiran:

1. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi.
2. Berimbang adalah memberikan ruang dan waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
3. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.

²⁴ Indah Suryawati, *Jurnalistik, Suatu Pengantar Teori....*, hlm. 108.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 104.

4. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip yang tidak menghakimi seseorang.

Berdasarkan pasal 3, peneliti mengambil penafsiran dari point 1 dan 3. Berikut penjelasan point penafsiran pasal tersebut:

a. Menguji Informasi

Menguji Informasi atau disiplin verifikasi yaitu penyaringan desas-desus berita bahwa apakah berita tersebut benar-benar terjadi atau sekedar gosip belaka.²⁶ Dalam kaitannya peneliti membuat pengujian informasi dikatakan lolos verifikasi apabila narasumbernya tidak berasal satu orang saja. Karena bisa saja apabila pandangan satu orang akan bersifat subjektif, dan apabila lebih dari satu orang akan bersifat objektif. Aplikasi dalam teks dapat dilihat dari komentar atau pendapat narasumber yang lebih dari satu.

b. Tidak Mencampurkan Fakta Dan Opini

Opini wartawan yang menghakimi dapat diukur dengan ada dan tidaknya pencampuran opini wartawan yang menulis berita dalam teks berita. Opini dapat didefinisikan sebagai kata-kata opinionative seperti tampaknya, diperkirakan, seakan-akan, terkesan, kesannya, seolah, agaknya, diramalkan, kontroversi, mengejutkan, manuver, sayangnya, dan sebagainya.²⁷ Peneliti menyimpulkan bahwa dikatakan adanya

²⁶ Indah Suryawati, *Jurnalistik, Suatu Pengantari....*, hlm. 56.

²⁷ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset....*, hlm. 241.

percampuran opini apabila terdapat kata opinionative, begitupun sebaliknya.

Pasal 4

“Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”²⁸

Penafsiran:

1. Bohong adalah sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
2. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
3. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
4. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
5. Dalam penyiaran gambar dan suara dan arsip, wartawan mencampurkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Berdasarkan pasal 4, peneliti mengambil penafsiran point 1 dan 2 sebagai pendukung kode etik pasal 4 serta disesuaikan dengan teks berita yang telah diteliti. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

²⁸ *Ibid.*, hlm. 104.

a. Bohong

Bohong menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya.²⁹ Berita bohong terjadi ketika media mengarang-ngarang berita, mengarang wawancara, atau membuat wawancara fiktif. Dalam pemberitaan dapat dilihat melalui ketidakakuratan berita dan tidak adanya pengujian informasi atau verifikasi dari sumber berita.

b. Fitnah

Fitnah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkkan orang, seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang.³⁰ Bisa dikatakan bahwa dalam sumber berita perlu disaring kebenarannya apakah benar atau mengandung unsur fitnah. Maka dalam berita tidak boleh memberitakan kejelekan orang tanpa dasar, melainkan hanya bermaksud untuk menjelekkkan nama baiknya. Berita dapat dilihat melalui penulisannya apakah yang diberitakan ada pendukung kalimat yang mengandung unsur menjelekkkan dan menodai nama baik.

Pasal 8

“Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas

²⁹ W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 168.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 168.

dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani”.³¹

Penafsiran:

1. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
2. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Berdasarkan penafsiran pasal 8 peneliti mengambil point 2 untuk mewakili kode etik pasal 8 dalam penelitian ini. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

Diskriminasi

Diskriminasi merupakan sikap merendahkan seseorang berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin atau kecenderungan seksual, dan terhadap kelemahan fisik dan mental atau penyandang cacat.³² Peneliti menyimpulkan dalam pemberitaan ini, setidaknya tidak ada penulisan yang mendetail tentang ras seseorang, warna kulit, agama, kecenderungan seksual, kelemahan fisik dan mental atau penyandang cacat, kecuali hal itu secara langsung berkaitan dengan isi berita.

³¹ *Ibid.*, hlm. 107.

³² As Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia.....*, hlm. 244.

5. Kebebasan Pers Mahasiswa

Pers berasal dari bahasa latin *pressare* yang berarti tekan atau cetak. Pers kemudian diartikan menjadi media massa cetak atau *printing media*. Lazimnya pers dipakai untuk surat kabar maupun majalah. Menurut Weiner, pers memiliki tiga arti yaitu wartawan media cetak, publisitas atau peliputan, dan mesin cetak.³³ Dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers disebutkan bahwa pers memiliki fungsi sebagai media informasi, mendidik, menghibur dan sebagai media kontrol sosial. Keempat fungsi tersebut jelas memiliki manfaat besar terhadap publik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Amartya Sen bahwa melalui pers kita dapat berkomunikasi dan lebih memahami dunia secara lebih leluasa, menyuarakan aspirasi kalangan yang termarginalkan, dan ikut serta menyebarkan pengetahuan.³⁴

Pers memiliki kebebasan secara utuh yang tercantum dalam UU nomor 40 tahun 1999 pasal 4 yang isinya bahwa kemerdekaan pers telah dijamin sebagaimana hak asasi warga negara. Pers tidak dikenakan sensor, pebedelan dan pelarangan penyiaran. Pers memiliki hak untuk mencari, menyampaikan gagasan dan informasi kepada masyarakat, serta wartawan memiliki hak tolak.³⁵ Adanya UU kebebasan pers tersebut, memunculkan inisiatif mahasiswa untuk mendirikan organisasi pers mahasiswa. Pers

³³ Masduki, *Kebebasan Pers.....*, hlm. 7.

³⁴ Maman Suratman, "Meneguhkan Kembali Kebebasan Pers di Dunia Kampus", <http://mamansuratmanahmad.wordpress.com/2014/05/08/meneguhkan-kembali-kebebasan-pers-di-dunia-kampus/>, diakses tanggal 4 April 2016.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

mahasiswa merupakan pers yang dikelola dan dipublikasikan oleh mahasiswa yang berisi tentang karya-karya jurnalistik mahasiswa. Sehingga gagasan-gagasan yang disampaikan bercirikan idealisme mahasiswa.

Pers mahasiswa bukanlah organisasi yang bekerja atas dasar rasionalitas ekonomi, seperti halnya pers umum. Bahkan pers mahasiswa tidak sepenuhnya menghidupi roda keorganisasiannya dengan mengandalkan iklan. Bayaran yang didapatkan hanyalah pengalaman proses pembelajaran jurnalistik, jaringan dan juga pertemanan. Maka pers mahasiswa lebih unggul dalam kesetiakawanan dan kesukarelaan daripada pers umum yang hanya mengandalkan laba finansial. Menurut Amir Husin Daulay tulisan-tulisan yang diterbitkan pers mahasiswa lebih memiliki ciri khas kritis, inovatis, analitis, objektif, dan kaya ide.³⁶ Sehingga lebih independen dan proporsi tulisan beritanya lebih proposional, berani dan bebas mengkritik segala kebijakan tanpa terbatas oleh ruang independensi pemilik modal.

6. Tanggung Jawab Pers Mahasiswa

Kaitannya dengan tanggung jawab, pers mahasiswa memiliki tanggung jawab terhadap khalayak. Khalayak dalam arti orang yang membaca, membeli dan berlangganan media mahasiswa. Tentu benar bahwa jiwa pengabdian pers mahasiswa adalah berorientasi dan memberikan yang terbaik terhadap pembaca. Sehingga setidaknya

³⁶ Wisnu Prasetya Utomo, *Pers Mahasiswa Melawan Komersialisasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Indie Book Corner, 2013), hlm. 10.

informasi atau berita yang disajikan oleh pers mahasiswa layak untuk dikonsumsi khalayak dan sesuai dengan kode etik jurnalistik yang ditetapkan. Maka tidak terjadi kekhawatiran informasi yang disajikan dalam media mahasiswa yang dapat meresahkan pembaca bahkan sampai menyebabkan sumber keonaran. Oleh sebab itu dalam menentukan profesionalisme pers mahasiswa perlu adanya dasar moral yang baik dan sikap tanggung jawab terhadap peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh undang-undang kode etik jurnalistik Indonesia.³⁷

G. Hipotesis

Hipotesis berkaitan erat dengan masalah dan teori. Hipotesis merupakan jawaban sementara permasalahan penelitian. Apabila masalah selalu dikemukakan dengan menggunakan kalimat pertanyaan, sebaliknya, hipotesis menggunakan kalimat pernyataan atau kalimat deklaratif.³⁸

Peneliti merumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H_a : Sudah menerapkan kode etik jurnalistik dalam pers mahasiswa
Arena UIN Sunan Kalijaga

H_0 : Belum menerapkan kode etik jurnalistik dalam pers mahasiswa
Arena UIN Sunan Kalijaga

³⁷ Ana Nadhya Abrar, *Pers Mahasiswa dan Permasalahan Operasionalisasinya*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm. 79.

³⁸ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian, Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 121.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penggambaran pokok berupa susunan alur berpikir dalam kajian skripsi isi. Adapun penelitian ini dijabarkan berdasarkan lima bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang berisikan awal utama penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, hipotesis dan sistematika pembahasan.

Bab II: Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis analisis data, definisi konseptual, definisi operasional, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, validitas dan reliabilitas dan analisis data.

Bab III: Penggambaran Lembaga Pers Mahasiswa Arena UIN Sunan Kalijaga, yang diuraikan berdasarkan sejarah dan perkembangannya, profil umum, logo, visi dan misi, struktur organisasi keredaksian dan kebijakan keredaksian.

Bab IV: Aplikasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Laporan Utama Buletin Slilit Arena, yang isinya berupa analisis isi setiap laporan utama buletin Slilit Arena dengan unit analisis yang telah diturunkan dari kode etik jurnalistik.

Bab V: Penutup, yang merupakan bab terakhir dari pembahasan. Isinya berupa kesimpulan hasil analisis penelitian serta saran-saran untuk penelitian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil perhitungan, peneliti menarik beberapa kesimpulan. Pertama, dimensi yang digunakan peneliti dikatakan *valid* karena dalam pengukuran validitas pada tabel sig. (2-tailed) antar peneliti dan masing-masing coder adalah 0,00 atau di bawah 0,01. Maka disimpulkan bahwa uji validitas antar masing-masing kolom (peneliti dan antar *coder*) terdapat kecocokan atau *valid*.

Kedua, dimensi juga dikatakan reliabel karena hasil perhitungan reliabilitas memenuhi kriteria yaitu lebih dari angka 0,7. Hasil perhitungan dimensi paling tinggi dicapai sebesar 2 dan perhitungan paling rendah adalah didapat sebesar 0,7.

Ketiga, adapun kode etik jurnalistik yang diteliti adalah berdasarkan pada pasal 1; akurat dan berimbang yang dibagi ke dimensi kesesuaian judul dengan isi berita, kelengkapan peristiwa, penggunaan data pendukung, dan berimbang. Pasal 2; faktual dan jelas sumber berita dibagi ke dimensi kesesuaian subjek dan objek, relevansi sumber berita, dan jelas sumber berita. Pasal 3; dimensi menguji informasi dan percampuran fakta dan opini, pasal 4 dimensi kebohongan berita dan unsur fitnah dan pasal 8 dimensi diskriminasi berita. Dari 12 dimensi tersebut terdapat obyektifitas positif yang lebih dari 0,7 adalah sebanyak 8 dan sisanya adalah 4 yang tidak memenuhi kriteria ada. Pasal 1, dimensi kesesuaian judul dengan isi berita dengan variabel ada sebanyak 119 poin (100%), dimensi kelengkapan peristiwa dengan variabel ada

sebanyak 114 poin (95,8%) dan yang tidak ada sebanyak 5 poin (4,2%). Dimensi penggunaan data pendukung dengan variabel ada sebanyak 106 poin (89,1%), sementara variabel tidak ada sebanyak 13 poin (10,9%). Dimensi berimbang dengan variabel satu sisi sebanyak 10 poin (8,4%), variabel dua sisi sebanyak 13 poin (10,9%), variabel multi sisi sebanyak 96 poin (80,7%). Pasal 2, dimensi kesesuaian subjek dan objek dengan variabel ada sebanyak 116 poin (97,5%), sementara variabel tidak ada sebanyak 3 poin (2,5%). Dimensi relevansi sumber berita dengan variabel sebanyak 118 poin (99,1%), sementara variabel tidak ada sebanyak 1 poin (0,9%). Dimensi kejelasan sumber berita dengan variabel ada sebanyak 115 poin (96,6%) dan variabel tidak ada sebanyak 4 poin (3,4%). Pasal 3, dimensi pengujian informasi dengan variabel ada sebanyak 119 poin (100%), dan variabel tidak ada sebanyak 0 poin (0 %). Dimensi percampuran fakta dan opini variabel tidak ada sebanyak 110 (92,4%) dan variabel ada sebanyak 9 poin (7,6%). Pasal 4, dimensi kebohongan berita variabel tidak ada sebanyak 108 poin (90,7%) dan variabel ada sebanyak 11 poin (9,2%). Dimensi unsur fitnah dengan variabel tidak ada sebanyak 112 poin (94,2%) dan variabel ada sebanyak 7 poin (5,8%). Pasal 8, dimensi diskriminasi dengan variabel tidak ada sebanyak 109 poin (91,6%) dan variabel ada sebanyak 10 poin (8,4%).

Keempat, dari pengujian hipotesis dengan menggunakan rumus *chi quadrat* didapatkan angka 0,083, lebih besar dari angka 0,05 maka H_a (Sudah menerapkan kode etik jurnalistik dalam pers mahasiswa Arena UIN Sunan Kalijaga) diterima dan H_0 (Belum menerapkan kode etik jurnalistik dalam pers

mahasiswa Arena UIN Sunan Kalijaga) ditolak. Dapat disimpulkan bahwa pers mahasiswa Arena UIN Sunan Kalijaga telah menerapkan kode etik jurnalistik.

B. Saran

1. Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UIN Sunan Kalijaga

Pers mahasiswa merupakan wadah untuk berkepresensi lewat karya jurnalistik di tingkat mahasiswa. Melalui karya jurnalistik mahasiswa dapat berekspresi, berpendapat dan mengkritisi kebijakan kampus yang telah ada tanpa melakukan aksi demo massal. Meski begitu, karya jurnalistik yang ditulis setidaknya harus mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kode etik jurnalistik. Sehingga dapat menanamkan rasa tanggung jawab terhadap para jurnalis mahasiswa.

2. Mahasiswa Peminat Dunia Jurnalistik

Tetaplah untuk menulis dan berkarya!

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abrar, Ana Nadhya, *Pers Mahasiswa dan Permasalahan Operasionalisasinya*, Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Barus, Sedia Willing, *Jurnalistik; Petunjuk Teknis Menulis Berita*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Direktorat Jenderal Dinas Islam dan Urusan Haji, 1971.
- Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Nurudin, *Jurnalisme Masa Kini*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Poerwadarmita, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif; Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2011.
- Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian, Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sudiby, Agus, *50 Tanya Jawab Tentang Pers*, Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2013.
- Sumadiria, AS Haris, *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita Dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Suryawati, Indah, *Jurnalistik, Suatu Pengantar Teori dan Praktik*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Utama, Wisnu Prasetya, *Pers Mahasiswa Melawan Komersialisasi Pendidikan*, Yogyakarta: Indie Book Corner, 2013.

Skripsi

Asisi Aditya Yuda, Fransiscus, *Kelayakan Berita Citizen Journalism (Studi Analisis Isi Kuantitatif Mengenai kelayakan berita dalam kolom citizen journalism Surat Kabar Harian Tribun Jogja Periode November 2012-Februari 2013)*, skripsi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atmajaya 2013.

Dwi Wulandari, Yosephine, *Etika Jurnalisme Dalam Media Komunitas (Studi Analisis Isi Penerapan Etika Jurnalistik Berita Daerah Istimewa Yogyakarta di suarakomunitas.net Periode Januari – Desember 2013)*, Skripsi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Atmajaya 2014.

Irhas, Muhammad, *Pelanggaran Etika Periklanan Pada Iklan Media Cetak (Analisis Isi Pelanggaran Etika Pariwisata Indonesia Terhadap Iklan Komersial Pada Surat Kabar Harian Tribun Jogja Periode 1 Maret-31 Maret 2015)*, skripsi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2015.

Saputro, Prihartanto Dwi, *Etika Jurnalistik Dalam Berita Kekerasan Seksual Anak Pada SKH Warta Kota Periode Januari – Juli 2013*, skripsi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atmajaya 2013.

Jurnal

Satriya, PKW, “Lkp: Rancangan Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Data Pengabdian Masyarakat pada Bagian Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Stikom Surabaya”, Jurnal, Surabaya: Stikom Surabaya, 2014.

Internet

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, pasal 1 ayat (4) dalam <http://maluku.kemenag.go.id/file/file/UndangUndang/lvmk1385532960.pdf>, diakses tanggal 28 Januari 2016.

lpm_arena@yahoo.com, diakses tanggal 28 Januari 2016.

Ibnu Hajar, Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Pers Mahasiswa (Lpm) Dalam Proses Peliputan Berita Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, <http://kuasa-rakyat.blogspot.co.id/2014/10/v-behaviorurldefaultvmlo.html>, diakses tanggal 28 Januari 2016.

Maman Suratman, “Meneguhkan Kembali Kebebasan Pers di Dunia Kampus”, <http://mamansuratmanahmad.wordpress.com/2014/05/08/meneguhkan-kembali-kebebasan-pers-di-dunia-kampus/>, diakses tanggal 4 April 2016.

Lampiran 1: Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik

Kamis, 28 Juli 2011

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. menghormati hak privasi;
- c. tidak menyuap;
- d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

- a. Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan

permintaan narasumber.

c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.

d. *Off the record* adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.

b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.

b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.

b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

(Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers)

2. Kejelasan Sumber Berita

7. Penulisan kejelasan sumber berita

0 = Tidak jelas 1 = Jelas

Pasal 3

1. Menguji Informasi (Disiplin Verifikasi)

8. Pengujian informasi dalam berita

0 = Tidak ada 1 = Ada

2. Percampuran Fakta Dan Opini

9. Percampuran fakta dan opini yang menghakimi

0 = Tidak ada 1 = Ada

Pasal 4

1. Unsur Kebohongan Berita

10. Apakah ada unsur kebohongan berita

0 = Tidak ada 1 = Ada

2. Unsur Fitnah

11. Apakah ada unsur fitnah dalam berita

0 = Tidak ada 1 = Ada

Pasal 8

1. Diskriminasi

12. Apakah ada unsur diskriminasi dalam berita

0 = Tidak ada 1 = Ada

Protokol Pengisian Lembar *Coding* Aplikasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Pers Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (Analisis Isi Dalam Laporan Utama Buletin Silit Arena UIN Sunan Kalijaga)

Pengantar

Analisis isi ini dimaksudkan untuk mengetahui aplikasi kode etik jurnalistik dalam pers mahasiswa Arena UIN Sunan Kalijaga periode 2014-2015. Penelitian ini melihat aplikasi pasal 1, 2, 3, 4 dan 8 dari kode etik jurnalistik tahun 2006.

Berita

Penelitian ini hanya menyertakan berita utama. Penelitian ini tidak menyertakan iklan atau edvertorial (iklan yang ditulis sebagai informasi, seperti surat kabar). Berita disini didefinisikan sebagai semua produk yang dimuat oleh surat kabar selain iklan, dan dibuat oleh wartawan surat kabar. Dalam surat kabar, berita ini dapat ditemukan di halaman berita utama surat kabar. Tetapi, berita di sini tidak memasukkan editorial (Tajuk Rencana), opini/kolom (baik yang dibuat oleh wartawan surat kabar ataupun oleh penulis luar), dan surat pembaca atau semacamnya.

Prosedur

Lihatlah berita laporan utama buletin Silit Arena yang telah disediakan beserta lembar coding. Kemudian, isilah lembar coding dengan memilih salah satu jawaban dari pilihan yang ada pada setiap pertanyaan.

Panduan untuk *coding sheet* sebagai berikut:

Q1: Kesesuaian Judul Dengan Isi Berita

Kesesuaian judul dengan isi berita diartikan sebagai keterkaitan antara judul dengan isi berita. Apakah dalam judul merupakan bagian dari kalimat yang sama pada isi berita atau kutipan yang jelas-jelas ada dalam isi berita.

0 = Tidak ada. Apabila dalam judul tidak merupakan bagian dari kalimat yang sama pada isi berita atau kutipan yang jelas-jelas ada dalam isi berita.

1 = Ada. Apabila dalam judul merupakan bagian dari kalimat yang sama pada isi berita atau kutipan yang jelas-jelas ada dalam isi berita.

Q2. Kelengkapan Peristiwa

Kelengkapan peristiwa dapat didukung dengan adanya kelengkapan unsur peristiwa seperti 5W +1 H. Penjelasan sebagai berikut:

What (apa) yaitu bila berita mencantumkan penjelasan mengenai peristiwa apa yang sedang terjadi.

Where (dimana) yaitu bila berita mencantumkan penjelasan tentang tempat atau dimana peristiwa tersebut berlangsung

Why (mengapa) yaitu bila berita mencantumkan penjelasan tentang mengapa peristiwa tersebut terjadi.

Who (siapa) yaitu bila berita mencantumkan penjelasan tentang siapa pelaku atau orang yang mengalami peristiwa tersebut.

When (kapan) yaitu bila berita mencantumkan waktu, bisa tanggal, kata-kata, atau pernyataan tentang waktu, bisa tanggal, kata-kata atau pernyataan tentang waktu atau keduanya sekaligus.

How (bagaimana) yaitu bila berita mencantumkan penjelasan tentang bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi.

Apakah dalam berita terdapat kelengkapan unsur berita 5W+1H untuk membuktikan adanya kelengkapan peristiwa yang terjadi.

0 = Tidak Ada. Apabila dalam berita tidak terdapat kelengkapan pencantuman unsur berita, seperti, *what* (apa), *where* (dimana), *why* (mengapa), *who* (siapa), *when* (kapan) dan *how* (bagaimana).

1 = Ada. Apabila dalam berita terdapat kelengkapan pencantuman unsur berita, seperti, *what* (apa), *where* (dimana), *why* (mengapa), *who* (siapa), *when* (kapan) dan *how* (bagaimana).

Q3. Penggunaan Data Pendukung

Penggunaan data pendukung yang dimaksud adalah untuk mengukur kelengkapan informasi atas peristiwa yang ditampilkan. Apakah dalam pemberitaan terdapat kelengkapan salah satu data pendukung, seperti tabel, statistik, foto, ilustrasi gambar, buku, UU, dan lain sebagainya.

0 = Tidak ada. Apabila dalam berita tidak terdapat kelengkapan salah satu data pendukung, seperti tabel, statistik, foto, ilustrasi gambar, buku, UU, dan lain sebagainya.

1 = Ada. Apabila dalam berita terdapat kelengkapan salah satu data pendukung, seperti tabel, statistik, foto, ilustrasi gambar, buku, UU, dan lain sebagainya.

Q4. Keberimbangan Berita

Keberimbangan dapat mengukur muatan informasi yang dapat dilihat dari berapa banyak ruang dan waktu yang diberikan wartawan untuk menyajikan pendapat atau kepentingan pihak dalam pemberitaan. Apakah dalam pemberitaan menghadirkan narasumber sepihak atau bahkan narasumber banyak pihak.

1 = Satu sisi. Apabila dalam pemberitaan hanya menghadirkan liputan dari satu pihak (narasumber) saja, atau beberapa pihak (narasumber) namun pendapatnya serupa.

2 = Dua sisi. Apabila dalam pemberitaan mengenai suatu peristiwa yang diberitakan digali dari kedua belah pihak (narasumber) dengan pendapat atau pandangan yang berbeda.

3 = Multi sisi. Apabila dalam pemberitaan menghadirkan liputan dari berbagai sisi dengan pendapat atau pandangan dari berbagai pihak (narasumber) yang memungkinkan pemberitaan menjadi lebih objektif.

Q5. Kesesuaian Subjek Dan Objek Pemberitaan

Kesesuaian subjek (narasumber) dengan objek (peristiwa) pemberitaan dapat dijadikan untuk mengukur faktualitas suatu berita. Apakah pemberitaan yang dibuat adalah sesuai antara pernyataan narasumber dengan peristiwa yang diberitakan.

0 = Tidak sesuai. Apabila **dalam pemberitaan tidak terdapat kesesuaian antara pernyataan subjek (orang/narasumber) dengan objek (peristiwa) yang diberitakan.**

1 = Sesuai. Apabila **dalam pemberitaan terdapat kesesuaian antara pernyataan subjek (orang/narasumber) dengan objek (peristiwa) yang diberitakan.**

Q6. Relevansi Sumber Berita

Relevansi sumber berita dapat diartikan dengan kaitannya peristiwa yang terjadi dengan narasumber yang diwawancarai. Apakah dalam pemberitaan terdapat relevansi atau kesesuaian antara peristiwa yang diberitakan dengan orang atau narasumber yang dimintai pernyataan dalam berita tersebut.

0 = Tidak relevan. Apabila dalam pemberitaan tidak terdapat relevansi antara peristiwa yang diberitakan dengan orang atau narasumber yang dimintai pernyataan atau diwawancarai dalam berita tersebut.

1 = Relevan. Apabila dalam pemberitaan terdapat relevansi antara peristiwa yang diberitakan dengan orang atau narasumber yang dimintai pernyataan atau diwawancarai dalam berita tersebut.

Q7. Kejelasan Sumber Berita

Sumber berita adalah siapa atau apa saja yang berada pada posisi mengetahui suatu fakta, peristiwa atau kejadian, informasi, gagasan dan data yang mengandung nilai berita. Apakah **dalam berita terdapat pencantuman identitas**

sumber berita narasumber seperti nama, pekerjaan, jabatan atau sesuatu yang memungkinkan untuk dikonfirmasi.

0 = Tidak jelas. Apabila dalam berita tidak terdapat pencantuman identitas sumber berita atau narasumber seperti nama, pekerjaan, jabatan atau sesuatu yang memungkinkan untuk dikonfirmasi.

1 = Jelas. Apabila dalam berita terdapat pencantuman identitas sumber berita atau narasumber seperti nama, pekerjaan, jabatan atau sesuatu yang memungkinkan untuk dikonfirmasi.

Q8. Menguji Informasi (Disiplin Verifikasi)

Menguji Informasi atau disiplin verifikasi yaitu penyaringan desas-desus berita bahwa apakah berita tersebut benar-benar terjadi atau sekedar gosip belaka. Pengujian informasi dikatakan lolos verifikasi apabila narasumbernya tidak berasal satu orang saja. Apakah pemberitaan tersebut menampilkan narasumber lebih dari satu orang atau hanya satu orang saja.

0 = Tidak ada. Apabila dalam pemberitaan hanya menampilkan satu narasumber saja.

1 = Ada. Apabila dalam pemberitaan menampilkan narasumber lebih dari satu.

Q9. Percampuran Fakta Dan Opini

Opini dapat didefinisikan sebagai kata-kata opinionative seperti tampaknya, diperkirakan, seakan-akan, terkesan, kesannya, seolah, agaknya, diramalkan, kontroversi, mengejutkan, manuver, sayangnya, dan sebagainya. Apakah dalam pemberitaan terdapat opini wartawan pembuat berita.

0 = Tidak ada. Apabila dalam pemberitaan tidak terdapat kata-kata opinionative seperti tampaknya, diperkirakan, seakan-akan, terkesan, kesannya, seolah, agaknya, diramalkan, kontroversi, mengejutkan, manuver, sayangnya, dan sebagainya.

1 = Ada. Apabila dalam pemberitaan terdapat kata-kata opinionative seperti tampaknya, diperkirakan, seakan-akan, terkesan, kesannya, seolah, agaknya, diramalkan, kontroversi, mengejutkan, manuver, sayangnya, dan sebagainya.

Q10. Unsur Kebohongan Berita

(Perhatian: Pernyataan Q10 ini diisi 0 apabila dalam Q1, Q2, Q3, dan Q8 jawabannya adalah ada (1). Apabila dalam Q1, Q2, Q3, dan Q8 jawabannya adalah tidak ada (0), maka Q10 diisi 1).

Bohong didefinisikan sesuatu yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya. Posisi disini dikatakan bohong jika tidak akurat dan tidak ada

pengujian informasi. Apakah berita tersebut dapat dikatakan bohong ataukah tidak.

0 = Tidak bohong. Apabila dalam pemberitaan terdapat kelengkapan keakuratan dan pengujian informasi.

1 = Bohong. Apabila dalam pemberitaan tidak terdapat kelengkapan keakuratan dan pengujian informasi.

Q11. Unsur Fitnah

Fitnah diartikan sebagai pemberitaan tanpa berdasarkan kebenaran yang dengan maksud menjelekkkan orang, seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang. Apakah dalam berita tersebut terdapat penulisan atau kalimat yang menjelekkkan nama baik, merugikan kehormatan orang lain dan memojokkan narasumber tanpa dasar yang jelas.

0 = Tidak ada. Apabila dalam pemberitaan tidak terdapat penulisan atau kalimat yang mengandung unsur menjelekkkan nama baik, merugikan kehormatan orang lain dan memojokkan narasumber tanpa dasar yang jelas.

1 = Ada. Apabila dalam pemberitaan terdapat penulisan atau kalimat yang mengandung unsur menjelekkkan nama baik, merugikan kehormatan orang lain dan memojokkan narasumber tanpa dasar yang jelas.

Q12. Diskriminasi

Diskriminasi berita ditandai dengan adanya penulisan yang mendetail tentang ras seseorang, warna kulit, agama, kecenderungan seksual, kelemahan fisik dan mental atau penyandang cacat, kecuali hal itu secara langsung berkaitan dengan isi berita.

0 = Tidak ada. Apabila dalam berita tidak terdapat penggambaran atau penulisan detail tentang ras seseorang, warna kulit, agama, kecenderungan seksual, kelemahan fisik dan mental atau penyandang cacat.

1 = Ada. Apabila dalam berita terdapat penggambaran atau penulisan detail tentang ras seseorang, warna kulit, agama, kecenderungan seksual, kelemahan fisik dan mental atau penyandang cacat.

Lampiran 3: Pengisian Lembar Coding 7 Pengkoding

Pengisian Lembar Coding Penelitian	
Pasal 1 Akurat	Jumlah
1. Kesesuaian Judul Dengan Isi Berita	
• Tidak ada	0
• Ada	119
2. Kelengkapan Peristiwa	
• Tidak ada	5
• Ada	114
3. Penggunaan Data Pendukung	
• Tidak ada	13
• Ada	106
Berimbang	
4. Keberimbangan Berita	
• Satu sisi	10
• Dua sisi	13
• Multi sisi	96
Pasal 2 Faktual	
5. Kesesuaian Subjek Dan Objek Pemberitaan	
• Tidak sesuai	3
• Sesuai	116
6. Relevansi Sumber Berita	
• Tidak relevan	1
• Relevan	118
Kejelasan Sumber Berita	
7. Penulisan kejelasan sumber berita	
• Tidak jelas	4
• Jelas	115
Pasal 3 Menguji Informasi (Disiplin Verifikasi)	
8. Pengujian informasi dalam berita	
• Tidak ada	12
• Ada	107
Percampuran Fakta Dan Opini	
9. Percampuran fakta dan opini yang menghakimi	
• Tidak ada	110
• Ada	9

Pasal 4 Unsur Kebohongan Berita	
10. Apakah ada unsur kebohongan berita <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada 	108
<ul style="list-style-type: none"> • Ada 	11
Unsur Fitnah	
11. Apakah ada unsur fitnah dalam berita <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada 	112
<ul style="list-style-type: none"> • Ada 	7
Pasal 8 Diskriminasi	
12. Apakah ada unsur diskriminasi dalam berita <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada 	109
<ul style="list-style-type: none"> • Ada 	10

Lampiran 4: Struktur Keredaksian Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Arena

Struktur Keredaksian Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Arena Periode 2014-2015

Pemimpin Umum	: Ahmad Jamaludin
Wakil Pemimpin Umum	: Dedik Dwi Prihatmoko
Bendahara Umum	: Chusnul Chotimah
Sekretaris Umum	: Anisatul Umah
Pemimpin Redaksi	: Lugas Subarkah
Redaktur Silit	: Usman Hadi
Redaktur Online/Web	: Ulfatul Fikriyah
Redaktur Bahasa	: Sabiq Ghidafian Hafidz (Layouter)
Divisi Perusahaan dan Distribusi.	: Khusni Hajar (Koordinator) Ekmil Lana Dina Khaulah Pundhi Budi Agung Wicaksono Indria Hartika Lilik Sulistyowati Tika
Divisi Pusat Data dan Analisa	: Robandi (Koordinator) Imroatus Saadah Ulufun Ni'mah Maya

Mar'atus Sholihah

Chaerizanisazi

Fauzi

Mugiarjo

Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM)

Arifkie Budia Warman (Koordinator)

Nurul Elmi

Arif Setiawan

Irsal Mas'udi

Amri

Mutiara Nur Said

Isma Swastiningrum

Divisi Jaringan Komunikasi dan Informasi (Jarkominfo)

Rahmat Effendi (Koordinator).

Faridatul Chusna

M Faksi Fahlevi

Rifa'i

Anis Nur Nadhiroh

Yazid

Faisal Hidayat

Ainun Najib

Nur Aris Shoim

Lampiran 5: Hasil Perhitungan Validitas Korelasi Person SPSS v. 16

Tabel 9.

Uji Validitas Korelasi Pearson

Correlations

		Peneliti	Coder 1	Coder 2	Coder 3	Coder 4	Coder 5	Coder 6
Peneliti	Pearson Correlation	1	.991**	.975**	.996**	.988**	.975**	.986**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	12	12	12	12	12	12	12
Coder 1	Pearson Correlation	.991**	1	.987**	.993**	.995**	.986**	.992**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	12	12	12	12	12	12	12
Coder 2	Pearson Correlation	.975**	.987**	1	.986**	.988**	.991**	.992**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	12	12	12	12	12	12	12
Coder 3	Pearson Correlation	.996**	.993**	.986**	1	.989**	.982**	.990**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	12	12	12	12	12	12	12
Coder 4	Pearson Correlation	.988**	.995**	.988**	.989**	1	.985**	.989**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	12	12	12	12	12	12	12

Coder 5	Pearson Correlation	.975**	.986**	.991**	.982**	.985**	1	.989**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	12	12	12	12	12	12	12
Coder 6	Pearson Correlation	.986**	.992**	.992**	.990**	.989**	.989**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	12	12	12	12	12	12	12

** . Correlation is significant at the 0.01 level

(2-tailed).

Sumber: Data Primer

Lampiran 6: Perhitungan Reliabilitas

1. Pasal 1

a. Dimensi 1 (Kesesuaian Judul Dengan Isi Berita)

Perhitungan Reliabilitas Dimensi 1

CR Coder 1	CR Coder 2
$\begin{aligned} \text{CR1} &= \frac{2M}{N1 + N2} \\ &= \frac{2 \cdot 17}{17 + 17} \\ &= \frac{34}{34} \\ &= 1 \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{CR2} &= \frac{2M}{N2 + N3} \\ &= \frac{2 \cdot 17}{17 + 17} \\ &= \frac{34}{34} \\ &= 1 \end{aligned}$
CR Coder 3	CR Coder 4
$\begin{aligned} \text{CR3} &= \frac{2M}{N3 + N4} \\ &= \frac{2 \cdot 17}{17 + 17} \\ &= \frac{34}{34} \\ &= 1 \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{CR4} &= \frac{2M}{N4 + N5} \\ &= \frac{2 \cdot 17}{17 + 17} \\ &= \frac{34}{34} \\ &= 1 \end{aligned}$
CR Coder 5	
$\begin{aligned} \text{CR5} &= \frac{2M}{N5 + N2} \\ &= \frac{2 \cdot 17}{17 + 17} \\ &= \frac{34}{34} \\ &= 1 \end{aligned}$	

Sumber: Data Primer

b. Dimensi 2 (Kelengkapan Peristiwa)

Perhitungan Reliabilitas Dimensi 2

CR Coder 1	CR Coder 2
$\begin{aligned} \text{CR1} &= \frac{2M}{N1 + N2} \\ &= \frac{2 \cdot 14}{17 + 17} \\ &= \frac{28}{34} \\ &= 0,823529 \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{CR2} &= \frac{2M}{N2 + N3} \\ &= \frac{2 \cdot 14}{17 + 15} \\ &= \frac{28}{32} \\ &= 0,875 \end{aligned}$
CR Coder 3	CR Coder 4
$\begin{aligned} \text{CR3} &= \frac{2M}{N3 + N4} \\ &= \frac{2 \cdot 14}{15 + 17} \\ &= \frac{28}{32} \\ &= 0,875 \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{CR4} &= \frac{2M}{N4 + N5} \\ &= \frac{2 \cdot 14}{17 + 17} \\ &= \frac{28}{34} \\ &= 0,823529 \end{aligned}$
CR Coder 5	
$\begin{aligned} \text{CR5} &= \frac{2M}{N5 + N6} \\ &= \frac{2 \cdot 14}{17 + 17} \\ &= \frac{28}{34} \\ &= 0,823529 \end{aligned}$	

Sumber: Data Primer

c. Dimensi 3 (Penggunaan Data Pendukung)

Tabel 12.

Perhitungan Reliabilitas Dimensi 3

CR Coder 1	CR Coder 2
$\begin{aligned} \text{CR1} &= \frac{2M}{N1 + N2} \\ &= \frac{2 \cdot 14}{17 + 15} \\ &= \frac{28}{32} \\ &= 0,875 \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{CR2} &= \frac{2M}{N2 + N3} \\ &= \frac{2 \cdot 14}{15 + 14} \\ &= \frac{28}{29} \\ &= 0,965517 \end{aligned}$
CR Coder 3	CR Coder 4
$\begin{aligned} \text{CR3} &= \frac{2M}{N3 + N4} \\ &= \frac{2 \cdot 14}{14 + 15} \\ &= \frac{28}{29} \\ &= 0,965517 \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{CR4} &= \frac{2M}{N4 + N5} \\ &= \frac{2 \cdot 14}{15 + 17} \\ &= \frac{28}{32} \\ &= 0,875 \end{aligned}$
CR Coder 5	
$\begin{aligned} \text{CR5} &= \frac{2M}{N5 + N6} \\ &= \frac{2 \cdot 14}{17 + 17} \\ &= \frac{28}{34} \\ &= 0,823529 \end{aligned}$	

Sumber: Data Primer

d. Dimensi 4 (Keberimbangan Berita)

Perhitungan Reliabilitas Dimensi 4 (Satu Sisi)

CR Coder 1	CR Coder 2
$\begin{aligned} \text{CR1} &= \frac{2M}{N1 + N2} \\ &= \frac{2.1}{1 + 1} \\ &= \frac{2}{2} \\ &= 1 \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{CR2} &= \frac{2M}{N2 + N3} \\ &= \frac{2.1}{1 + 2} \\ &= \frac{2}{3} \\ &= 0,7 \end{aligned}$
CR Coder 3	CR Coder 4
$\begin{aligned} \text{CR3} &= \frac{2M}{N3 + N4} \\ &= \frac{2.1}{2 + 1} \\ &= \frac{2}{3} \\ &= 0,7 \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{CR4} &= \frac{2M}{N4 + N5} \\ &= \frac{2.1}{1 + 2} \\ &= \frac{2}{3} \\ &= 0,7 \end{aligned}$
CR Coder 5	
$\begin{aligned} \text{CR5} &= \frac{2M}{N5 + N6} \\ &= \frac{2.1}{2 + 1} \\ &= \frac{2}{3} \\ &= 0,7 \end{aligned}$	

Sumber: Data Primer

Perhitungan Reliabilitas Dimensi 4 (Dua Sisi)

CR Coder 1	CR Coder 2
$\begin{aligned} \text{CR1} &= \frac{2M}{N1 + N2} \\ &= \frac{2.2}{2 + 2} \\ &= \frac{4}{4} \\ &= 1 \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{CR2} &= \frac{2M}{N2 + N3} \\ &= \frac{2.2}{2 + 2} \\ &= \frac{4}{4} \\ &= 1 \end{aligned}$
CR Coder 3	CR Coder 4
$\begin{aligned} \text{CR3} &= \frac{2M}{N3 + N4} \\ &= \frac{2.2}{2 + 1} \\ &= \frac{4}{3} \\ &= 1,3333 \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{CR4} &= \frac{2M}{N4 + N5} \\ &= \frac{2.2}{1 + 3} \\ &= \frac{4}{4} \\ &= 1 \end{aligned}$
CR Coder 5	
$\begin{aligned} \text{CR5} &= \frac{2M}{N5 + N6} \\ &= \frac{2.2}{3 + 2} \\ &= \frac{4}{5} \\ &= 0,8 \end{aligned}$	

Sumber: Data Primer

Perhitungan Reliabilitas Dimensi 4 (Multi Sisi)

CR Coder 1	CR Coder 2
$\begin{aligned} \text{CR1} &= \frac{2M}{N1 + N2} \\ &= \frac{2 \cdot 14}{14 + 13} \\ &= \frac{28}{27} \\ &= 1,37037 \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{CR2} &= \frac{2M}{N2 + N3} \\ &= \frac{2 \cdot 14}{13 + 14} \\ &= \frac{28}{27} \\ &= 1,37037 \end{aligned}$
CR Coder 3	CR Coder 4
$\begin{aligned} \text{CR3} &= \frac{2M}{N3 + N4} \\ &= \frac{2 \cdot 14}{14 + 15} \\ &= \frac{28}{29} \\ &= 0,965517 \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{CR4} &= \frac{2M}{N4 + N5} \\ &= \frac{2 \cdot 14}{15 + 12} \\ &= \frac{28}{27} \\ &= 1,37037 \end{aligned}$
CR Coder 5	
$\begin{aligned} \text{CR5} &= \frac{2M}{N5 + N6} \\ &= \frac{2 \cdot 14}{12 + 14} \\ &= \frac{28}{26} \\ &= 1,67923 \end{aligned}$	

Sumber: Data Primer

3. Pasal 2

a. Dimensi 5 (Kesesuaian Subjek Dan Objek Berita)

Perhitungan Reliabilitas Dimensi 5

CR Coder 1	CR Coder 2
$\begin{aligned} \text{CR1} &= \frac{2M}{N1 + N2} \\ &= \frac{2 \cdot 17}{17 + 15} \\ &= \frac{34}{32} \\ &= 1,0625 \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{CR2} &= \frac{2M}{N2 + N3} \\ &= \frac{2 \cdot 17}{15 + 17} \\ &= \frac{34}{32} \\ &= 1,0625 \end{aligned}$
CR Coder 3	CR Coder 4
$\begin{aligned} \text{CR3} &= \frac{2M}{N3 + N4} \\ &= \frac{2 \cdot 17}{17 + 17} \\ &= \frac{34}{34} \\ &= 1 \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{CR4} &= \frac{2M}{N4 + N5} \\ &= \frac{2 \cdot 17}{17 + 17} \\ &= \frac{34}{34} \\ &= 1 \end{aligned}$
CR Coder 5	
$\begin{aligned} \text{CR5} &= \frac{2M}{N5 + N6} \\ &= \frac{2 \cdot 17}{17 + 16} \\ &= \frac{34}{33} \\ &= 1,030303 \end{aligned}$	

Sumber: Data Primer

b. Dimensi 6 (Relevansi Sumber Berita)

Perhitungan Reliabilitas Dimensi 6

CR Coder 1	CR Coder 2
$\begin{aligned} \text{CR1} &= \frac{2M}{N1 + N2} \\ &= \frac{2 \cdot 17}{17 + 16} \\ &= \frac{34}{33} \\ &= 1,030303 \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{CR2} &= \frac{2M}{N2 + N3} \\ &= \frac{2 \cdot 17}{16 + 17} \\ &= \frac{34}{33} \\ &= 1,030303 \end{aligned}$
CR Coder 3	CR Coder 4
$\begin{aligned} \text{CR3} &= \frac{2M}{N3 + N4} \\ &= \frac{2 \cdot 17}{17 + 17} \\ &= \frac{34}{34} \\ &= 1 \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{CR4} &= \frac{2M}{N4 + N5} \\ &= \frac{2 \cdot 17}{17 + 17} \\ &= \frac{34}{34} \\ &= 1 \end{aligned}$
CR Coder 5	
$\begin{aligned} \text{CR5} &= \frac{2M}{N5 + N6} \\ &= \frac{2 \cdot 17}{17 + 17} \\ &= \frac{34}{34} \\ &= 1 \end{aligned}$	

Sumber: Data Primer

c. Dimensi 7 (Kejelasan Sumber Berita)

Perhitungan Reliabilitas Dimensi 7

CR Coder 1	CR Coder 2
$\begin{aligned} \text{CR1} &= \frac{2M}{N1 + N2} \\ &= \frac{2 \cdot 17}{17 + 15} \\ &= \frac{34}{32} \\ &= 1,03625 \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{CR2} &= \frac{2M}{N2 + N3} \\ &= \frac{2 \cdot 17}{15 + 17} \\ &= \frac{34}{33} \\ &= 1,030303 \end{aligned}$
CR Coder 3	CR Coder 4
$\begin{aligned} \text{CR3} &= \frac{2M}{N3 + N4} \\ &= \frac{2 \cdot 17}{17 + 17} \\ &= \frac{34}{34} \\ &= 1 \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{CR4} &= \frac{2M}{N4 + N5} \\ &= \frac{2 \cdot 17}{17 + 17} \\ &= \frac{34}{34} \\ &= 1 \end{aligned}$
CR Coder 5	
$\begin{aligned} \text{CR5} &= \frac{2M}{N5 + N6} \\ &= \frac{2 \cdot 17}{17 + 17} \\ &= \frac{34}{34} \\ &= 1 \end{aligned}$	

Sumber: Data Primer

3. Pasal 3

a. Dimensi 8 (Pengujian Informasi)

Perhitungan Reliabilitas Dimensi 8

CR Coder 1	CR Coder 2
$\begin{aligned} \text{CR1} &= \frac{2M}{N1 + N2} \\ &= \frac{2 \cdot 17}{17 + 17} \\ &= \frac{34}{34} \\ &= 1 \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{CR2} &= \frac{2M}{N2 + N3} \\ &= \frac{2 \cdot 17}{17 + 17} \\ &= \frac{34}{34} \\ &= 1 \end{aligned}$
CR Coder 3	CR Coder 4
$\begin{aligned} \text{CR3} &= \frac{2M}{N3 + N4} \\ &= \frac{2 \cdot 17}{17 + 17} \\ &= \frac{34}{34} \\ &= 1 \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{CR4} &= \frac{2M}{N4 + N5} \\ &= \frac{2 \cdot 17}{17 + 17} \\ &= \frac{34}{34} \\ &= 1 \end{aligned}$
CR Coder 5	
$\begin{aligned} \text{CR5} &= \frac{2M}{N5 + N6} \\ &= \frac{2 \cdot 17}{17 + 17} \\ &= \frac{34}{34} \\ &= 1 \end{aligned}$	

Sumber: Data Primer

b. Dimensi 9 (Percampuran Fakta Dan Opini)

Perhitungan Reliabilitas Dimensi 9

CR Coder 1	CR Coder 2
$\begin{aligned} \text{CR1} &= \frac{2M}{N1 + N2} \\ &= \frac{2.1}{1 + 2} \\ &= \frac{2}{3} \\ &= 0,7 \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{CR2} &= \frac{2M}{N2 + N3} \\ &= \frac{2.1}{2 + 1} \\ &= \frac{2}{3} \\ &= 0,7 \end{aligned}$
CR Coder 3	CR Coder 4
$\begin{aligned} \text{CR3} &= \frac{2M}{N3 + N4} \\ &= \frac{2.1}{1 + 2} \\ &= \frac{2}{3} \\ &= 0,7 \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{CR4} &= \frac{2M}{N4 + N5} \\ &= \frac{2.1}{2 + 1} \\ &= \frac{2}{3} \\ &= 0,7 \end{aligned}$
CR Coder 5	
$\begin{aligned} \text{CR5} &= \frac{2M}{N5 + N6} \\ &= \frac{2.1}{1 + 1} \\ &= \frac{2}{2} \\ &= 1 \end{aligned}$	

Sumber: Data Primer

4. Pasal 4

a. Dimensi 10 (Kebohongan Berita)

Perhitungan Reliabilitas Dimensi 10

CR Coder 1	CR Coder 2
$\begin{aligned} \text{CR1} &= \frac{2M}{N1 + N2} \\ &= \frac{2.2}{0 + 3} \\ &= \frac{4}{3} \\ &= 1,33333 \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{CR2} &= \frac{2M}{N2 + N3} \\ &= \frac{2.2}{3 + 3} \\ &= \frac{4}{6} \\ &= 0,7 \end{aligned}$
CR Coder 3	CR Coder 4
$\begin{aligned} \text{CR3} &= \frac{2M}{N3 + N4} \\ &= \frac{2.2}{3 + 0} \\ &= \frac{4}{3} \\ &= 1,33333 \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{CR4} &= \frac{2M}{N4 + N5} \\ &= \frac{2.2}{0 + 1} \\ &= \frac{4}{1} \\ &= 4 \end{aligned}$
CR Coder 5	
$\begin{aligned} \text{CR5} &= \frac{2M}{N5 + N6} \\ &= \frac{2.2}{1 + 2} \\ &= \frac{2}{3} \\ &= 0,7 \end{aligned}$	

Sumber: Data Primer

b. Dimensi 11 (Unsur Fitnah)

Perhitungan Reliabilitas Dimensi 11

CR Coder 1	CR Coder 2
$\begin{aligned} \text{CR1} &= \frac{2M}{N1 + N2} \\ &= \frac{2.1}{0 + 2} \\ &= \frac{2}{2} \\ &= 1 \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{CR2} &= \frac{2M}{N2 + N3} \\ &= \frac{2.1}{2 + 1} \\ &= \frac{2}{3} \\ &= 0,7 \end{aligned}$
CR Coder 3	CR Coder 4
$\begin{aligned} \text{CR3} &= \frac{2M}{N3 + N4} \\ &= \frac{2.1}{1 + 1} \\ &= \frac{2}{2} \\ &= 1 \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{CR4} &= \frac{2M}{N4 + N5} \\ &= \frac{2.1}{1 + 2} \\ &= \frac{2}{3} \\ &= 0,7 \end{aligned}$
CR Coder 5	
$\begin{aligned} \text{CR5} &= \frac{2M}{N5 + N6} \\ &= \frac{2.1}{2 + 0} \\ &= \frac{2}{2} \\ &= 1 \end{aligned}$	

Sumber: Data Primer

5. Pasal 8

a. Dimensi 12 (Diskriminasi Berita)

Perhitungan Reliabilitas Dimensi 12

CR Coder 1	CR Coder 2
$\begin{aligned} \text{CR1} &= \frac{2M}{N1 + N2} \\ &= \frac{2.2}{0 + 2} \\ &= \frac{4}{2} \\ &= 2 \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{CR2} &= \frac{2M}{N2 + N3} \\ &= \frac{2.2}{2 + 2} \\ &= \frac{4}{4} \\ &= 1 \end{aligned}$
CR Coder 3	CR Coder 4
$\begin{aligned} \text{CR3} &= \frac{2M}{N3 + N4} \\ &= \frac{2.2}{2 + 2} \\ &= \frac{4}{4} \\ &= 1 \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{CR4} &= \frac{2M}{N4 + N5} \\ &= \frac{2.2}{2 + 2} \\ &= \frac{4}{4} \\ &= 1 \end{aligned}$
CR Coder 5	
$\begin{aligned} \text{CR5} &= \frac{2M}{N5 + N6} \\ &= \frac{2.2}{2 + 0} \\ &= \frac{4}{2} \\ &= 2 \end{aligned}$	

Sumber: Data Primer

Lampiran 7: Berita Bulletin Silit Arena

1. Indikasi Plagiat Dalam OPAK (Edisi Jum'at, 26 September 2014)

SILIT ARENA | JUM'AT, 26 SEPTEMBER 2014

UNIVERSITARIA

Indikasi Plagiat dalam OPAK

OPAK yang seharusnya menjadi gerbang terdepan dalam pengenalan dunia kampus terindikasi aksi plagiat oleh pelaksananya sendiri.

Oleh Faksi Fahlevi

S elasa (19/08) panitia OPAK mengadakan *Technical Meeting*. Panitia memberikan buku panduan OPAK 2014 ke seluruh mahasiswa. "Mendadak buku panduan diambil lagi mas," tutur Nurul, maba Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya. Panitia menarik lagi buku panduan itu tanpa alasan. Malangnya, jejaring media sosial dihebohkan oleh buku panduan OPAK halaman 4 dalam kata pengantar penyusun, di dalamnya tertulis "Buku panduan *Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK)* tahun 2014 ini disusun dengan tujuan untuk memudahkan kawan-kawan baru STAIN Purwokerto..." lanjut paragraf ketiga ucapan terimakasih yang ditujukan langsung kepada ketua STAIN Purwokerto. Sebagaimana dilansir dalam akun Facebook Lpm Rhetor Fakultas Dakwah dan Komunikasi. (lihat <https://www.facebook.com/PersMaRhetor?fref=ts>)

Pada hari ketiga OPAK, *ARENA* menemui ketua panitia, Syaqui Abdul Jalil di ruangan DEMA Fakultas, gedung *Student Center (SC)*. Syaqui menjelaskan buku panduan OPAK 2014 di halaman 4 itu bukan kesalahan panitia, karena sebelumnya panitia tidak mencantumkan pengantar penyusun dalam buku panduan OPAK. "Ketika panitia serahkan ke pihak rektorat bidang kemahasiswaan kata pengantar penyusun sebenarnya tidak ada," tegas Syaqui. Ia juga memperjelas panitia hanya menyusun dan setelah itu diserahkan ke bidang kemahasiswaan rektorat. "Panitia hanya menerimanya dan mendistribusikan ke peserta OPAK," tambahnya.

Maksudin, Wakil Rektor (Warek) III UIN Sunan Kalijaga, mengungkapkan bahwa pihak kemahasiswaan tidak tahu-menahu terkait persoalan buku panduan OPAK. "Pihak kemahasiswaan tidak sama sekali merubah atau menambah buku panduan OPAK," tegasnya saat diwawancarai di tengah kesibukannya.

Maksudin juga telah memanggil ketua panitia OPAK, sekretaris dan bendahara. "Selanjutnya saya bertanya, kenapa buku panduan itu ada kesalahan fatal?" Pihak panitia menjawab, kesalahan modul OPAK ada di pihak perancangan CV Grafika, pada waktu itu pembuatan karya berbarengan dengan modul OPAK STAIN Purwokerto.

Sebab itu, Maksudin menginstruksikan pihak panitia OPAK untuk mencari kesalahan tersebut. Pada hari kedua buku panduan itu dikembalikan lagi ke peserta OPAK tanpa pengantar penyusun.

Menurut panitia OPAK, kesalahan ada dipihak perancangan. Fakta berbeda ditemukan *ARENA* saat mengkonfirmasi Lutfi Muamar, ketua panitia OPAK STAIN Purwokerto lewat telepon. Lutfi mengaku mencetak di Yogyakarta, tetapi bukan di CV Grafika, melainkan di perancangan Creative City.

A. Rahman, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, berpendapat bahwa kejadian itu bukan kesalahan teknis dari pihak perancangan tapi plagiat. Rahman beranggapan letak



Tertulis pada header modul OPAK UIN Sunan Kalijaga | 21-24 Agustus 2014, sedangkan pada isi tertulis "Buku panduan OPAK disusun untuk memudahkan kawan-kawan mahasiswa STAIN Purwokerto"

www.lpmarena.com 7



Mahasiswa baru mengikuti apel OPAK di depan Panggung Demokrasi

tulisan header beratasnamakan "UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 21-23 Agustus 2014" serta bertempat di "Yogyakarta, 7 Agustus 2014" bukan Purwokerto. "Ini murni plagiat bukan kesalahan perancangan," ungkap Rahman. Di lain pihak, ketua panitia OPAK tidak tahu-menahu ketika ditanya terkait tulisan header, tanggal dan tempat penyusun. "Jika masalah itu aku kurang tahu," ungkap Syaqui.

Dari pihak panitia sejauh ini masih belum mengajukan pertanggungjawaban atas kesalahan perancangan yang di tujukan kepada pihak STAIN Purwokerto. Menurut Rahman, walaupun yang bertanggung jawab adalah pihak perancangan, tetapi hal ini merusak nama baik kampus jika tidak ada permohonan maaf secara terbuka.

"Apalagi modul yang ada di STAIN Purwokerto punya hak paten (ISBN), hal itu bisa dipidanakan," imbuh Rahman.

Robby H. Abror, dosen UIN Sunan Kalijaga berpendapat bahwa plagiarisme merupakan salah satu tindakan amoral yang menurunkan kredibilitas kampus. "Bahkan ini disebut dengan pencurian," tutur Robby.

Robby mengusulkan agar panitia OPAK segera minta maaf sebagai pertanggungjawaban publik. "Sehingga kasus ini tidak meluas lebih jauh. Permohonan maaf juga harus dilakukan dengan syarat, dan teknis yang telah ditentukan, semisal disaksikan banyak orang serta mengadakan konferensi pers di beberapa media baik lokal maupun nasional." Menurutnya, jika panitia tidak melakukan hal itu akan merusak nama baik kampus UIN Sunan Kalijaga.

Kegiatan OPAK berjalan kondusif

Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun 2014 ini UIN Sunan Kalijaga melaksanakan *Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK)* yang berlangsung pada tanggal 21 - 23 Agustus. Agenda meliputi sosialisasi Unit kegiatan mahasiswa (UKM), profil UIN Sunan Kalijaga, keislaman dan keindonesian, serta pola pengembangan mahasiswa dan organisasi mahasiswa (ormawa), sebagaimana tertulis di Panduan OPAK 2014 berjalan kondusif.

Hari pertama, sosialisasi Unit kegiatan mahasiswa (UKM) terbagi dalam dua tempat, *Indoor dan Outdoor*. Sosialisasi *Indoor* diadakan di gedung *Multi Purpose (MP)*, diantaranya: PSM Gita Savana, Pramuka, OG al-Jamiah, LPM Arena, Koperasi Mahasiswa, JQH al-Mizan, Olahraga, Kordiska, Teater Eska, Studi Pengembangan Bahasa Asing, KSR PMI, dan Jamaah Cinema Mahasiswa.

Adapun Resimen Mahasiswa, Cepedi, Inka, Tae Kwon Do, dan Mapalaska, diselenggarakan di area Panggung Demokrasi.

Sosialisasi UKM berjalan lancar, kekhawatiran provokasi seperti tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi. "Itu semua berkat kekompakan teman-teman UKM yang sangat solid," kata Puji Iestari, ketua sosialisasi UKM 2014.

OPAK kali ini bertema "Reafirmasi karakter kebangsaan; upaya mengujudkan mahasiswa yang berkesadaran sosial" harapannya maba mempunyai jiwa yang berkesadaran penuh terhadap realitas sosial yang ada di sekitarnya. "Mahasiswa bisa berinteraksi langsung dengan para gepeng (gelandangan pengemis), tukang becak dan pedagang kecil yang ada di sekitar kita," ungkap Syaqui.

Syaqui menuturkan bahwa tema kali ini berawal dari pembacaan dalam rangka memberikan suntikan baru di situasi yang baru agar supaya mahasiswa tidak apatis pada kondisi sosial masyarakat yang ada. Ia berkeyakinan kepada beberapa tokoh yang mengatakan "menjadi mahasiswa akan menciptakan kelas-kelas baru" maka hal itu yang menjadi pertimbangan.

Persiapan OPAK kali ini memang cukup terkendala karena terbentuk libur panjang, sehingga banyak panitia yang masih berada di kampung halamannya. "Hingga kegiatan ini bersifat maraton," tutur Syaqui. Tapi baginya, persiapan sudah cukup matang. "Alhamdulillah berjalan lancar," ucapnya. []

8

2. DPM Untuk Siapa? (Edisi Jum'at, 26 September 2014)

SLIT ARENA | JUM'AT, 26 SEPTEMBER 2014

UNIVERSITARIA

DPM untuk Siapa?

Kesimpangsiuran kabar dan kerumitan dalam memperbaharui DPM membuat mahasiswa lama mempertanyakan urgensi dari DPM itu sendiri.

Oleh Mutiara Nur Said

Di penghujung libur panjang pergantian tahun ajaran 2014, mahasiswa semester III ke atas dihebohkan dengan isu wajib untuk memperbaharui Data Pribadi Mahasiswa (PDM). Kala itu, aktivitas kampus belum sepenuhnya berjalan. Banyak mahasiswa yang masih menikmati sisa-sisa liburan di kampung halamannya.

Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) melansir kewajiban pengisian DPM melalui Sistem Informasi Akademik (SIA) UIN Sunan Kalijaga pertama kali pada tanggal 7 Agustus 2014.

Pengumuman berisi keterangan wajib memperbaharui data pribadi dengan batas akhir pengisian pada tanggal 15 Agustus 2014. Sesaat setelah mahasiswa menerima kabar tersebut, muncullah pelbagai isu yang tidak sesuai dengan apa yang dituliskan pihak PTIPD.

Kebingungan mahasiswa dapat dilihat dari isu-isu yang tersebar di beberapa situs jejaring sosial media seperti Facebook dan Twitter. Beberapa mahasiswa yang bingung dengan kebijakan baru ini, tentu hanya bisa mengeluh lewat jejaring sosial media menunggu tanggapan kawan pengguna lainnya. Hal ini terjadi karena posisi mereka yang sebagian besar masih berada di kampung halaman masing-masing.

Isu ngalor-ngidul di media sosial seperti itu pula yang juga dikeluhkan Nuwairrotul layaliyah mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga asal Lamongan. "Denger-denger isu dari temen-temen di FB, katanya kalau tidak ngisi DPM maka tidak bisa isi KRS dan SPP dinaikkan," tutur

Nuwairrotul.

Si Kebijakan Baru Bernama DPM

Kebijakan untuk memperbaharui DPM melalui SIA memang baru di terapkan pada tahun ajaran 2014 ini. Perbaruan data pribadi ini mewajibkan mahasiswa mengunggah sejumlah berkas berupa surat-surat keterangan. (*lpmarena.com*, 14/08)

Meski terkesan rumit, pihak PTIPD menjelaskan banyak kepentingan yang diperoleh dalam pengisian data tersebut. Hal ini dijelaskan oleh kepala PTIPD UIN Sunan Kalijaga, Agung Fatwanto. Ia menjelaskan bahwa DPM ini diperlukan untuk kebutuhan institusi maupun mahasiswa itu sendiri. "Intinya itu gini, institusi ini memerlukan data yang berhubungan dengan mahasiswa, yang *up to date*, dan banyak keuntungannya," terang Agung.

Agung menambahkan, dalam pegisian DPM ini ada beberapa kepentingan. "Ada beberapa kepentingan dalam pengisian DPM. Pertama, untuk menyusun pengambilan kebijakan kampus. Kedua, kita itu selaku institusi pendidikan perguruan tinggi *kan* wajib *men-suply* data ke pemerintah pusat melalui PDPT (Pusat Data Perguruan Tinggi), nanti bisa buka *web-nya* dengan alamat *Forlap.dikti.co.id*. Ketiga, untuk keperluan institusi ini sendiri seperti keperluan dosen," tutur Agung.

Di pihak yang sama, Khoiro Ummatin, Kepala Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) yang menyebut DPM sebagai bagian dari sistem kebijakan, menambahkan

hal serupa terkait urgensi pengisian DPM. "Hal ini juga untuk keperluan mahasiswa, seperti penentuan perolehan beasiswa," katanya.

Lebih lanjut Khoiro Ummatin menjelaskan bahwa pengisian DPM ini awalnya hanya diperuntukkan bagi mahasiswa angkatan 2014 saja, untuk penentuan *degree* Uang Kuliah Tunggal (UKT). Akan tetapi karena UIN memakai sistem tunggal, maka kebijakan pun tidak bisa dipisahkan. Sehingga sistemnya memberlakukan hal yang sama pada semua mahasiswa. Sistem tidak membedakan antara mahasiswa baru dan lama.

Meski pihak PTIPD telah mengunggah kabar terkait pengumuman pengisian DPM secara resmi di SIA UIN Sunan Kalijaga, nyatanya isu yang beredar di kalangan mahasiswa sangat beragam. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi terkait kebijakan baru ini kepada mahasiswa. Namun, secara tegas Agung membantah dan meluruskan isu-isu tersebut dengan menyatakan bahwa isu tersebut tidak benar dan lebih baik langsung melihat pengumuman resmi yang dikeluarkan pihak PTIPD melalui SIA. Saat ditanya adakah keterkaitan antara KRS dengan perbaruan DPM ia menjawab, "tidak ada *kan* dipengumuman *website* sudah *dijelaskan*. Dan tidak ada pemberitahuan tidak bisa mengisi KRS atau tidak bisa kuliah. Tidak ada *to*?" jelas Agung.

Tenggat waktu yang mepet sedangkan data yang diisi sangat banyak dan ketidaktahuan mahasiswa akan urgensi pengisian

www.lpmarena.com

9

UNIVERSITARIA

SLIT ARENA | JUM'AT, 26 SEPTEMBER 2014

DPM akibat kurangnya sosialisasi, menyebabkan banyak mahasiswa belum sempat menyelesaikan atau malah belum sama sekali memperbaharui DPM.

Kondisi tersebut membuat Sekar Ayu Aryani selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mengumumkan kebijakan lanjutan terkait perpanjangan waktu pengisian DPM. Pengumuman lanjutan yang dikeluarkan pada Jum'at (15/08) ini tidak hanya memberi perpanjangan waktu pengisian DPM yang semula tanggal 15 Agustus 2014 menjadi tanggal 30 September 2014 saja, melainkan juga dibarengi dengan kebijakan tambahan.

Kebijakan tambahan dalam pengisian DPM tersebut mengatakan bahwa mahasiswa yang tidak memperbaharui DPM terkena sanksi tidak dapat melihat nilai atau indeks prestasinya pada semester berjalan. Hal tersebut yang kemudian mendorong banyak mahasiswa, termasuk salah satunya Amin Sahri, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga asal Cilacap, untuk segera mengunggah dan melengkapi data pribadinya. Meskipun itu berarti dia harus kembali ke kota tempat tinggalnya, untuk mengambil beberapa surat yang diperlukan. "Ya, berarti saya nanti harus pulang lagi ke rumah buat mengurus surat-surat yang kurang lengkap," kata Amin.

Elek yang timbul di tataran bawah

Selain Amin, banyak pula mahasiswa lain yang beranggapan bahwa pengisian DPM ini rumit dan *njlmet*. Seperti yang diungkapkan Ifa, mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. "Banyak banget *ngisinya*. Ada *scan* surat penghasilan orang tua, *scan* Kartu Keluarga (KK) yang harus di *upload* dan masih banyak lagi," keluh Ifa.

Kerumitan pengisian DPM ini tidak sampai disitu saja. Banyak diantara mahasiswa yang sama sekali tidak paham mengenai DPM, hingga bertanya langsung pada kepala jurusan. Seperti yang diakui Khoiro Ummatin, "ya, ada juga yang tanya ke Ibu mengenai DPM. Tapi *ya* tidak semuanya," tuturnya.

Di lain pihak, mahasiswa semester

atas pun mengalami kebingungan untuk mengisi data tersebut. "Sebenarnya perlu *gak sih*? Aku *kan udah* mau wisuda?" papar Risma, mahasiswa jurusan Psikologi UIN Sunan Kalijaga yang sudah terdaftar wisuda.

Ada pula beberapa mahasiswa yang iseng mengunggah berkas yang tidak sesuai ketentuan, seperti mengunggah foto artis di kolom *scan* surat pernyataan tidak berlangganan PDAM. Karena menurut mereka DPM hanya sebuah formalitas, dan setiap file berformat PDF atau Joint Photographic Experts Group (JPEG) bisa diunggah.

Menanggapi efek yang timbul di kalangan mahasiswa, Agung kembali angkat bicara. Ia menyatakan kedepannya akan menindaklanjuti hal pengisian asal-asalan yang dilakukan beberapa mahasiswa. "Ya, nanti *pelan-pelan* kita *cleansing* data yang masuk, mana yang tidak sesuai kita tidak *lanjut*. Tapi *pelan-pelan*, tidak sekarang. Dan yang kedua, *kan* waktu pengisian sudah diperpanjang satu bulan *to*, jadi masih ada banyak waktu untuk melengkapi data," kata Agung.

Menurut Agung, pengisian DPM begitu rumit dan harus memperbaharui banyak data karena memang semua data tersebut diperlukan. "Banyak komponen data yang disesuaikan dengan kebutuhannya yang bervariasi. Jadi tidak semua data untuk disetorkan ke pemerintah pusat. Banyak data yang memang diperlukan untuk kebutuhan universitas. Dan pihak universitas menjadikan satu tempat dengan tujuan agar mahasiswa tidak berulang mengisi data. Tetapi cukup sekali, dan sekaligus dalam satu waktu," jelas Agung.

Saat ARENA menanyakan perihal kebijakan tambahan, Agung menjelaskan terkait kebijakan yang menerangkan bahwa mahasiswa yang tidak memperbaharui DPM akan terkena sanksi tidak dapat melihat nilai IP pada semester berjalan bukan merupakan kewenangannya. "Itu *kan* bukan kita yang membuat, PTIPD itu hanya sebagai instansi pelaksana kebijakan saja. Sementara pembuat kebijakan atau disebut *law maker-nya* bukan kami," ungkap Agung.[]

10

ARENA

3. Kesiapan Kampus Menyambut Maba Difabel (Edisi Jum'at, 26 September 2014)

Kesiapan Kampus Menyambut Maba Difabel



Toilet difabel di fakultas sosial dan Humaniora yang baru saja dibangun sampai awal mula perkuliahan belum bisa difungsikan

Sebagai kampus inklusi, UIN Sunan Kalijaga dituntut untuk menyediakan segala fasilitas yang menunjang proses perkuliahan bagi mahasiswa difabel.

Oleh Ekmil Lana Dina

Untuk menunjang pelayanan pada mahasiswa difabel, UIN Sunan Kalijaga memberi mandat pada Pusat Layanan Difabel (PLD). PLD yang sebelumnya merupakan lembaga kajian non-struktural bernama Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD), telah bermetamorfosis menjadi lembaga layanan struktural di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). PLD telah menyediakan berbagai layanan untuk difabel dengan tiga jenis disabilitas: tunanetra, tunarungtu, dan tunadaksa.

Tahun 2014 ini, terdapat 10 mahasiswa baru (maba) difabel yang akan menempuh jalur pendidikan S1 di UIN Sunan Kalijaga. 10 maba difabel tersebut terbagi ke Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK), Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK), dan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (Fishum). Tercatat pada tahun 2014 terdapat 8 maba difabel tunanetra, 1 maba difabel tunarungtu, dan 1 maba difabel tunadaksa.

Kesiapan yang dilakukan oleh PLD dimulai dari penerimaan mahasiswa baru. Mulai dari pengarah dalam pemilihan jurusan dan registrasi online untuk calon mahasiswa difabel, sampai mendampingi ketika ujian masuk, baik dari jalur SNMPTN Undangan, SBMPTN, jalur regular, ataupun jalur

non-regular.

Khusus untuk calon mahasiswa tunarungtu dan tunanetra diberikan kelonggaran waktu 30 menit dalam proses ujian masuk dari berbagai jalur. Bagi calon mahasiswa tunanetra yang mendaftar melalui jalur non-regular, PLD menyediakan tenaga pendamping untuk membacakan soal. Sedangkan untuk jalur regular, pihak PLD telah menyiapkan soal dalam bentuk braille (sistem tulisan dan cetakan khusus tunanetra). Dalam menyiapkan soal tulisan braille, PLD bekerjasama dengan kantor Admisi UIN Sunan Kalijaga.

Tahun 2014 ini, penerimaan mahasiswa difabel lebih diperketat lagi. Setelah tes tertulis, maba difabel mengikuti *assessment* terlebih dahulu, rekomendasi jurusan, kemudian juga ada dasar syarat minimal untuk masuk guna menjamin kesuksesan akademik dari calon mahasiswa difabel tersebut. "Ada dasar syarat minimal untuk masuk guna menjamin kesuksesan akademik mereka sendiri, salah satunya mampu membaca huruf braille, karena dari pihak UIN sendiri tidak mengajarkan dasar tersebut," terang Arif Maftuhin selaku ketua PLD.

Setelah maba difabel melewati proses *assessment* dan dinyatakan diterima, mereka juga mengikuti Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) sebagaimana maba lainnya. Pihak PLD telah menjadwalkan relawan-relawan untuk mendampingi maba difabel selagi proses OPAK berlangsung. "Tahun 2014 ini memang pelayanan yang diberikan lebih baik, dulu waktu saya OPAK tahun 2010 belum ada relawan khusus yang menemani saya OPAK," tutur Wuri, mahasiswa difabel Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) semester

IX.

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Maftuhin yang telah menjadwalkan relawan untuk mendampingi maba difabel. "Meskipun memang terdapat relawan yang mendampingi, namun itu bukan berarti terlalu memanjakan difabel, kami (PLD) memberikan fasilitas yang dapat menunjang proses pembelajaran mereka, untuk pekerjaan yang sekiranya masih dapat mereka lakukan sendiri, sebaiknya memang dilakukannya sendiri," terang Maftuhin.

Persiapan khusus PLD untuk tahun 2014 yaitu dengan membuat toilet khusus difabel di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. "Pembuatan toilet ini akan selesai digarap waktu awal mula masuk perkuliahan tanggal 1 September 2014, sehingga sudah dapat digunakan oleh Lintang Kirana, maba difabel tunadaksa di fakultas tersebut," jelas Maftuhin.

Berbagai cara dilakukan PLD dalam menggaet mahasiswa yang mau menjadi relawan. Dari penyebaran brosur, penempelan pamflet, sampai melalui mulut ke mulut. "Dulu saya mengetahui jika bisa menjadi relawan, ketika saya secara tidak sengaja melihat difabel yang sedang melakukan ICT dengan dibantu oleh seseorang dan di situ lah pengajar ICT menjelaskan kepada kami bahwa kami juga dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada difabel, kami juga dapat menjadi relawan," ungkap Corry Ivada, relawan dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) semester III. PLD juga memberikan pelatihan bahasa isyarat untuk para relawan guna meningkatkan kapasitas pelayanan PLD. Maftuhin menegaskan bahwa UIN Sunan Kalijaga adalah kampus inklusi, di mana kampus itu harus melakukan kesuksesan akademik secara bersama-sama, tanggung

jawab tetap merupakan kewajiban semua orang terhadap layanan yang telah disediakan. "Apalagi semenjak Rektor UIN Sunan Kalijaga mendapatkan prestasi dari Kemendikbud, *Inclusive Education Award 2013*, kita harus bersama-sama mempertahankan UIN sebagai kampus inklusi," jelas Maftuhin.

Usaha-usaha PLD dalam membantu difabel saat proses perkuliahan mulai dari *Note-taking* (asistensi pencatatan kuliah) untuk mahasiswa tunarungtu, *reading texts* (membacakan bahan-bahan kuliah) untuk mahasiswa tunanetra, konsultasi akademik terkait dengan hambatan-hambatan dalam kuliah maupun penulisan skripsi, sampai pendampingan saat ujian *placement-test* di Pusat Bahasa dan Budaya, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.

Beberapa kendala masih ditemui mahasiswa difabel saat proses perkuliahan. "Mungkin karena masih maba, saya belum terlalu terbiasa ketika dosen sedang menerangkan sesuatu dengan cepat. Sehingga saya kesulitan untuk mengikutinya, kecuali jika dosen menjelaskan dengan pelan, saya dapat memahaminya dengan membaca gerak bibirnya," kata Dhomas Erika Ratnasari, mahasiswa difabel jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS) semester I.

Nada sedikit berbeda terlonkar dari Prima Agus Setiawan, maba difabel Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) ini mengatakan, "tidak ada kesulitan yang berarti ketika menjalani kuliah kecuali dengan lingkungan dan jalan kampus yang terkadang membuat khawatir karena lalu-lalang motor yang laju" terangnya. Menurutnya, kenyamanan mahasiswa difabel dapat diperoleh jika semua mahasiswa turut menjaga ketertiban bersama. []

4. Kuliah Lima Tahun, Membunuh Kreatifitas (Edisi Selasa, 25 November 2014)

UNIVERSITARIA | SLALIT ARENA | SELASA, 25 NOVEMBER 2014

Kuliah Lima Tahun, Membunuh Kreatifitas

Pembatasan kuliah lima tahun telah diatur dalam Permendikbud, permen ini dianggap mengekang kebebasan mahasiswa dan sarat menelurkan sarjana prematur

Oleh Isma Swastiningrum

Keluarnya Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sedikit banyak meresahkan sejumlah kalangan, mengingat peraturan menteri (permen) itu turut membatasi masa kuliah mahasiswa Strata I (SI) maksimal hanya lima tahun.

Pembatasan masa kuliah dalam permen itu terdapat pada pasal 17 ayat 3 poin D, yang menerangkan bahwa masa pendidikan mahasiswa untuk program diploma dan sarjana dibatasi dari empat sampai lima tahun masa studi.

Meski permen yang membatasi masa pendidikan mahasiswa strata satu itu telah keluar, tetapi permen itu belum diterapkan, dan kemungkinan bakal diterapkan tahun 2016 mendatang.

“Yang jelas, semua perguruan tinggi masih memahami dan mempelajarinya. Tahun ini masih tetap (seperti tahun kemarin), belum ada perubahan,” kata Sekar Ayu Aryani, Wakil Rektor III bidang akademik dan kemahasiswaan UIN Suka.

Peraturan yang baru muncul itu banyak mendapat penolakan dari sejumlah kalangan, Hilful Fuhdul misalnya, ia berpendapat kebijakan kuliah lima tahun membatasi ruang gerak mahasiswa.

“Terkait lima tahun kuliah, saya kira pertama itu menutup ruang kebebasan mahasiswa. Kedua, kebijakan seperti ini berbau-bau mematikan gerakan mahasiswa. Setahu saya pendidikan itu membebaskan, bukan membutakan orang,” ujar Hilful yang juga tercatat sebagai ketua Rayon Pondok Syahadat Komisariat Fakultas Dakwah PMII.

Tak jauh berbeda dengan Hilful, Habiburrahman salah satu anggota Teater Eska berujar bahwa pembatasan kuliah itu tak seharusnya diterapkan, “kalau ditarik efeknya dari kualitas, itu sangat dilematis sekali. Masak kuliah seolah-olah seperti kursus, *cepat* banget. Upaya untuk *trial and error* lebih dibuka, tidak disempitkan dalam ruang kelas *aja*,” pungkasnya.

Lebih jauh Habib bertutur bahwa kondisi mahasiswa di UIN Suka akhir-akhir ini mulai kehilangan semangat kritisnya. Padahal masih ada benih-benih mahasiswa yang ingin lebih membangun kembali semangat intelektualnya, bukan semata sekedar menjadi pelayan kekuasaan.

“Sekarang *kan* jadi ini, arah pendidikan kita orientasinya menjadi pelayan. Kalau kata Gramsci kita bukan lagi intelektual organik tapi malah jadi pelayan kekuasaan,” ujar mahasiswa yang juga duduk di jurusan Filsafat Agama semester III ini.

Namun, ada juga sejumlah kalangan yang menyetujui peraturan yang baru menjadi wacana itu, tetapi tentunya dengan beberapa catatan



6

UNIVERSITARIA | SLALIT ARENA | SELASA, 25 NOVEMBER 2014

yang menyertainya. “Kalau aku membacanya, pemerintah itu melakukan efisiensi. Cuma untuk melakukan efisiensi ke sana, tetap harus diimbangi dengan *output*-nya. Prosenya harus lebih bermutu,” jelas Cecep Jaenudin, koordinator Komisariat Bidang Internal HMI MPO UIN Suka.

Lebih jauh Cecep menambahkan bahwa lulusan yang keluar nantinya juga harus diimbangi dengan ketersediaanya lapangan kerja. “Ketika lulus kuliah, mereka mau masuk ke mana? Harusnya penertiban jadi lima tahun ini lapangan kerja harus siap menerima mereka. Jika lapangan kerja masih minim, angkatan kerja yang semakin banyak. Itu akan menjadi kesenjangan sosial,” tutur Cecep yang juga duduk di jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester tujuh ini.

Pandangan Cecep turut diamini Hilful, menurutnya memang tidak ada jaminan semua lulusan UIN Suka (bahkan lulusan mahasiswa kampus se-Indonesia) akan mendapat pekerjaan semua, dan mampu menjadi alternatif dan solusi setidaknya untuk kampungnya masing-masing.

Membatasi

Dalam perapat Arab ada istilah *thulul zamani* (menuntut ilmu itu panjang), istilah ini tertera dalam kitab *Al Mu'allim*. Namun, pemerintah malah berupaya membatasi masa kuliah yang ada.

“Kuliah di pesantren saja minimal delapan tahun hingga sembilan tahun. Malah ada yang 12 tahun tidak dianggap santri. Masak kampus kalah sama pesantren?” Sindir M. Toyu Aradana, mahasiswa jurusan Sosiologi Semester V.

Tolak ukur mahasiswa guna mendapat gelar sarjana juga mulai dipertanyakan, apakah mahasiswa cukup mampu menerima seluruh transformasi pengetahuan dengan waktu studi yang amat singkat?

“Saya *su'udzon*-nya, di kampus UIN ini jangan-jangan seluruh mahasiswa UIN yang diwisuda, sarat dia lulus bukan karena semua materi yang diambil selama ini sudah dia pahami. Tapi administrasi yang sudah disyaratkan oleh UIN itu sudah dipenuhi,” kata Hilful mengkritisi.

Menanggapi berbagai penolakan ini, Sekar berpendapat bahwa seharusnya mahasiswa tidak egois, dan memberi kesempatan kepada siswa-siswa di luar yang belum dapat masuk di perguruan tinggi.

“Emangnya punya dia perguruan tinggi itu? Apalagi negeri (PTN) dibiyai pemerintah, uangnya dari rakyat,” tegas Sekar.

Berdasarkan data yang dikutip dari situs *e-sbmptn.com*, memang disebutkan bahwa jumlah pendaftar SBMPTN berjumlah 664.509 orang, tetapi yang diterima hanya 104.862 orang saja (hanya “15 persen” dari total pendaftar SBMPTN).

Tantangan

Wacana pembatasan ini tentu menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat kampus. Salah satu indikator sederhana untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan pemerintah adalah APK (Angka Partisipasi Kasar). APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan dengan jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Sebagai contoh, usia di atas 12 tahun masih SD, atau juga banyak mahasiswa berusia di atas 25 tahun tetapi belum lulus S1.

Dalam programnya, pemerintah berusaha meningkatkan nilai APK. Namun kenyataannya, usaha peningkatan APK tidak diimbangi dengan sarana prasarana yang memadai. “Pemerintah hanya bisa mensyaratkan peningkatan APK. Sementara sarana prasarana tidak ditingkatkan. *Ya*, sama *aja* bohong. Dosennya juga tidak ditambah,” tutur Sekar.

Sementara jika peraturan pembatasan masa kuliah itu benar-benar diterapkan, maka mahasiswa harus tak sekedar punya komitmen yang tepat terhadap waktu studinya, sekaligus bagaimana ia memanfaatkan waktunya sebagai ruang kreasi. Bagaimana mahasiswa mengembangkan keadaan dan memajukan dirinya.

“Memaknai itu (pembatasan kuliah lima tahun) sebagai ruang terbatas yang semakin asyik. Mahasiswa menciptakan suasana proses dalam proses,” kata Toyu.[]

www.lpmarena.com 7

5. Pilrek Itu Tersandra Statuta (Edisi Selasa, 25 November 2014)

UNIVERSITARIA | SELILIT ARENA | SELASA, 25 NOVEMBER 2014

Pilrek Itu Tersandra Statuta

Pilrek UIN Sunan Kalijaga yang terlaksana 9 Oktober lalu mundur dari jadwal semula, kemunduran ini terindikasi karena statuta baru yang tak kunjung rampung.

Oleh Anisatul Ummah

Pemilihan Rektor (Pilrek) menjadi agenda empat tahunan UIN Sunan Kalijaga (UIN Suka). Pilrek kali ini digelar 9 Oktober lalu, dengan empat calon rektor yakni Khoiruddin, Akh. Minhaji, Nizar, dan Machasin. Hari pemilihan itu jauh dari jadwal semula, mengingat jadwal awal Pilrek dilaksanakan pada 28 Agustus dan menurut rencana bakal diumumkan pada 1 September 2014.

Menurut Budi Ruhiatudin ketua panitia Pilrek, mundurnya Pilrek disebabkan karena adanya beberapa perubahan dalam statuta. Dalam statuta lama anggota senat diambil dari unsur jurusan, namun kini keterwakilan senat diambil dari unsur fakultas. "Pemilihan rektor ditunda sampai statuta UIN yang baru disahkan," ungkapnya.

Menurut Abd. Munir Mul Khan ketua senat universitas, statuta UIN dibuat oleh senat sebagai kampus yang otonom kemudian di sahkan oleh Kementerian Agama (Kemenag). "Setiap perguruan tinggi memiliki otoritas kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri. Pengaturan dirinya sendiri itu yang dinamakan statute," terangnya.

Dalam statuta UIN bagian ketiga senat universitas, pada pasal 33 disebutkan bahwa keanggotaan senat universitas terdiri dari guru besar setiap fakultas, guru besar yang sedang mendapatkan tugas jabatan struktural maupun non-struktural, wakil dosen bukan guru besar dari setiap fakultas, dan rektor, wakil rektor, dan direktur pascasarjana sebagai anggota *ex-officio*.

Lalu rincian dari keanggotaan senat dari unsur dosen yakni setiap

36 dosen diwakili satu senat, apabila jumlah dosen 37 orang maka fakultas diwakili dua senat begitu kelipatan selanjutnya. Namun keterwakilan senat dari unsure dosen tiap fakultas dibatasi maksimal hanya lima wakil senat.

Seleksi anggota senat menurut Abd. Munir Mul Khan dilakukan di fakultas. Sehingga anggota senat sudah ditentukan dari fakultas dan hanya tinggal pengesahannya. "Senat kemudian diajukan ke rektor untuk di-sah-kan saja, lalu terbentuklah senat universitas," ungkap Munir.

Sedangkan di bagian fakultas sendiri tata cara pemilihan senat sebelum di ajukan ke universitas adalah mula-mula dekan mengadakan rapat dosen fakultas untuk memilih wakil dosen sebagai anggota senat. Kemudian dekan mengusulkan nama-nama yang memenuhi syarat lalu setiap dosen fakultas memilih satu orang dari nama-nama calon yang diajukan. Dan pada akhirnya wakil dosen yang mendapat suara tertinggi diajukan oleh dekan ke rektor untuk menjadi anggota senat.

"Anggota senat semuanya 58 yang hadir 52 yang izin 6. Jadi tidak ada suara abstain," tutur Budi,



UNIVERSITARIA | SELILIT ARENA | SELASA, 25 NOVEMBER 2014

Pemilihan itu bahwa Khorudin mendapatkan 2 (dua) suara, Akh. Minhaji 29 suara, Nizar 21 suara, dan Machasin 0 suara.

saat menerangkan jumlah anggota senat yang hadir dalam pemilihan 9 Oktober lalu. Dalam hal ini Maizer Said Nahdi selaku sekretaris senat menambahkan bahwa rapat senat kali ini hanya berlangsung dua kali, rapat pertama pada 1 Oktober 2014 di ruang Sidang Senat, gedung PAU lantai 2, membicarakan aturan dan tata cara pemilihan rektor dan rapat kedua ketika pemilihan rektor pada tanggal 9 Oktober 2014 di Hotel UIN Suka.

Setelah digelar pemilihan rektor pada tanggal 9 Oktober 2014 didapatkan hasil pemilihan itu bahwa Khorudin mendapatkan 2 (dua) suara, Akh. Minhaji 29 suara, Nizar 21 suara, dan Machasin 0 suara.

Setelah pemilihan itu, panitia seleksi menyertakan tiga besar nama calon rektor ke Kemenag untuk kemudian ditetapkan siapa yang terpilih menjadi rektor. Namun sewajarnya yang terpilih adalah calon rektor dengan suara terbanyak. Seperti yang dituturkan Budi, "Yang jelas pemilihan kemarin bukan pemilihan rektor, tapi pemilihan calon rektor," tuturnya. Paling tidak posisi Minhaji menjadi posisi nomor satu untuk menjadi Rektor UIN Sunan Kalijaga periode 2015-2019, yang melantik nanti menteri agama langsung dari Jakarta," jelasnya.

Mengenai siapa yang terpilih Munir Mul Khan menambahkan bahwa hal itu tergantung pihak Kemenag yang menentukan. "Pelantikan setelah pemilihan oleh senat diserahkan ke rektor untuk diteruskan ke Kemenag, setelah itu akan diajukan tiga calon (ke Kemenag) sesuai nomor urut lalu lazimnya yang ditetapkan yang suara terbanyak,

kecuali kalau ada hal-hal yang saya tidak tahu," tambah Munir.

Mengenai pelantikan calon rektor sendiri nantinya menunggu Surat Keputusan (SK) terlebih dahulu. "Habibnya jabatan (rektor periode 2010-2015) tanggal 6 Januari 2015, sangat mungkin SK-nya sebelum 6 Januari tetapi serah-terimanya itu pada 6 Januari sehingga tidak terjadi kekosongan," tutur Budi.

"Pelantikannya tergantung kapan SK penempatan Rektor turun. Kalau habibnya *kan* tanggal 6 Januari mestinya SK itu normalnya turun sebelum tanggal enam, sehingga paling lambat dilantik tanggal 6 Januari 2015," Munir menambahkan.

Akh. Minhaji sebagai calon rektor dengan suara tertinggi juga mengamini hal ini. "Pelantikannya paling lambat adalah tanggal 6 Januari 2015. Kemenag menerinya *kan* dilantik tanggal 20 Oktober 2014. Tergantung siapa menterinya, sekarang menteri ketika transisi tidak boleh mengambil kebijakan strategis," jelas Minhaji saat ditemui *ARENA*.

Setelah itu pelantikan Wakil Rektor (WR) akan mengikuti jabatan rektor. WR dalam statuta paragraf 7 tentang Pengangkatan Pejabat Antar Waktu disebutkan bahwa pengangkatan WR paling lambat dua bulan setelah pejabat sebelumnya berhalangan tetap. Mengenai mekanisme pemilihan WR nantinya akan dibentuk panitia pemilihan WR. WR dipilih Pansel "Panitiaanya di bentuk rektor baru. Pengangkatan WR oleh rektor terpilih paling lambat dua bulan setelahnya," pungkas Maizer.[]

www.lpmarena.com

6. PPG Memberatkan Sarjana Pendidikan (Edisi Selasa, 25 November 2014)

UNIVERSITARIA

SLALIT ARENA | SELASA, 25 NOVEMBER 2014



PPG, Memberatkan Sarjana Pendidikan

Lulusan SI sarjana pendidikan nantinya bakal berjuang ekstra untuk menjadi guru profesional, selain harus mengikuti PPG, mereka diharuskan bersaing dengan lulusan SI keilmuan murni.

Oleh Dedik Dwi Prihatmoko

Menjadi tenaga pendidik yang berkualitas tentu banyak kualifikasi yang harus di tempuh dan dijalankan. Mulai tahun 2007 pemerintah telah mencanangkan program peningkatan kualitas guru melalui sertifikasi profesi. Seperti termuat dalam Permendikbud No. 62 Tahun 2013 tentang sertifikasi guru dalam jabatan dalam penataan dan pemerataan guru, menyebutkan bahwa kualifikasi guru untuk mendapatkan sertifikasi dapat di peroleh melalui: 1) Penilaian Portofolio; 2) pemberian sertifikat pendidik secara langsung; 3) Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG); dan 4) Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Namun terkait permen diatas, diperkirakan mulai tahun 2015 pemberian sertifikasi akan dipangkas, hanya dikeluarkan melalui program PPG. "Untuk pemberian sertifikat melalui jalur PLPG di tahun ini rencananya akan berakhir sehingga jalur PPG-lah yang bisa memberikan sertifikat guru," ungkap Suno Sudarsono, kepala seksi (kasi) bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Paki) Kemendikbud Yogyakarta kepada **ARENA**.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) periode 2009-2014, M Nuh menjelaskan bahwa gelar "S. Pd." adalah gelar akademik bukan gelar profesi. Sehingga lulusan bergelar "S. Pd." baru bisa disebut guru setelah menyelesaikan program PPG, papar Nuh, dilansir dari laman Kemendikbud, Rabu (12/2/2014).

Terkait program Pendidikan Profesi Guru (PPG) di tahun 2015, Suno belum bisa memberi penjelasan lebih jauh terkait program PPG lantaran selama ini pihaknya belum pernah melakukan koordinasi dengan kementerian pusat.

"Masalah PPG saya sendiri belum pernah melakukan koordinasi dengan pusat sehingga belum bisa berkomentar banyak terkait hal ini, yang jelas untuk tahun 2014 program PLPG sudah berakhir, sehingga kemungkinan besar program PPG akan segera terealisasi," ungkapnya.

Menurut Permendikbud No. 87 Tahun 2013, tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan, menjelaskan bahwa program PPG guru pra-jabatan yang selanjutnya disebut program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan SI kependidikan dan SI/DIV non-kependidikan, yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai standar nasional

pendidikan sehingga nantinya dapat memperoleh sertifikat pendidikan profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Terkait peraturan menteri di atas, ketua program PPG UIN Suka, Sukiman, menjelaskan bahwa peserta PPG untuk jurusan non-kependidikan memang dapat menjadi guru dengan catatan harus menyelesaikan matrikulasi akademik terlebih dahulu.

Matrikulasi adalah sejumlah matakuliah yang wajib diikuti oleh peserta program PPG yang sudah dinyatakan lulus seleksi untuk memenuhi kompetensi akademik bidang studi atau kompetensi akademik kependidikan sebelum mengikuti program PPG.

"Ilmu murni (non-kependidikan) juga dapat menjadi guru, dengan catatan nantinya akan dilakukan *treatment* tersendiri, misal yang dari keguruan mereka porsiannya lebih banyak kepada peningkatan kompetensi keprofesionalannya, kemudian dari ilmu murni mereka akan diperkuat dalam kompetensi pedagogisnya (penguasaan pengajaran) sebelum ke tahap profesional diri," paparnya.

Terkait dengan keefektifan dan segala kegiatan yang ada di dalam program PPG, Sukiman menjelaskan, bahwa dengan program PPG nantinya kompetensi guru akan semakin ditingkatkan kualitasnya dengan diimbangi sebuah evaluasi.

"PPG memang perlu evaluasi, yang jelas mereka dididik selama satu tahun disitu dilatih berbagai keterampilan mengajar mulai dari strategi pembelajaran, evaluasi, PTK, dan lain-lain. Intinya mereka kita latih, kita *bekali* agar nantinya dapat menjadi guru profesional yang melekat dalam dirinya. dan akan jauh berbeda hasilnya antara lulusan PPG dengan lulusan program PLPG yang hanya ditempuh sepuluh hari tersebut," ungkapnya.

UNIVERSITARIA

SLALIT ARENA | SELASA, 25 NOVEMBER 2014

Pengekangan Pemerintah

Menurut peraturan pemerintah, menjadi guru profesional perlu menempuh pendidikan lanjutan. Sarjana SI pendidikan menurut pemerintah ternyata belum cukup mengantarkan mahasiswa menjadi guru profesional. Lulusan SI memang dapat menjadi guru namun belum dapat menjadi guru yang diakui pemerintah sebelum memiliki sertifikat profesi.

"Mengajar dalam arti apa, Kalau mengajar formal yang diakui pemerintah jelas tidak bisa, karena sekarang aturannya sesuai dengan UU guru dikatakan profesional di samping Strata I atau Diploma IV mereka harus mendapatkan sertifikat yang diperoleh lewat pendidikan profesi guru (PPG), tapi kalau mengajar dalam arti tidak formal ada masalah, hanya saja guru tersebut tidak bisa dikatakan guru profesional," terang Sukiman.

Dalam permen No. 87 Tahun 2013 pasal 7 (No. 1 dan 2), disebutkan bahwa sistem seleksi peserta PPG dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK), kemudian hasil seleksi dilaporkan kepada direktorat jendral pendidikan tinggi.

"Penyeleksian peserta PPG lumayan ketat dengan berdasar pada sistem kuota yang diberikan pemerintah artinya mempertimbangkan aspek suplai dan domain, permintaan pasar seperti apa sehingga tidak dibuka lebar karena ketika terbuka lebar kualitas kadang terkendala lantaran kontrolnya tidak bisa maksimal. Jadi PPG nantinya adalah sebuah program pendidikan profesi yang sifatnya tertutup, tertutup dalam arti dibatasi kuota oleh pemerintah," imbuh Sukiman.

Terkait kebijakan PPG yang direncanakan akan diterapkan tahun 2016 di kampus UIN Suka, berbagai tanggapan dan kritik santer datang dari mahasiswa.

Yosep Muhammad misalnya, alumni jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir memandang bahwa untuk menjadi pengajar sebenarnya bukan berpangkal dari strata pendidikannya.

"Kalau soal mengajar bukan persoalan cukup ngak cukupnya, ilmu itu akan selalu cukup karena semua itu kembali ke orangnya. Walaupun SI kalau otak-otak doktor kan bisa saja," serunya.

Meski demikian Yosep memandang bahwa program PPG ini perlu didukung selama program tersebut berguna untuk mencerdaskan bangsa. "Selagi program itu dapat mencerdaskan anak bangsa dan bangsanya program tersebut harus kita dukung terus begitupun halnya program PPG yang direncanakan akan dilaksanakan oleh UIN," tandasnya.

Menanggapi isu bakal diterapkannya PPG ini muncul banyak penolakan dikalangan mahasiswa SI pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh Muhammd Nurkholis, mahasiswa semester VII jurusan Pendidikan Agama Islam. Ia sangat menyayangkan program tersebut karena akan semakin menyulitkan lulusan sarjana pendidikan, selain karena masa studi yang bertambah (tentu dengan biaya yang bertambah pula), mereka juga harus bersaing dengan lulusan sarjana non-pendidikan.

Penolakan serupa juga datang dari Uswatun Hasanah, mahasiswa semester VII jurusan Pendidikan Agama Islam. "Saya beranggapan bahwa ilmu dari kependidikan yang saya peroleh selama empat tahun akan sia-sia karena harus bersaing dengan ilmu murni yang kita ketahui keilmuannya terfokus pada studi bidang keilmuan, berbeda dengan jurusan kependidikan yang harus menyelesaikan beberapa bidang keilmuan. Sehingga saya berasumsi lebih baik kita semua menempuh ilmu murni saja, setelah mendapatkan teorinya, nanti tinggal kita cari ijazah untuk pendidikannya," celetuknya dengan nada sedikit cemas.[]

7. Lagi-Lagi UKT Bermasalah (Edisi Selasa, 25 November 2014)

Lagi-lagi UKT ber-Masalah

Beberapa mahasiswa merasa penggolongan UKT belum sesuai kemampuannya, dan justru ada beberapa mahasiswa dari keluarga mampu malah mendapat biaya UKT rendah.

Oleh Imra'atus Saadah

Penggolongan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) tahun ini mengalami masalah. Menurut keterangan yang diperoleh ARENA dari Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U), ada 160 mahasiswa yang melapor ke SEMA-U tentang penggolongan UKT-nya yang tidak sesuai dengan kemampuan. 130 mahasiswa tersebut melapor setelah mereka melakukan registrasi. Sedangkan 30 mahasiswa yang lainnya melapor sebelum melakukan registrasi sehingga mereka dapat membayar biaya UKT sesuai dengan kemampuan mereka.

Beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya mahasiswa yang baru melapor setelah melakukan registrasi antara lain karena takut terjadi masalah jika mereka tidak langsung membayar, dan sebagian dari mereka tidak paham tentang sistem UKT, serta baru mengetahui bahwa uang yang dibayarkan tersebut bukanlah uang pangkal.

Seperti yang dituturkan Rika Istiqomah misalnya, mahasiswa jurusan Biologi semester satu ini mengaku tidak tahu-menahu perihal UKT. "Tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, kami saja tahu UKT dari hasil ngobrol dengan teman-teman," terang Rika. "Kami mengira bahwa uang sebesar itu hanyalah uang pangkalnya saja," tambah Nisa Ulmah Mudah yang juga tercatat sebagai mahasiswa jurusan Biologi semester satu.

Ketua Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) Sains dan Teknologi, Shohihul Anwarudin juga menambahkan bahwa memang kebanyakan mahasiswa baru menganggap biaya UKT tersebut

merupakan uang pangkal saja. "Karena tidak ada pemberitahuan di web, jadi banyak mahasiswa yang tidak tahu tentang UKT," jelasnya.

Namun, Nizar Ali, Wakil Rektor III ini mengatakan bahwa informasi tentang UKT sudah diberitahukan oleh pihak universitas. "Soal ada mahasiswa yang tidak tahu tentang UKT, saya rasa mahasiswa itu kurang komunikasi," ungkapnya.

Nisa adalah mahasiswa baru yang dikenai UKT golongan tiga sebesar 3,7 juta rupiah per semester. Padahal Nisa merupakan anak seorang kuli bangunan yang gajinya hanya delapan ratus ribu rupiah per bulan. "Padahal saya ngisi datanya itu hati-hati banget. Tapi kenapa kok saya malah dapat golongan tiga," protesnya.

Nisa pun menerangkan kronologi dia mulai dari saat mengisi data pribadi mahasiswa sampai dia divonis masuk golongan tiga. "Pada tanggal 25-5 Agustus adalah waktunya pengisian Data Pribadi Mahasiswa (DPM). Setelah mengisi data tersebut, pada tanggal 7 Agustus, saya membayar. Kemudian setelah tahu tentang UKT, saya protes ke PAU pada tanggal 11 Agustus karena penggolongan UKT saya tidak sesuai dengan kemampuan saya. Namun, tidak ada perubahan. Malah saya disuruh ke PTIPD dan di PTIPD pun juga tak ada kepastian. Akhirnya saya mengadu ke SEMA-F pada tanggal 14 Agustus," terangnya dengan bersemangat.

Penggolongan UKT pada dasarnya berdasarkan pada Upah

Minimum Regional (UMR) Sleman yaitu sebesar 1,127 juta rupiah, dan masing-masing jurusan besarnya berbeda-beda. Golongan satu; golongan biaya termurah, dikenakan jika pendapatan orang tua mahasiswa setara atau kurang dari UMR Sleman. Jika pendapatannya empat kali lipat UMR Sleman, maka digolongkan pada golongan dua. Sedangkan jika pendapatannya lebih dari empat kali lipat UMR Sleman, maka digolongkan pada golongan tiga.

Penggolongan UKT dimaksudkan untuk menetapkan biaya kuliah sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Namun pada kenyataannya saat ini masih ada beberapa mahasiswa yang tidak sesuai dengan kemampuannya.

Seperti halnya yang dialami oleh Muhammad Najib, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah ini mendapat UKT golongan dua (1,7 juta rupiah). "Gaji ayah saya sebesar 1,5 juta dan ibu sebesar enam ratus ribu. Tanggungan anak pun masih tujuh," terang mahasiswa semester satu ini.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab banyaknya mahasiswa yang menerima penggolongan UKT tidak sesuai dengan kemampuannya. Nizar Ali, pihak rektorat yang mengurus perihal UKT ini mengatakan bahwa semua itu terjadi mungkin karena kesalahan sistem. "Ada kolom penghasilan yang harus diisi dengan angka tapi malah diisi dengan huruf. Nah, sistem kan tidak bisa baca. Makanya langsung dikenakan golongan tiga." Prediksinya.

Tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, kami saja tahu UKT dari hasil ngobrol dengan teman-teman

Nizar juga memprediksi ketidaksesuaian golongan UKT itu karena mahasiswa kurang teliti dalam mengisi. "Mungkin mengisi lima ratus ribu tapi yang ditulis lima juta, ketambahan nol satu," terangnya.

Sedikit berbeda dengan Nizar, ketua Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD), Agung memprediksi bahwa ada dua kemungkinan yang menjadi penyebab terjadi ketidaktepatan penggolongan UKT, yaitu mahasiswa salah mengisi dan adanya replikasi pengisian.

"Ada tiga kolom penghasilan, yaitu ayah, ibu, dan wali. Kemungkinan mahasiswa yang sumber dananya diperoleh dari ayah saja, malah mengisi ketiga-tiganya. Nah, secara otomatis penghasilan tersebut akan dijumlahkan," jelasnya. Pemisahan kolom tersebut bertujuan untuk mengetahui sumber biaya mahasiswa berbeda. "Saya rasa penyebabnya lebih kepada replikasi pengisian," tambah Agung.

Ternyata ketidaksesuaian UKT ini tidak hanya menimpa mahasiswa yang berpenghasilan rendah, tetapi menimpa mahasiswa yang berpenghasilan tinggi pula. Seperti yang dialami oleh salah satu mahasiswa FUSPI yang tak mau disebutkan namanya. Mahasiswa ini mengisi penghasilan orang tuanya sekitar 5-6 juta dan dia mendapat UKT golongan dua (1,2 juta). "Saya rasa golongan yang saya terima itu setimpal dengan gaji orang tua saya karena anak yang ditanggung ada enam anak dan itu pun masih pada sekolah semua. Jadi butuh banyak

biaya," ujarnya.

Persoalan tentang tanggungan anak, Nizar mengatakan bahwa tanggungan anak tidak begitu mempengaruhi penggolongan UKT. "Penggolongan UKT sesuai dengan penghasilan yang ditulis di DPM. Kalau soal tanggungan saya kira jika penghasilannya 1 juta kemudian kedua anaknya kuliah di UIN itu sudah cukup mampu," paparnya.

Sufyan Bariki, anggota SEMA-U ini menyayangkan pendapat Nizar. Menurut Sufyan, tanggungan anak dalam keluarga itu perlu diperhatikan. "Kalau seumpama dengan penghasilan segitu, satu anaknya di UIN dan satu anaknya di UGM, itu bagaimana?" tanya Sufyan.

Sampai saat ini pihak rektorat masih memproses ketidaksesuaian penggolongan UKT. "Sudah banyak berkas yang terkumpul. Kemudian kita akan memberikan berkas itu kepada PTIPD. Hasilnya akan dapat dilihat waktu registrasi semester dua," jelas Nizar.

Pihak PTIPD pun masih menunggu intruksi dari pihak rektorat untuk mengubah penggolongan UKT. "Kami hanya mengelola. Kebijakan ada di pimpinan dan saat ini masih belum ada perintah dari pimpinan," tutur Agung.

Sedangkan pihak SEMA baik SEMA-U maupun SEMA-F juga akan terus mengadvokasi dan mendampingi mahasiswa yang penggolongan UKT-nya belum tepat. "Kami berharap sebelum UAS (Ujian Akhir Semester) sudah ada kepastian dari pihak rektorat maupun PTIPD," harap Romel Masykuri, ketua SEMA-U.[]

8. Mahasiswa Asing Minim Fasilitas (Edisi Senin, 15 Februari 2015)

SLALIT ARENA | SENIN, 15 FEBRUARI 2015

UNIVERSITARIA

Mahasiswa Asing Minim Fasilitas

Kesiapan UIN dalam menerima mahasiswa asing tidak dibarengi dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung perkuliahan, akibatnya banyak mahasiswa yang Drop Out (DO) atau kembali ke negara mereka masing-masing.

Oleh Khusni Hajar



UIN Sunan Kalijaga merupakan salah satu kampus yang mampu menyedot mahasiswa asing untuk kuliah di dalamnya. "Mahasiswa asing di UIN ada semenjak IAIN, saya tidak tahu kapan jelasnya," tutur Maksudin selaku Wakil Rektor III. Terhitung sejak tahun 2002, tercatat ada 175 mahasiswa asing asal Thailand dan Afghanistan yang kuliah di UIN Sunan Kalijaga.

Namun, sebagai kampus yang mengemborkan *world class university*, fasilitas yang disediakan oleh UIN kepada mahasiswa asing masih minim. Salah satunya adalah tidak adanya ruangan khusus untuk mahasiswa asing sebagai tempat untuk berkumpul.

Abdullah, mahasiswa jurusan Psikologi angkatan 2011 asal Thailand mengungkapkan rasa kekecewaan karena tidak ada tempat khusus yang disediakan bagi mahasiswa asing. "Kami telah mengajukan 2 kali proposal meminta ruangan untuk mahasiswa asing, namun jawabannya selalu tidak ada tempat, sampai sekarang juga tidak disediakan."

Menurut Abdullah, adanya ruang untuk mahasiswa asing akan dapat memberikan manfaat yang cukup banyak. "Jika ada ruangan, kita di sana dapat berkumpul sesama mahasiswa asing lainnya, dapat bertukar pikiran, dapat mengembangkan kreativitas, bukan hanya itu saja, jika ada mahasiswa asing yang datang ke UIN mereka langsung dapat menemukan tempat untuk bertanya, untuk transit, kalau selama ini ada mahasiswa asing datang ke UIN mereka bingung sendiri mau tanya kepada siapa," tambah Abdullah.

Selain itu, fasilitas yang disediakan UIN dalam memberikan

ARENA 7

UNIVERSITARIA

SLALIT ARENA | SENIN, 15 FEBRUARI 2015

pendampingan bahasa bagi mahasiswa asing juga tidak maksimal. Abdullah mengungkapkan banyak temannya yang lebih memilih pulang ke Thailand karena tidak dapat mengikuti perkuliahan di UIN dikarenakan kendala bahasa. "Banyak itu teman-teman saya sekitar tujuh sampai delapan orang yang kembali ke Thailand karena tidak bisa bahasa Indonesia sehingga dia tidak bisa ikut kuliah dengan baik."

Setelah dikonfirmasi, Maksudin menjelaskan bahwa memang tidak ada fasilitas khusus yang diberikan kepada mahasiswa asing, ia mengungkapkan bahwa mahasiswa asing tidak berbeda dengan mahasiswa pada umumnya. "Meraka kuliah, mereka mahasiswa, kami hanya ada pendampingan di awal-awal saja, terkait pendampingan pencarian tempat *kos*, awal-awal masuk ada pendampingan dari akademik dan dari kemahasiswaan, awal-awal *ya*, setelah itu dilepas."

Terkait dengan ruangan bagi mahasiswa asing Maksudin menanggapi bahwa pihaknya masih mengupayakan. "Lagi-lagi kita ini dari sisi ruang sangat terbatas, UKM itu kan *yo suk-suk'an to*, *ya* ketika mereka merasa butuh tempat dan kita ada tempat *ya* kita upayakan," tanggapnya santai.

Menanggapi mahasiswa asing yang banyak *di-Drop Out (DO)*, sejak tahun 2013 UIN memberikan fasilitas berupa adanya program matrikulasi bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) Pusat Bahasa UIN Sunan Kalijaga bagi mahasiswa asing.

"Karena terkendala bahasa banyak mahasiswa asing yang *di-DO* atau sebagian kembali ke negaranya karena tidak dapat mengikuti perkuliahan, *tha* dosen memberikan materi mereka

tidak paham, maka program ini diharapkan dapat membantu mahasiswa asing untuk lebih lancar dalam berbahasa Indonesia," ungkap Rohinah, staff pengajar di lembaga BIPA.

Program matrikulasi tersebut wajib diikuti oleh mahasiswa asing yang ingin menjalani perkuliahan di UIN. Program matrikulasi ini berlangsung selama satu tahun. Dalam program ini mahasiswa asing membayar Rp. 2.500.000,00 dengan total 100 kali pertemuan.

Aninditya SN, salah satu pengajar di BIPA menyatakan bahwa pihaknya berusaha untuk membantu mahasiswa asing yang ingin belajar. "Tugas kami adalah membantu mahasiswa untuk bisa bahasa Indonesia, kami mengajarkan dari nol hingga sampai mereka paham betul. Bukan hanya sebatas bisa berkomunikasi, tetapi sampai tingkat pemahaman, di mana mereka kalau masuk kelas dosen menyampaikan materi mereka paham seperti itu, sehingga mereka bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, tidak terlalu ketinggalan."

Miss. Arfas Salac, mahasiswa jurusan Sastra Inggris 2013 asal Pattani, Thailand, "saya sangat terbantu dengan program bahasa Indonesia ini, karena sekarang saya lebih bisa berbahasa Indonesia, saya juga diajarkan cara membuat makalah, sehingga dapat membantu kuliah saya," paparnya.

Dalam akhir program tersebut terdapat UPBI (Uji Penguasaan Bahasa Indonesia) yang harus dilalui oleh mahasiswa yang mengikuti program matrikulasi. Dalam UPBI tersebut ada *grade score* yang harus dicapai, jika tidak mencapai *grade score* yang telah ditetapkan maka mahasiswa tersebut harus mengulang lagi dari awal.[]

"Banyak itu teman-teman saya sekitar tujuh sampai delapan orang yang kembali ke Thailand karena tidak bisa bahasa Indonesia sehingga dia tidak bisa ikut kuliah dengan baik."

ARENA 8

9. UKT Berimbas ke Praktikum (Edisi Senin, 15 Februari 2015)

SLILIT ARENA | SENIN, 15 FEBRUARI 2015

UNIVERSITARIA

UKT Berimbas ke Praktikum

Sistem UKT yang telah diterapkan oleh UIN Sunan Kalijaga sejak tahun ajaran yang lalu, memunculkan efek ke beberapa hal, salah satunya adalah berkurangnya dana untuk praktikum mahasiswa.

Oleh Anisatul Umah

Uang Kuliah Tunggal (UKT) ternyata berdampak terhadap dana praktikum. Seperti yang terjadi di Fakultas Sains dan Teknologi (Saintek). Pendapatan fakultas pasca UKT justru menurun. Budhi Susilowati selaku Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag. TU) Fakultas Saintek mengatakan bahwa pendapatan fakultas pasca UKT untuk praktikum menurun.

"Anggaran untuk praktikum bayangannya dengan UKT pendapatan naik, tapi pada kenyataannya pendapatan per fakultas turun, karena dulu mahasiswa membayar 600 ribu dan 300 ribu untuk praktikum sehingga jumlahnya 900 ribu. Sedangkan sekarang rata-rata masuk golongan dua sehingga pendapatan menurun," tutur Budhi.

Senada dengan Budhi, Dekan Fakultas Saintek Akh. Minhaji saat di temui Desember 2014 lalu menyatakan, bahwa pemasukan fakultas berkurang karena ada potongan dari Pusat Administrasi Umum (PAU) dan rata-rata masuk golongan dua. "Uang turun semuanya, dulu praktikum 300 ribu rupiah, itu di bayar langsung ke fakultas tidak di potong. Sejak UKT uang itu kan nyatu pokoknya golongan dua 400 ribu rupiah sudah semua dan dipotong 37,5%," tegas Minhaji yang kini telah terpilih menjadi Rektor UIN Sunan Kalijaga.



3000
UKT -> F
X

SLILIT ARENA

9

UNIVERSITARIA

SLILIT ARENA | SENIN, 15 FEBRUARI 2015

Dengan dana yang menurun wajar bila nantinya akan terjadi penurunan juga dalam kualitas praktikum. "Kata orang Jawa *bayar murah kok njaluk apik* (bayar murah kok ingin yang bagus)," tambah Minhaji. Budhi juga menyayangkan penurunan pendapatan fakultas untuk praktikum, terlebih Saintek memiliki dosen Luar Biasa (LB) paling banyak dibanding dengan fakultas lain dan juga harus membagi dana yang ada untuk membeli alat-alat praktikum dari tiap jurusan. "Beli bahan saja mahal dari Kimia, Fisika, dan Biologi. Saintek itu dosen LB-nya banyak sekali sehingga uang itu dibagi-bagi untuk bahan-bahan, pembelian alat, pemeliharaan, dan dosen LB," tambah Budhi.

Menanggapi masalah ini, Nur Untoro, dosen Laboratorium Elektronika mengatakan bahwasannya mengenai alat praktikum dampaknya belum terlalu dirasakan, namun dalam hal pengadaan barang memang diminta usulan untuk membeli apa saja yang dibutuhkan. Namun untuk standar laboratorium Saintek baru cukup untuk laboratorium pendidikan saja, sedangkan untuk penelitian masih kurang serta jumlahnya yang minim. "Melihat alat-alat praktikum di UIN sebatas untuk pendidikan pengajaran ya cukup hanya saja jumlahnya kadang untuk praktikum Fisika kurang, tapi kalau untuk penelitian ya kurang," jelas Untoro.

Berbeda dengan Untoro, Agung yang juga mengampu di Laboratorium Elektronika Dasar mengatakan bahwa semua fasilitas untuk pendidikan lumayan lengkap hanya saja honor untuk asisten yang turun. "Yang turun itu honor asisten, yang alat-alat saya rasa di-support. Kalau laboratorium kita memang untuk pendidikan. Saya kira alatnya sudah cukup lengkap," tutur Agung.

Penurunan dana praktikum setelah diterapkannya UKT yang terjadi di Saintek dimentahkan oleh Nizar Ali Wakil Rektor II (WR II) dengan mengatakan bahwa dana yang didapat justru meningkat. "Praktikum masih tetap, dari mana bisa dikatakan turun. Jadi *problem UKT* sudah dihitung dari semua komponen biaya. Jadi nggak ada persoalan sebenarnya," tegas Nizar.

Menurut Nizar semua kebutuhan praktikum sudah bisa di-back up dengan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). "Misalnya alat praktikum yang rusak itu bisa di-back up BOPTN. Fakultas kan ada yang praktikum dan ada yang tidak. Pokoknya tergantung kurikulumnya. UKT dari komponen fakultas yang menghitung jatah ini sesuai bagaimana mereka *manage*. Setiap fakultas membuat rencana kerja," pungkas Nizar.

Pendapat Nizar yang mengatakan tidak ada permasalahan di dalam praktikum tidak dirasakan oleh Budhi. Menurut Budhi untuk memelihara alat saja fakultas masih kurang, apalagi dengan penurunan dana pasca UKT. Sebelum diberlakukannya UKT, mahasiswa Saintek mulai paham dengan kebutuhan praktikum mereka yang lebih mahal. Sehingga mereka akan siap jika dinaikkan.

"Untuk memelihara saja kita sudah nggak cukup apalagi untuk beli. Uang tidak ada tapi direncanakan saya ada. Tidak terealisasi karena pendapatan kita tidak seperti yang kita perkirakan. Sebelum UKT teman-teman Saintek memahamai kalau praktikum kita yang hanya 300 ribu rupiah mau kita naikkan. Waktu itu belum terpikir UKT, hanya menaikkan praktikum itu sudah menjadi wacana Saintek itu belum terealisasi tiba-tiba UKT tambah anjlok. Mereka sudah mulai paham baru akan kita usulkan untuk kenaikan tiba-tiba sudah muncul UKT jadi hancur," cetus Budhi.[]

"Anggaran untuk praktikum bayangannya dengan UKT pendapatan naik, tapi pada kenyataannya pendapatan per fakultas turun, karena dulu mahasiswa membayar 600 ribu dan 300 ribu untuk praktikum sehingga jumlahnya 900 ribu. Sedangkan sekarang rata-rata masuk golongan dua sehingga pendapatan menurun,"

SLILIT ARENA

10

10. Menyoal Kembali Etika Demokrasi Gerakan Politik Kampus (Edisi Kamis, 2 April 2015)

SLALIT ARENA | KAMIS, 2 APRIL 2015

UNIVERSITARIA

Menyoal Kembali Etika Demokrasi Gerakan Politik Kampus

Carut-marut politik kampus yang dimonopoli oleh satu kalangan politisi partai gerakan mahasiswa, menyebabkan hilangnya nilai demokrasi kampus di antara gerakan.

Oleh M. Faksi Fahlevi



sabtu (31/01). Bahwasanya ada dua masalah pokok dalam periode kepemimpinan Dewan mahasiswa saat ini. Yaitu *reshuffle* pengurus SEMA/DEMA karenadewisuda dan anggaran yang tidak memadai dari pihak rektorat sehingga berefek pada mandegnya program kerja.

Perpolitikan kampus melibatkan dua komponen penting. Yaitu elite politik di parlemen pemerintahan mahasiswa serta gerakan politik mahasiswa (PMII, HMI, IMM, KAMMI, KeMPeD, GMNI dan KAM dll).

Terkait demokratisasi kampus selama satu periode, Romel Masykuri selaku ketua Senat Mahasiswa memberikan pandangannya. Menurutnya dinamika perkembangan kampus berjalan dengan santai tanpa halangan apapun. "Bicara dinamika perpolitikan kampus hari ini tidak ada masalah, berjalan dengan lancar dan biasa-biasa aja." Ungkapnya pada Arena ketika di temuhi di warung kopi pada hari Sabtu (07/02).

Sedangkan mengenai posisinya sebagai ketua senat, Romel mengaku bahwa senat mahasiswa telah menjalankan roda kepemimpinan yang demokratis. Seperti halnya membentuk *website* dan sosial media (*Facebook*) sebagai ruang publik untuk menerima saran dan masukan terkait persoalan yang terjadi di kampus hari ini.

Di ruang taktis, Romel mengaku telah menjalankan tiga fungsi penting dalam pengawasan dan bimbingan selain yang telah disebut diatas. Pertama, membuka ruang

Dulu kala Immanuel Kant memberikan pandangannya terkait definisi pencerahan. "Kebangkitan manusia dari ketidakmatangan dirinya. Ketidakmatangan adalah ketidakmampuan untuk menggunakan pemahaman dirinya tanpa petunjuk orang lain." Hal itu disebut dengan akal budi yang tidak menyertakan kerja intelektual dalam membentuk sistem. Tapi ia percaya setiap individu mempunyai nilai berpikir yang baik dan harus didiskusikan agar menciptakan nilai-nilai demokratis. Dominasi berpikir dan bertindak di UIN-Suka hanya dikuasai oleh

kelas politik tertentu tanpa melibatkan gerakan politik yang lainnya. Efeknya adalah banyak kegiatan yang tidak diinginkan oleh masyarakat kampus. Sedangkan elite politik tidak punya arah dalam menentukan kerja-kerja yang profesional. Ditambah dengan banyaknya program yang tidak terlaksana di akhir masa pemerintahan. Begitulah yang digambarkan oleh Rian Budiarto selaku kepala suku Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KeMPeD).

Hal demikian diperkuat pemberitaan *website* *lpmarena.com* yang dilaporkan Harya Rifky pada

www.lpmarena.com 7

UNIVERSITARIA

SLALIT ARENA | KAMIS, 2 APRIL 2015

komunikasi yang selebar-lebarnya untuk siapapun. Kedua, pengawasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari sejak masuk kuliah hingga pengawasan tanpa batas dan yang terakhir adalah membuka Posko Pengaduan mahasiswa. "Fungsi SEMA adalah wakil mahasiswa, itu saja." Ungkapnya.

Adapun Zainuddin, ketua cabang PMII Yogyakarta, memberikan definisi yang jelas terkait arti demokratisasi kampus dan dinamika politiknya. Baginya demokratisasi merupakan, "proses ruang dialektika yang bisa dirasakan oleh semua orang dan kalangan. Jika masih ada monopoli politik didalamnya maka hal tersebut tidak dikatakan demokratis."

Bagi lelaki asal Sumenep Madura tersebut, politik kampus merupakan dealektika pengetahuan, bukan politik praktis. "Kita masih mahasiswa jauh berbeda dengan elite politik negara yang memang fokus, kita masih berpolitik dan juga masih mencari ilmu." Ungkapnya.

Ia berpandangan bahwa UIN bisa dikategorikan sebagai kampus yang demokratis jika melibatkan kalangan politik dan masyarakat kampus (mahasiswa). Saat ini politik di kampus hanya dikuasai oleh organisasi gerakan yang memiliki partai semata, bukan gerakan mahasiswa secara keseluruhan. "Sehingga hal ini harus lebih terbuka dan terbuka lagi," ungkap zainuddin

Pandangan serupa juga dilontarkan oleh Moh. Rindho N selaku Korkom Ikatan mahasiswa muhamadiyah (IMM) yang juga masih aktif sebagai mahasiswa akhir jurusan sosiologi. Menurutnya, demokrasi kampus harus lebih bersifat terbuka. Ada kesamaan hak belajar bersama terkait dinamika politik kampus karena merupakan ruang pembelajaran politik, bukan perebutan kekuasaan.

Bicara mengenai bentuk ideal, iapun masih melihat banyak kejangalan terkait demokratisasi kampus. Baginya elite politik mahasiswa masih tertutup dan tidak terbuka. Gerakan politiknya hanya berpihak pada golongan sendiri. Ia menambahkan jika politik hanya dijadikan alat legitimasi kekuasaan, bukan dijadikan langkah awal dalam membangun ruang pembelajaran politik, maka hal ini akan mencedarai nilai demokrasi "Ada egoisme atau ambisi kelompok" ungkap Rindho

Dalam proses berorganisasi, IMM membagi kadernya ke dalam dua wilayah. Kader partai dan kader organisasi di bidang akademik. Baginya, tidak semua kader suka dalam persoalan politik.

Sedangkan mengenai sikap politik, Rindho mengungkapkan bahwa IMM akan berpartisipasi dalam pemilu kedepan. "*Inshaallah* Partai Amanat Demokratik (PAD) akan maju." Ungkapnya.

Keluarga mahasiswa pecinta demokrasi atau yang sering disebut KeMPeD juga ikut serta menanggapi isu demokrasi kampus. sebagaimana tertulis di Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) KeMPeD untuk menciptakan mahasiswa yang memiliki kesadaran sosial yang berpihak kepada rakyat, menciptakan pendidikan ilmiah, demokratisasi dan bervisi kerakyatan, menciptakan kurikulum berbasis kerakyatan, se membangun perspektif gerakan sosial dan politik mahasiswa.

Rian Budiarto menganggap demokrasi kampus hari ini adalah demokratis karena masih ada siste pemilihan mahasiswa. Dan mati karena tindakan prosedural kebijakan pemerintahan kampus masih tertutup. Secara politik, pada pemilu yang akan datang KeMPeD juga akan ikut serta dalam dialektik politik, namun bukan politik prakt

Perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Maman, mengaku bahwa dirinya sejauh ini tidak tahu tentang dinamika politik kampus sejak pemiluwa 2013. Man memandang jika praktek demokra di kampus tidak sehat sehingga secara keorganisasian, HMI lebih memilih untuk mengawal kegiatan internal organisasi ketimbang melihat ketiadaan kesamaan suara dan berpendapat.

Terkait sikap politik, HMI masih belum memiliki pandangan yang jelas terkait keterlibatannya dalam pesta demokrasi kampus tahun ini Maman menjelaskan bahwa pihaknya perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan sepeuh untuk meminta pertimbangan. Meski begitu, ia menegaskan bahwa buk berarti Pengurus HMI sekarang ini punya kekemandirian. "HMI masih mau *swown* dulu kesesepeuh, minta pertimbangan, karena mereka dianggap lebih pengalaman." ung Maman.[]

8

11. DEMA: Tantangan Periode Lalu dan Periode Akan Datang (Edisi Kamis, 2 April 2015)

SLALIT ARENA | KAMIS, 2 APRIL 2015

UNIVERSITARIA

DEMA: Tantangan Periode Lalu dan Periode Akan Datang

Menjadi wakil Rakyat bukan hanya tentang tugas, melainkan persoalan tanggung jawab.


Oleh Atik Maratus S. dan Mutiara Nur Said

Persiapan pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilwa) tahun 2015 sudah mulai dilaksanakan. Pembentukan anggota Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPU-M) pun sudah dilangsungkan (2-8 Februari 2015) seiring dengan turunnya Surat Keputusan (SK) pelengseran PresMa periode 2013-2015 lalu. Hal ini yang menjadikan sebuah evaluasi atas kepemimpinan Dewan Mahasiswa (DeMa) periode Syaefudin Ahrom yang kerap disapa Ucok menjadi perlu untuk diulas. Sebagai bentuk transparansi kinerja dema agar dapat diketahui mahasiswa.

Adapun dari beberapa program yang dimiliki Ucok—selaku Presiden Mahasiswa periode 2013-2015—hanya 70% nya saja yang dapat terlaksana, sementara 30% lainnya belum dapat terealisasi. Hal ini dinyatakan Ucok saat ditemui Arena di warung kopi (25/2). “program dema yang terlaksana pada kepengurusan saya itu sekitar 70% - an.”

Program yang sudah terlaksana selama kepengurusan Ucok adalah melakukan advokasi terkait permasalahan Uang Kuliah Tunggal (UKT), advokasi terhadap mahasiswa kurang mampu, mengadakan pertemuan BEMNAS, dan mengembalikan partisipasi UKM dalam kepanitiaan Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK).

Sedangkan program yang tidak terlaksana dalam periode kepengurusannya yakni mengadakan Sidang Umum. Sidang umum ini seharusnya dilakukan dan dihadiri



oleh seluruh pengurus dema baik universitas maupun fakultas. ‘Kendala Waktu’ diakui Ucok sebagai penyebab utama belum terlaksananya Sidang Umum tersebut.

Banyak hal lain yang mempengaruhi kinerja Dema tidak dapat maksimal, seperti yang telah dikatakan Ucok—hanya terlaksana 70%. Salah satunya adalah mengenai kendala yang ditimbulkan dari internal anggota. Ada sejumlah anggota yang memilih untuk wisuda sebelum masa kepengurusannya berakhir. Menurut Ucok hal tersebut menjadi alasan mengapa beberapa program yang dilaksanakan kurang maksimal. Karena program yang ditinggalkan harus ditangani oleh anggota lain yang butuh penyesuaian atas program tertinggal itu.

Manajemen yang dilakukan Ucok untuk menanggapi

permasalahan internal adalah dengan mengadakan *reshuffle*, meskipun anggota baru yang menjadi pengganti memerlukan adaptasi kembali. Tapi para anggota tersebut diyakini Ucok mampu meng-cover kerja yang tertinggal itu.

“Ya, kan namanya orang dalam menjalankan program baru wajar mengalami adaptasi dulu.” Kata Ucok.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa perihal para anggota yang memilih wisuda sebelum masa jabatannya selesai adalah diluar kontrol otoritasnya sebagai PresMa. Menurutnya, ia tidak bisa serta merta memaksa pilihan yang diambil anggotanya itu.

“masalah anggota yang diwisuda sebelum kepengurusan selesai itu bisa dipengaruhi banyak faktor. Ada yang dapat tuntutan dari keluarga, atau memiliki kriteria mahasiswa ideal menurut mereka sendiri. Dan itu diluar kendali atau kehendak saya. Yang ada dalam kendali saya adalah saat perekrutan anggota, mereka layak dan dipilih melalui sistem yang dipakai.” Jelas Ucok.

Masih dengan perihal yang sama. Anggi Risha Fa’izin, Menteri Sekretaris Negara (KEMENSESNEG) periode 2013-2015. Menuturkan bahwa diwisuda sebelum lengser adalah merupakan hak istimewa setiap anggota.

“Tidak ada masalah persoalan kapan wisudanya, itu adalah hak prerogatif masing-masing individu. Asalkan tanggung jawab terpenuhi, dan juga ada yang menyelesaikan

www.lpmarena.com 9

UNIVERSITARIA

SLALIT ARENA | KAMIS, 2 APRIL 2015

tugas.” Jelas Anggi.

Pengurus yang juga telah melakukan wisuda sebelum lengser ini menjelaskan alasan mengenai sikap yang diambilnya tersebut adalah mengenai rencana pribadi yang ingin dilakukannya.

“Alasannya karena memang sudah *planning* pada saat itu untuk segera wisuda.”

Meski demikian, mantan KEMENSESNEG ini juga merasa telah meninggalkan tanggung jawabnya karena terdapat beberapa tugas yang belum terselesaikan, tapi tetap memilih untuk wisuda.

Senat Mahasiswa (SEMA), selaku lembaga pengawas kinerja DEMA. Turut aktif memberikan suara dalam efisiensi program DEMA. Jika Presiden Mahasiswa mengatakan hanya 70% saja kesuksesan program yang dimiliki DEMA. Lain halnya dengan yang diakui oleh Romel, selaku ketua SEMA periode 2013-2015. Sesuai dengan tugas pengawasannya, ia memberikan prosentase 80% atas program DEMA yang terlaksana dibawah pengawasannya.

Program belum terlaksana sejauh pantauan SEMA adalah beberapa program kerjasama dengan lembaga lain seperti Lembaga Pers Mahasiswa (LPM). Hal tersebut diungkapkan Romel karena kendala waktu yang terbatas sedangkan *job internal* yang padat. Seringkali pengurus lebih fokus pada masalah internal di tengah perjalanan kepengurusan.

Menanggapi permasalahan mengenai beberapa hambatan yang dilakukan internal anggota DEMA, seperti anggota yang memilih wisuda duluan sebelum rampung masa baktinya. Ketua lembaga pengawas DEMA ini mengaku sudah sering mengingatkan PresMa mengenai haknya untuk melakukan *reshuffle* kabinetnya ketika diadakan agenda evaluasi pertigabulan.

“Dalam agenda evaluasi pertiga bulan, saya seringkali mengingatkan Ucok yang mengutarakan ada problem manajemen anggota untuk menggunakan haknya. Ucok sebagai PresMa mempunyai hak untuk *reshuffle*.”

Prediksi Birokrasi Dema yang akan datang

Di penghujung akhir jabatannya sebagai Presiden Mahasiswa, Syaefudin Ahrom Al-ayyubi menceritakan pengalamannya sebagai *steakholders* dalam birokrasi kepengurusan Mahasiswa. Sejauh ini ia dan teman-teman dalam efisiensi program majalakan apa yang telah menjadi tanggungjawabnya, meskipun hal itu dirasa sulit untuk diselesaikan.

Masa ke-pemimpinan Ucok, bukan hanya sebagai cerita namun menjadi wacana kepemimpinan Dema yang akan datang. Menurut Ucok, permasalahan Dema yang akan datang adalah Komitmen Internal Birokrasi. Sistem kuliah lima tahun menjadi kendala. Waktu yang terlalu cepat dalam kepengurusan akan menjadikan penanggulangan permasalahan menjadi tidak efisien. Masalah lainnya adalah keaktifan pengurus yang semakin rendah dalam komitmen berorganisasi karena diharuskan lulus tepat waktu. Daya pemikiran yang kritis mulai mengikis karena cenderung pragmatis.

Dalam kesempatan terakhir masa jabatannya, Ucok berharap kepada birokrasi kedepan untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik dan belajar dari kepemimpinan yang lalu. Ia berpesan “Selamat berjuang Dema yang akan datang, jalin Jejaring yang luas. Sering tongkrong dan tukar pikiran. Karena ilmu tidak hanya di bangku kuliah”.

Menanggapi birokrasi Ucok, Romel Masykuri selaku ketua Senat Mahasiswa (Sema) membenarkan bahwa tantangan Dema kedepan tidak jauh berawal dari sistem kuliah lima tahun yang nantinya membuat para pengurus memiliki pemikiran yang akademis, pragmatis dan cenderung meninggalkan komitmen berorganisasi. Masalah itu nantinya akan berakibat fatal karena banyak kekosongan-kekosongan birokrasi yang menghambat kinerja Dema sebagai penyalur aspirasi Mahasiswa.

Sema sebagai badan pengawas merekomendasikan program kerja yang perlu dilakukan oleh Dema kedepan. Pertama, pengawasan terkait akademik dan masalah pembayaran harus lebih baik. Sistem UKT yang mengharuskan mahasiswa membayar di awal masuk akan memberatkan karena pada dasarnya tidak semua mahasiswa mampu membayar. Kedua, menjalin komunikasi yang lebih intensif di antara Dema dan Sema baik itu Fakultas ataupun Universitas untuk dapat menjalin keakraban yang lebih lancar kelembagaan yang lebih sinergis. Ketiga, para pengurus harus menargetkan poin-poin yang jelas kedepan agar lebih baik.

Kedepan, Sema berharap pada Dema untuk menjalin kerjasama yang maksimal dengan lembaga seperti UKM dan media Pers Mahasiswa. Membuat website atau media agar antara organisasi mahasiswa dapat lebih terbuka. Dengan keterbukaan, Dema diharapkan dapat menerima usulan atau kritikan yang disampaikan oleh media atau pun perorangan.

“*kemarin, media pers sering meliput kegiatan Sema dan Dema, kedepan Dema lebih terbuka dengan memanfaatkan media yang ada*.” []

10

ARENA

12. UKT, Biang Kerok Peniadaan Dana DPP-SPP (Edisi Kamis, 2 April 2015)


SLALIT ARENA | KAMIS, 2 APRIL 2015

UNIVERSITARIA

UKT, Biang Kerok Peniadaan Dana DPP - SPP

Berkurangnya dana yang masuk untuk UKM, Ormawa, dan Kemahasiswaan membuat organ internal memutar otak lebih keras agar agenda bisa terlaksana.

Oleh Isma Swastiningrum



Salah satu pemasukan dana yang datang untuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Organisasi Mahasiswa (ORMAWA), dan kemahasiswaan adalah dari sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dan dana penunjang pendidikan (DPP). Di UKM sendiri misalnya, SPP yang dulu diberikan dua kali dalam setahun sekitar 13 juta, sedang DPP sekali setahun sekitar 17 juta. Namun, setelah diterapkannya uang kuliah tunggal UKT, SPP dan DPP dihapuskan.

Hal tersebut dikatakan Rokhmat, Ketua Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan, dan Kerjasama (AAKK) UIN Sunan Kalijaga. "DPP itu diperuntukkan bagi mahasiswa baru sekali selama menjadi mahasiswa UIN. Jadi ketika sudah UKT, DPP tidak berlaku lagi," kata pria beracamata ini.

Hal ini turut diami Waryono, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Periode 2015-2019. "DPP hilang karena UKT, bukan hanya DPP yang hilang. Sekarang *nggak* ada istilah SPP, DPP, adanya Uang Kuliah Tunggal," ujar Waryono.

Dana yang berkurang otomatis akan memberikan dampak bagi mahasiswa. Pengaruhnya pada seluruh kemahasiswaan dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Senat Mahasiswa (SEMA), Dewan mahasiswa (DEMA), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HIMA-J), dan kemahasiswaan.

"Dana pasti berimbas pada kegiatan. Efeknya tergantung *sih*. Kalau ormawanya *ngaco* dana *thok*, akan mati. Meskipun hidup itu akan *ceek-ceek*," ucap M. Haider Ali, ketua Forum Komunikasi UKM saat ditemui ARENA di lantai I Student Center (SC).

Kondisi lain terkait dampak peniadaan SPP-DPP seperti yang diceritakan oleh

www.lpmarena.com 11

UNIVERSITARIA

SLALIT ARENA | KAMIS, 2 APRIL 2015

Hilman Abdullah ketua BEM Fakultas Adab. Dana lima juta yang didapat dari fakultas dikelola untuk kegiatan rutin, seperti *workshop*, seminar, dan pelatihan itu masih minim.

"Tidak dipungkiri UKM dan BEM ada keterkaitan dengan dana yang dikeluarkan universitas. Lima juta itu untuk kegiatan kreatif kurang. Dampak keseluruhan pada kreatifitas dan kegiatan mahasiswa. Misal pengiriman lomba bahasa Arab, itu berpengaruh jadi tidak berangkat," kata Hilman.

Hal senada diungkapkan oleh M. Abdul Rouf, mahasiswa Sosiologi semester IV yang pada tanggal 12 November 2014 silam menjadi ketua panitia dalam seminar nasional bertema: *Memahami Realitas Kehidupan Anak Jalanan sebagai proses pengembangan keilmuan Sosiologi*. Rouf berujar sumber pendanaan dari seminar tersebut berasal dari BEM jurusan yang memberikan sosialisasi kepada kelasnya terkait dana DPP (sekarang DPP tidak ada, diganti UKT) yang datang dari universitas.

"Dari BEM memberi tahu rincian, pengelolaan *gini-gini*. Total dana 10.300.000 lebih, bisa turun semua, tapi ada potongan pajak," tutur Rouf. Ia sangat menyayangkan jika fungsi dan manfaat DPP hilang, karena dana tersebut bisa digunakan sebagai ajang wahana kreasi sendiri.

Tak hanya kegiatan yang berbentuk seminar, untuk kegiatan yang memerlukan dana besar seperti produksi teater, hal tersebut juga dikeluarkan oleh Lailul Ilham.

"Sekarang 10 juta, *nggak* cukup terutama kegiatan yang terlampirkan di agenda besar. Bakal mengurangi ruang kegiatan dan kerja. Pendidikan kreatifitas terkurangi," kata lurah UKM Teater Eska ini.

Ilham bercerita Teater Eska sendiri di awal program kerja ada lima sampai enam kegiatan, seperti *workshop* dan *study pentas* XX. Teater Eska memikirkan ulang dalam rencana program agar tak kewalahan. "Satu sisi harus melepas ketergantungan besar terhadap keuangan kampus. Pertama, cari risiko, cari keuangan lain, seperti alumni dan donasi," ucap mahasiswa asal Madura jurusan bimbingan konseling islam (BK) semester VI ini.

Diterapkannya sistem Uang Kuliah Tunggal mengakibatkan perubahan pada Pola Pengelolaan Keuangan. Akibat dari peniadaan SPP dan DPP yang diganti UKT, dana yang masuk kepada UKM, Ormawa, dan kemahasiswaan menjadi turun. Jika dulu dana yang masuk UKM setahun mendapatkan dana sekitar 43 juta (2X SPP + 1X DPP), untuk tahun 2015 ini turun drastis menjadi 10 juta.

Penerapan UKT sendiri mengacu pada Undang-undang Kementrian pendidikan, seperti pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 96 Tahun 2013 tentang biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa baru pada Perguruan Tinggi Agama Negeri (PTAIN), di lingkungan Kementerian Agama tahun akademik 2013/2014. Yang menjadi soal adalah sistem UKT antara Kemendikbud dan Kemenag berbeda. Jika Kemenag hanya memiliki tiga kelompok (seperti tertantum dalam Permen No. 96 Tahun 2013 tersebut pasal 2), yakni UKT terdiri dari kelompok I, II, dan III. Sementara di Kemendikbud bisa sampai lima bahkan tujuh, sesuai kemampuan ekonomi mahasiswa.

Sumber pemasukan kemahasiswaan sendiri uangnya dari

12

13. Laboratorium Jurusan Mangkrak, Penanganan Lambat (Edisi Kamis, 2 April 2015)

UNIVERSITARIA | SLALIT ARENA | KAMIS, 2 APRIL 2015

Laboratorium Jurusan Mangkrak, Penanganan Lambat

Sampai saat ini keberadaan laboratorium jurusan belum digunakan sesuai fungsinya, penanganan yang lambat menjadi faktor mangkraknya laboratorium.

Oleh Ekmil Lana Dina

Meningkatnya angka kebutuhan mahasiswa terhadap fasilitas perkuliahan, mengharuskan UIN Sunan Kalijaga bersiap di segala sektor. Tak terkecuali fasilitas laboratorium di setiap fakultas. Dari delapan fakultas, belum semuanya mampu memaksimalkan fasilitas laboratorium yang ada. Salah satunya terdapat di jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS) fakultas Dakwah dan Komunikasi yang keberadaannya belum digunakan dengan maksimal.

Hal ini diungkapkan oleh Zainuddin, ketua prodi IKS. Ia menganggap bahwa laboratorium jurusannya belum berfungsi seperti seharusnya. Laboratorium IKS diskusi pengembangan ilmu sosial bagi mahasiswa dan dosen. Namun hingga saat ini, keberadaannya masih saja mangkrak. "Laboratorium sekarang hanya sebatas koleksi," ungkap Zainuddin.

Ia menambahkan, bahwa macetnya penggunaan laboratorium juga dikarenakan tidak adanya dana khusus penunjang kegiatan meski sebelumnya telah terbentuk struktur pengurus di dalamnya. "Selama ini sudah terdapat struktur untuk pengembangan laboratorium kesejahteraan sosial, namun terkendala dengan tidak adanya dana yang dianggarkan khusus untuk memfungsikan laboratorium," Tambah Zainuddin.

Banyak juga mahasiswa yang tidak tahu keberadaan laboratorium di fakultas mereka. Beberapa mahasiswa justru menanyakan keberadaan laboratorium jurusannya yang sebenarnya merupakan fasilitas umum.

Muhammad Makhribi, mahasiswa semester empat Prodi IKS Fakultas Dakwah, mengatakan, "Saya pribadi mengetahui jika IKS mempunyai laboratorium baru semester tiga, tidak ada sosialisasi khusus ataupun kegiatan yang dilaksanakan di ruang laboratorium, di dalam laboratorium hanya terdapat satu unit komputer dan beberapa jurnal." Kata Makhribi.

Hal ini diamini Waryono, saat masih menjabat sebagai dekan fakultas dakwah dan komunikasi. Ia menjelaskan bahwa saat ini baru tiga dari lima jurusan di fakultas dakwah yang aktif menggunakan laboratorium. Ketiganya adalah Bimbingan Konseling Dakwah (BKJ), Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) dan Manajemen Dakwah (MD). Sementara dua jurusan lainnya, Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS) dan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) masih berbenah.

"Laboratorium IKS belum berfungsi dengan baik, beberapa tahun yang lalu pernah difungsikan, namun karena tidak adanya leadership maka yang terjadi sekarang, lab vakum dari segala aktivitas", jelas Waryono, yang sejak bulan Maret 2015 telah menjadi Wakil Rektor II.

Ia juga menjelaskan perihal kegiatan apa saja yang dilakukan dalam laboratorium Fakultas Dakwah. "Dalam lab PMI juga sering diadakan diskusi terkait desa-desa binaan yang ada dalam tanggung jawab mereka, di MD terdapat pelatihan setiap minggunya bagaimana cara untuk membuat proposal yang baik, sedangkan KPI masih dalam tahapan berbenah" jelas Waryono.

Berbeda dengan Waryono, Ahmad Rizqi Nur Ihsan, mahasiswa KPI semester enam, mengalami kesulitan saat mengurus laboratorium prodinya. "Bulan Maret 2014 saya berinisiatif untuk mengaktifkan kegiatan di laboratorium, namun masih kesulitan, pembicaraan saya bersama Bu Atin, ketua jurusan dan pak Khadiq sekretaris jurusan masih sebatas obrolan, belum dapat diminta tindakan yang lebih, di mana seharusnya Wakil Rektor dua saat itu yang seharusnya bertanggung jawab dan Wakil Rektor tiga sebagai pelaksana." Jelas Rizqi.

"Laboratorium memang sudah ada, namun untuk membuat laboratorium yang kami inginkan belum dapat tercapai, masalah terhadap birokrasi ke atas juga terkesan sulit dan konsep matang tentang laboratorium juga belum ada," terang Rizqi.

Sebenarnya banyak hal yang dapat diperoleh jika laboratorium menunjukkan esensinya, laboratorium dapat dijadikan sebagai tempat praktek di luar kelas yang menunjang perkuliahan. Harapannya kedepan, bahwa laboratorium KPI dapat menjadi miniatur jurnalistik yang dikenal mahasiswa dengan baik, bukan hanya sebagai penunjang

akreditasi semata, Pungkas Rizqi.

Sedangkan di prodi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, keberadaan laboratorium menunjukkan kondisi yang berbeda. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa mata kuliah yang bertempat di laboratorium.

"Sejak semester satu sudah ada pengenalan khusus tentang laboratorium psikologi dan ada beberapa mata pelajaran yang beraktivitas di dalam laboratorium," Tutur Asmaul Karimah, Mahasiswa jurusan Psikologi semester empat.

Asmaul menambahkan bahwa dengan adanya pembelajaran kuliah yang mewajibkan mahasiswa untuk masuk dalam laboratorium merupakan pengenalan akan manfaat dari fasilitas laboratorium.

Dudung Abdurrahman, Dekan Fishum, menjelaskan lebih rinci mengenai laboratorium di Fakultas Sosial dan Humaniora, "Sebagian ruangan di lantai tiga merupakan laboratorium dan terdapat laporan sebagai pengelola laboratorium. Di setiap laboratorium terdapat laboran, namun yang terbesar adalah Psikologi, prodi Ilmu Komunikasi dan Sosiologi masih sebatas ada, belum sebesar Psikologi," jelas Dudung.

Harapannya kedepan, ketiga laboratorium yang ada di Fakultas SOSHUM dapat sebesar Psikologi. Sedang juga menjelaskan jika laboratorium yang ada di Fishum belum kesemuanya besar. Sejauh ini laboratorium jurusan psikologi yang sudah berfungsi dengan baik,

sedangkan jurusan Ilmu Komunikasi dan Sosiologi masih tahapan berbenah. "Laboratorium psikologi yang lebih besar dan lebih berfungsi daripada kedua jurusan lain yang terdapat di Fishum" jelas Dudung Abdurrahman.

Fungsi laboratorium yang memang sangat penting dibenarkan oleh Dudung Abdurrahman, "Sesuai dengan namanya, laboratorium berguna sebagai pengembangan ilmu, penunjang proses pembelajaran dan sebagai tempat uji coba pengembangan diri. Di mana di dalam laboratorium bisa juga diadakan diskusi atau penelitian sehingga terciptalah mahasiswa yang proaktif dengan lingkungan sekitar," Tandis Dudung. []

14 | SLALIT ARENA

SLALIT ARENA | KAMIS, 2 APRIL 2015 | UNIVERSITARIA

TURUT BERBELA SUNGKAWA ATAS DIWISUDANYA

Ibnu Hajar (Koordinator PSDM 2010-2013)
Folly Akbar (Redaktur Online 2013-2014)

"Kisanak sudah diwisuda,
bolehlak kiranya pergi mengembara"

Sabtu, 28 Maret 2015

www.lpmarena.com | 15

14. Terapkan KBK, IPK Minimal FEBI 3 (Edisi Kamis, 2 April 2015)

UNIVERSITARIA

SILILIT ARENA | KAMIS, 2 APRIL 2015

Terapkan KBK, IPK Minimal FEBI 3

Pemberlakuan Kurikulum baru di Fakultas Febi, Berdampak pada standar IPK minimal tiga

Oleh Anis Nur Nadhiroh

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan kurikulum baru yang diterapkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sunan Kalijaga sejak tahun ajaran baru 2014/2015. pemberlakuan kurikulum tersebut seiring dengan harapan pihak FEBI agar mahasiswa mampu bersaing di lapangan kerja setelah lulus nanti.

Dalam salah satu pengejawantahannya, KBK mengharuskan IP (*Indeks Prestasi*) minimal mahasiswanya bernilai 3,00. Jika kurang dari itu, maka mahasiswa akan diancam *Drop Out* (DO).

Hal ini diungkapkan oleh salah satu mahasiswa jurusan Ekonomi Syari'ah FEBI, yang enggan disebutkan namanya. Di semester tiga IP yang diperoleh kurang dari tiga. Saat hendak melakukan registrasi ulang semester empat, sistem online memblokir akunnya sehingga proses registrasi tidak dapat dilanjutkan. Untuk dapat melanjutkannya diharuskan membuat surat pernyataan kepada pihak FEBI. Jika surat tidak dibuat, maka mahasiswa yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari FEBI.

Ketika diwawancarai, ia menjelaskan bahwa isi surat tersebut adalah perintah ketersediaan mengundurkan diri jika di Semester Genap medatang IP yang diperoleh masih di bawah tiga. Surat pernyataan diserahkan ke pihak PTIPD, namun sebelumnya harus ditandatangani oleh ketua dan wakil

jurusan. Tidak sekedar tanda tangan, ia juga akan mendapatkan pembinaan akademik agar di semester depan IP-nya lebih tinggi.

Saat diklarifikasi kasi ke Sunarsih, Wakil Dekan satu bidang akademik FEBI, ia menjelaskan bahwa proses DO di FEBI masih mengikuti Fakultas lain pada umumnya. Tapi untuk kelulusan sendiri standarnya adalah tiga. Untuk mencapai target tersebut, FEBI memberlakukan sistem remedial di fakultasnya. "Jika nilai mahasiswa yang diperoleh saat ujian kurang dari tiga, maka disediakan remidi untuk mengkatrol nilainya". Kata Sunarsih.

Meski begitu, Sunarsih menegaskan bahwa remidi tidak lantas menjamin nilai bisa naik menjadi tiga.

Menanggapi standar nilai tiga, Sunarsih menjelaskan bahwa dengan standar nilai tersebut mahasiswa diharapkan agar lebih berkompoten "kalau mampu menurut interpretasi kami itu B-lah minimal nilai itu." Jelas Sunarsih.

Sunarsih menganggap bahwa



*** IPK Minimal 3,00**

16

SILILIT ARENA

SILILIT ARENA | KAMIS, 2 APRIL 2015

UNIVERSITARIA

“yah harapanku *sih* disamakan dengan fakultas lain atau gak gitu ambil jalan tenggahlah, semisal dengan standar IP minimal 2,75 lah,”

kebijakan ini akan memudahkan mahasiswa di lapangan kerja nanti. “Dengan IPK 3, mereka dapat peluang kerja yang lebih besar. Karena kalau memberi standart 2 mahasiswa pada terlalu bersantai. Selain itu jika bersaing di lapangan kelak mereka akan merasa kesulitan, paling tidak secara administrasilah” tambah Sunarsih.

Menghadapi kebijakan ini Triyana, mahasiswa FEBI, menganggap adanya pengejaran akreditasi di FEBI. Hal ini terjadi karena FEBI adalah fakultas baru yang berusaha membuktikan kepada pihak birokrasi bahwa fakultas ini tidak kalah dengan fakultas lain.

Triyana juga menyampaikan keluh kesahnya ketika menghadapi kebijakan terhadap adanya surat pernyataan seakan menjadikan mahasiswa sebagai pihak tunggal yang bersalah sedangkan kinerja birokrasi FEBI dinilainya masih sangat kurang. Selain itu fasilitas yang ada belum memadai untuk menunjang kegiatan akademik di Fakultas yang terletak di Maguwo itu.

“Adanya surat pernyataan seperti itu saya tidak sepekat, karena kalau mahasiswa disuruh membuat surat pernyataan itu seolah-olah kesalahannya itu terletak pada mahasiswanya. Jadi menurut aku jika dari pihak fakultas menginginkan IP yang telah ditentukan itu tercapai, maka kinerja mereka harus juga

ditingkatkan. Supaya tidak hanya terkesan mahasiswanya saja yang terlihat bodoh. Selain itu, kalau mereka menginginkan yang lebih fasilitasnya ya harus memaadailah.” Tegas Triyana.

Triyana berharap agar standar nilai disamakan dengan fakultas lain karena mahasiswa terbebani dengan peraturan ini. “yah harapanku *sih* disamakan dengan fakultas lain atau gak gitu ambil jalan tenggahlah, semisal dengan standar IP minimal 2,75 lah,” harap Triyana.

Menyikapi standar nilai tersebut, Sekar Ayu Arisyani selaku mantan Wakil Rektor (WR) I menjelaskan bahwa Kebijakan ini hanya diterapkan di FEBI. Hal ini dikarenakan sejak awal FEBI bersikap sangat selektif dalam menerima mahasiswa. “Kebijakan ini hanya diberlakukan di Febi, yang lain belum mampu. Karena berat kalau yang lain memberlakukan KBK juga. Yah karena FEBI dari awal sudah selektif sekali.” Kata Sekar.

Senada dengan Sekar, Sutrisno selaku WR I berpendapat bahwa standar yang diterapkan FEBI berbeda dengan Fakultas lain sehingga standar nilai tiga yang diterapkan dianggapnya lumrah.

“Yang dulu yang pernah saya dengar berbeda dari Fakultas lain. kalo di Fakultas lain IPK 2, sedangkan di FEBI IPK 3 pun berangkat dari situ.” Kata Sutrisno.[]

Wawancara bersama Ahmad Najib

www.lpmarena.com

17

15. Pemutaran Senyap: Saat Mahasiswa Menegakkan Demokrasi (Edisi Kamis, 2 April 2015)

Pemutaran Senyap: Saat Mahasiswa Menegakkan Demokrasi

Pemutaran Senyap bukanlah sekedar agenda nonton bareng, ia merupakan usaha untuk menegakkan demokrasi yang kian terpuruk.

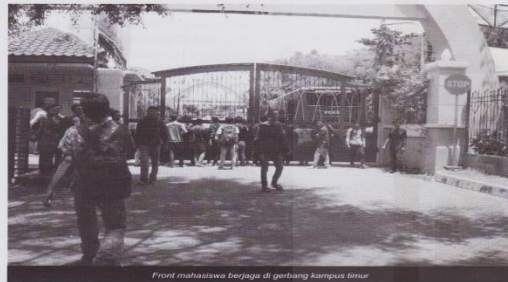
Oleh Rifai Asyhari dkk

Puluhan mahasiswa tampak tengah berjaga di sepanjang jalan kampus timur menuju gedung Student Center (SC). Mereka berpakaian santai dengan jaket dan sandal sebagai alas kaki. Beberapa berambut gondrong tidak teratur. Sebagian besar dari mereka berada di persimpangan jalan menuju Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Sementara lainnya berjaga dekat gerbang kampus timur. Sekali diantara mereka berjalan keluar kampus untuk mengawasi keadaan jalan raya. Di depan gerbang itu, dua mobil polisi terparkir berjejer.

Hari itu, Rabu (18/03), Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Rhetor mengagendakan pemutaran film dokumenter karya Joshua Oppenheimer, *Senyap*. Acara yang telah direncanakan sejak satu minggu sebelumnya itu, akan dimulai pukul 10.00 WIB di SC. Dalam pelaksanaannya LPM Rhetor membentuk front mahasiswa yang beranggotakan organisasi PMII, HMI, GMNI, PPMI, IMM, Pemuda Pembebasan dan LPM Arena.

Senyap sendiri merupakan film yang mengungkap sejarah alternatif pembantaian '65 dengan mengambil sudut pandang keluarga korban. Dalam banyak pemutaran *Senyap* di tempat lain sebelumnya, kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, ISI, UGM dan Sanata Dharma, acara selalu diwarnai dengan ancaman dan berujung pada pembubaran paksa oleh oknum tertentu.

Dari pembacaan situasi front



Front mahasiswa berjaga di gerbang kampus timur

mahasiswa menyiapkan satuan pengamanan yang disebut Barisan Rakyat, terdiri dari puluhan massa front sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan adanya pembubaran. Sejak pagihari, mereka ditempatkan di beberapa titik strategis baik di dalam kampus maupun luar kampus untuk berjaga.

Sebelumnya, sempat tersiar kabar melalui media sosial dan pesan berantai (*broadcast*) bahwa terdapat oknum yang telah merencanakan pembubaran. "Diserukan kepada seluruh laskar dan ormas Islam untuk bersama-sama bergerak membubarkan pemutaran film komunis *Senyap* di kampus UIN pada hari Rabu 11 Maret 2015 jam 08.00 WIB," sebagian kutipan isi pesan berantai tersebut.

Setengah jam berselang, pukul

9.05 WIB, suasana berubah mencekam. Suara bising klakson motor memecah keheningan. Puluhan pria tak dikenal datang menggunakan sepeda motor. Seorang mahasiswa yang berjaga di dekat gerbang sontak berteriak memberi tahu rekannya untuk menutup gerbang kampus timur—yang hanya dipisahkan jalan raya dengan gerbang kampus barat. "Udah datang, tutup gerbangnya," serunya.

Mahasiswa yang sebelumnya duduk tenang bangkit berlari menutup gerbang. Sebatang bambu panjang digunakan untuk menggajal gerbang. Akses utama memasuki kampus timur ditutup. Beberapa mahasiswa mondar-mandir mengintip dari balik gerbang. Mereka ditengarai sebagai oknum

yang merencanakan pembubaran pemutaran film *Senyap*. Lebih dari lima puluh orang bersiaga mengamankan acara di sepanjang jalan kampus timur dari gerbang hingga SC. Mereka tetap berkomitmen mempertahankan jalannya acara sesuai rencana awal mereka, apapun yang terjadi. Salah seorang anggota front, Dendy Cipto, mengatakan bahwa Barisan Rakyat siap menghadapi serangan dari pihak luar dan akan tetap memutar *Senyap* sebagai bentuk perlawanan atas perampasan hak berekspresi civitas akademik.

Kepada wartawan, Abdullah sebagai perwakilan FUI mengatakan akan membubarkan pemutaran

kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Lebih dari lima puluh orang bersiaga mengamankan acara di sepanjang jalan kampus timur dari gerbang hingga SC. Mereka tetap berkomitmen mempertahankan jalannya acara sesuai rencana awal mereka, apapun yang terjadi. Salah seorang anggota front, Dendy Cipto, mengatakan bahwa Barisan Rakyat siap menghadapi serangan dari pihak luar dan akan tetap memutar *Senyap* sebagai bentuk perlawanan atas perampasan hak berekspresi civitas akademik.



Rektor UIN Sunan Kalijaga, Minhaji, saat diwawancarai oleh Wartawan

Senyap. Ia berujar bahwa *Senyap* adalah film komunis, serta mengagap film berdurasi 102 menit tersebut berbahaya meracuni pikiran mahasiswa. Jika masih tetap diputar, akan (kami) dibubarkan secara paksa. Namun, belum sempat aksinya terlaksana, kedatangan mereka langsung direpson oleh Rektor UIN, Akh. Minhaji. Ia mengajak salah seorang anggota FUI berunding di Gedung Rektorat secara tertutup.

Di saat yang bersamaan, Barisan Rakyat telah bersiap menghadapi

Bagi front mahasiswa, pemutaran *Senyap* ini bukan saja agenda nonton bareng. Namun juga perjuangan menegakkan demokrasi di Indonesia. Jika *Senyap* berhasil diputar maka agenda ini akan menjadi salah satu tonggak bersejarah penegakkan demokrasi. Terutama jika mengingat tindakan kesewenang-wenangan oknum intoleran yang semakin merajalela.

Di tengah situasi menegangkan, muncul keributan kecil dari sesosok pria berambut putih di depan gerbang. Ia mengaku sebagai

anggota Front Anti Komunis Indonesia (FAKI). Kedatangannya adalah juga untuk menolak pemutaran *Senyap*. Ia mengancam mahasiswa dengan mengatakan bahwa dirinya telah mempersiapkan seratus anggota FAKI yang siap membubarkan acara. "Pokoknya harus bubur," ancamnya.

Situasi tak berubah hingga pukul 10.00 WIB. FUI mulai bergerak menuju arah selatan dengan sepeda motor. Front mahasiswa sempat panik karena mengira FUI mengambil jalur lain untuk menerobos ke arah lokasi pemutaran. Hingga fokus berjaga beralih ke arah simpang Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK), yang di arah sebaliknya juga terhubung dengan gang Ngentak Sapen. Di arah itu, mereka berspekulasi bahwa FUI akan menerobos melewati gang tersebut. Konsentrasi Barisan Rakyat beralih dari gerbang ke persimpangan FDK itu.

Namun setelah beberapa menit berlalu, penyerangan urung terjadi. Ternyata massa FUI meninggalkan kampus. Meski begitu suasana mencekam masih menggelayuti kampus, khususnya bagi Barisan Mahasiswa. Sehingga mereka memutuskan tetap berjaga di tempatnya. Sementara wartawan di sekitar lokasi, beralih menuju tempat pemutaran film.

Tak lama setelah FUI bubur, Akh. Minhaji muncul dari arah FDK. Ia berjalan kaki menuju SC. Ini adalah yang kedua kali setelah sebelumnya, pukul 8.15 WIB, Minhaji menyelesaikan sebuah negosiasi tanpa hasil bersama panitia pemutaran film. ***

Negosiasi pertama pukul 6.30 WIB. Ketika itu beberapa panitia penyelenggara bertemu Gunadi (Ketua SC) meminta SC dibuka lebih

awal untuk mempersiapkan pemutaran film. Permintaan tersebut ditolak oleh Gunadi. Ia mengatakan SC tidak akan dibuka sebelum ada izin dari Rektor. Negosiasi terus berjalan hingga setengah jam kemudian Rektor Akh Minhaji datang dengan beberapa stafnya menggunakan mobil. Datang pula dekan fakultas dakwah, Nur Jannah. Tawar menawar dilanjutkan oleh Akh. Minhaji.

Dengan pakaian rapi, kemeja berwarna merah dengan jas hitam, Minhaji datang menemui panitia. Sembari berdiri di depan SC, Minhaji menyampaikan bahwa pihaknya melarang pemutaran *Senyap* dan memerintahkan panitia agar membatalkannya. Alasannya adalah adanya ancaman pembubaran oleh FUI yang memungkinkan terjadinya tindak anarkis. Ahmad Haedar, Ketua LPM Rhetor, menolak pelarangan tersebut.

Di tengah perundingan, Nur Jannah mempersoalkan permasalahan administratif. Ia menganggap bahwa LPM Rhetor selaku penyelenggara belum meminta izin kepada pihak fakultas Dakwah untuk melaksanakan acara ini. "Ini tidak tertib administratif," kata Nur Jannah. Minhaji ikut menguatkan alasan tersebut dengan mengatakan bahwa tanpa adanya izin acara tidak boleh berlangsung.

Padahal di hari sebelumnya, menurut Haedar, panitia telah mengirimkan surat permintaan izin kepada fakultas bahwa LPM Rhetor akan mengadakan pemutaran *Senyap*. Namun penjelasan ini terus saja dibantah oleh Minhaji dan Nur Jannah. Hingga akhirnya dengan

tegas Haedar menolak, "Kalau diskusi saja harus administratif kapan diskusinya pak." Selain itu, Haedar juga mengatakan bahwa pelarangan acara ini adalah sebetulnya pemberangusan kebebasan akademik di wilayah kampus. Seharusnya mahasiswa bebas mengadakan acara diskusi dan juga pemutaran *Senyap*.

Saat negosiasi semakin alot, wartawan yang sejak pagi berkumpul di sekitar SC tiba-tiba ikut



Suasana nonton bareng film *Senyap* di aula gedung Student Center

mengerubungi lingkaran negosiasi. Puluhan wartawan dari berbagai media turut merekam proses negosiasi diantara pejabat kampus dengan mahasiswanya.

Lama berputar dalam persoalan administratif dan tak kunjung menemui titik temu, Minhaji mengalihkan persoalan pada resiko yang mungkin terjadi. Di hadapan wartawan dan mahasiswa, ia nampak

berhati-hati menyampaikan pernyataannya. "Kalau saja terjadi, ini kita *nggak* berharap ya. Kalau terjadi tindakan anarkis dan perusakan oleh FUI siapa yang mau bertanggung jawab," kata Minhaji.

Menanggapi alasan kedua dari Minhaji, Haedar mengatakan bahwa front mahasiswa siap bertanggung jawab atas segala kemungkinan buruk yang akan terjadi. "Ini sudah komitmen Front Pak," kata Haedar kepada Minhaji.

Kesepakatan tidak tercapai, Minhaji merubah *statement* awalnya dari melarang acara menjadi menundanya. Ia ingin bernegosiasi terlebih dahulu dengan FUI sebelum menentukan keputusan selanjutnya. Negosiasi pertama berakhir pukul 8.15 WIB tanpa ada kesepakatan. Semua pejabat kampus meniggalkan SC. Panitia tetap pada pendirian awal sementara Minhaji berubah sikap.

Pukul 10.20, ratusan mahasiswa telah memadati aula gedung SC, di pojok timur kampus UIN. Tidak hanya datang dari UIN, mahasiswa dari berbagai universitas di Yogyakarta juga menjadi peserta acara ini. Terlihat pula aktivis dari berbagai LSM dan juga wartawan di sana. Karena peserta membludak, panitia mengarahkan peserta agar naik ke lantai dua, menyaksikan *Senyap* dari jalan sempit seluas satu meter yang dipagari besi.

Sesat sebelum film diputar, tiba-tiba saja Minhaji memasuki SC. Kedatangannya kali ini adalah untuk menyampaikan sikapnya yang kedua setelah bernegosiasi dengan FUI. Di depan ratusan peserta, Minhaji menyampaikan hasil negosiasinya

16. Mahasiswa, Korban Bobroknya Sistem Peningkatan Mutu Prodi (Edisi Senin, 8 Juni 2015)

Mahasiswa, Korban Bobroknya Sistem Peningkatan Mutu Prodi

Menjadi soal tersendiri bagaimana mahasiswa menjadi tumbal dari sistem yang carut-marut. Peningkatan mutu ataupun akreditasi malah mengabaikan peran dari mahasiswa itu sendiri.

Oleh M. Abdul Rouf



Pencanangan wacana *World Class University* di UIN Sunan Kalijaga tidak asing lagi kita dengarkan. Kata tersebut sering digembor-gemborkan oleh kalangan birokrat kampus untuk menyenangkan hati para mahasiswa. Memang meningkatkan taraf hidup UIN Suka di mata dunia menjadi hal yang diidam-idamkan di kalangan masyarakat kampus. Akan tetapi, hal pendukung terwujudnya cita-cita tersebut harus menjadi perhatian yang bisa dikatakan prioritas utama. Seperti perhatian pada sistem kampus dalam meningkatkan mutu ataupun akreditasi di setiap program studi di UIN Suka.

Dalam proses akreditasi, terdapat berbagai standar yang harus dipenuhi oleh kampus, fakultas ataupun program studi. Dadi

Nurhaedi, Kepala Progam Studi (Kaprodi) Sosiologi menjelaskan bahwa terdapat tujuh standar dalam proses penilaian akreditasi kampus. Beberapa di antaranya seperti penjaminan mutu dari dosen pengajar juga mahasiswa dan alumni, "Untuk peningkatan akreditasi ada tujuh standar yang harus dipenuhi. Untuk peningkatan mutu dosen sendiri masuk dalam standar nomor 2, sementara mahasiswa dan alumni masuk standar nomor 3." ungkap Dadi.

Praktiknya banyak kita jumpai mahasiswa sering menjadi korban untuk peningkatan mutu prodi dalam proses pembelajaran. Mulai dari penggantian jam mata kuliah yang

kadang berbenturan dengan agenda lain dari mahasiswa, hingga dosen yang jarang masuk dan tidak ada penggantinya. Hal ini tentunya mengakibatkan mahasiswa mengalami kerugian.

Berkurangnya materi yang sudah menjadi hak bagi mahasiswa malah semakin melemahkan potensi akademik yang dimiliki. Seperti yang dialami oleh Ela Nurlaela, Mahasiswa Sosiologi semester IV. Dia menuturkan bahwa ada mata kuliah untuk semester IV ini yang dosennya jarang masuk dan itu sangat merugikan bagi dirinya. "Secara pribadi *sih* aku merasa rugi, kita *enggak* punya materi dan pas ujiannya jadi bingung, akan tetapi kita menghargai soalnya dosennya kuliah lagi," tutur Ela, Senin (20/4).

Ela menjelaskan bahwa salah satu dari mata kuliah yang dosennya sering tidak hadir adalah mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Dia mengeluhkan tentang tidak adanya jam pengganti untuk jam mata kuliah yang kosong. Kalau pun ada, sifatnya hanya secara sepihak tanpa ada koordinasi secara menyeluruh dengan mahasiswa. "Jadwal yang diganti sering merugikan, soalnya waktunya juga kadang *tabrakan* dengan kegiatan yang lain," tambah Ela.

Hal senada juga dilontarkan oleh mahasiswa lain yaitu Nur Aisyah Istiqomah yang merasa dirugikan.

Meskipun secara umum dalam benak mahasiswa termasuk dirinya, kosongnya mata kuliah merupakan hal yang menyenangkan bagi mahasiswa. Akan tetapi dalam hatinya hal tersebut tidak menguntungkan dirinya. "Secara manusiawi, pasti *ya seneng*. Tapi aku *ya ngerasa* rugi kalau libur kuliah terus," ujarnya. Ketika ditanya perihal ikut andil memajukan prodi, Aisyah menjawab ingin. Dia menjelaskan bahwa sudah ada langkah-langkah yang dilakukan. Seperti mengajak teman seangkatannya untuk berdiskusi. Juga ditambah dengan ketika sedang berlangsung proses perkuliahan dia mencoba mendeskripsikan materi yang ada dengan yang dipahami. Hal ini tentunya untuk meningkatkan kualitas mutu mahasiswa. "Kalau masalah apa yang aku lakukan untuk memajukan prodi, aku lebih *gimana sih* kita melakukan dari bawah, biar dosennya malu sendiri," tandasnya lebih lanjut.

Aisyah juga menambahkan untuk saat ini belum ada penanganan lebih lanjut dari pihak Kaprodi ataupun Dosen Pembimbing Akademik (DPA). Selama ini, hanya sebatas pertanyaan saja dari DPA mengenai siapa saja dosen yang jarang masuk. Padahal, dia dan teman-temannya sudah pernah mengutarakan hal ini kepada dosen. "Untuk masalah ini, tindak lanjut ke mahasiswa dari Kaprodi *enggak* ada. Paling dari dosen hanya *nanya gimana* diskusi, *gimana Lab?*" tambahnya.

Muryanti, dosen pegampu mata kuliah Sosiologi Pedesaan ketika

ditemui *ARENA* (20/4) menjelaskan bahwa alasan dia jarang masuk dalam perkuliahan dikarenakan sedang tugas belajar. Muryanti sedang melanjutkan studi di IPB program S3 dengan mengambil konsentrasi pada bidang Sosiologi Pedesaan. Tidak adanya sertifikasi yang didapat membuat Muryanti yang melanjutkan studi pada tahun 2012 lalu, menginginkan untuk dapat sesegera mungkin merampungkan proses pembelajaran yang dijalani. "Saya sendiri ingin fokus pada kuliah saya saat ini dan bisa menjalankan pembelajaran tepat waktu," tuturnya.

Dia menuturkan untuk saat ini dosen yang berstatus Tugas Belajar (TB) seperti dirinya, belum ada regulasi ataupun kebijakan yang mengatur proses pembelajaran yang nantinya dilakukan. "Kebijakan yang sering tidak pasti dan untuk saat ini di UIN belum ada pengaturan secara internal," tambahnya.

Sementara selaku Kaprodi Sosiologi, Dadi memberikan keterangannya mengenai dosen yang berstatus TB tidak dibebani tugas mengajar dan itu sudah menjadi ketentuan negara. Mengenai dosen yang masih mengajar seperti yang ada di prodi Sosiologi, Dadi menjelaskan bahwa sedikitnya dosen tetap di prodi Sosiologi menjadi salah satu alasannya. Pengampu mata kuliah Sosiologi Pedesaan sendiri oleh Kaprodi dikatakan sudah ada koordinasi dengan yang bersangkutan sebelum dimulainya awal tahun ajaran baru. "Dulu itu beliau (Muryanti) yang meminta dan ketika diputuskan untuk tetap

mengajar, itu diputuskan melalui rapat Kaprodi dengan dosen yang lain," tuturnya.

Ketika dikonfirmasi perihal upaya untuk menambah tenaga pengajar, Dadi mengatakan hal tersebut sudah diusahakan. Namun, mengenai seleksi lebih lanjutnya menjadi kewenangan negara. "Dari pihak prodi sudah ada upaya untuk mengusulkan menambah dosen yang ada, tetapi untuk proses seleksi melalui tes itu ada di negara. Di pihak prodi hanya menyelesaikan masalah administratifnya saja," ungkapnya lebih lanjut.

Dadi menambahkan, sebenarnya dari pihak prodi sangat mendukung dosen yang melanjutkan studi. Karena tenaga pengajar yang berstatus S3 di prodi Sosiologi masih sedikit. Ditambah lagi, ini bisa menjadi salah satu penyumbang poin untuk meningkatkan mutu dan juga akreditasi prodi. "Tentu, prodi sangat mendukung dosen yang melanjutkan studinya. Karena itu ya ibarat sebuah investasi jangka panjang bagi prodi sendiri," jelas Dadi.

Perihal upaya yang dilakukan prodi untuk mengatasi masalah ini, Dadi menjelaskan sudah ada koordinasi dengan dosen yang bersangkutan. Akan tetapi, sifatnya sendiri hanya sekedar mengingatkan untuk tetap memenuhi hak mahasiswa. Seperti pemenuhan absensi, dan belum ada penanganan yang lebih serius lagi. "Ya mungkin ini bisa menjadi masukan bagi prodi dan nantinya akan ada langkah-langkah lebih lanjut," tandas Dadi.

17. Tidak Dilibatkan, Mahasiswa Acuhkan Pemilihan Dekan (Edisi Senin, 8 Juni 2015)

UNIVERSITARIA SLILIT ARENA | SENIN, 8 JUNI 2015

Tidak Dilibatkan, Mahasiswa Acuhkan Pemilihan Dekan

Sudah menjadi tugas dekan untuk memajukan fakultasnya, dan membangun kebersamaan dengan mahasiswa juga menjadi bagian dari memajukan fakultas.

Oleh Lailatus Sa'adah

Di tataran universitas, rektor memiliki peran penting dalam statuta kampus. Begitu pula dalam fakultas yang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan fakultas adalah dekan. Fungsi dekan bukan sekadar kepanjangan tangan rektor, tetapi juga agar fakultas memiliki ciri khas tersendiri dari fakultas-fakultas lainnya. Bagi kebanyakan mahasiswa, dekan memiliki peran yang sangat penting dalam kebijakan fakultas. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Pusat Data (Pusda) ARENA hanya 7% yang menyatakan peran dekan di fakultas tidak penting.



Seberapa Penting Fungsi Dekan di Fakultas?

tidak penting	7%
penting	34%
sangat penting	49%

Menanggapi asumsi yang berbeda dari beberapa mahasiswa mengenai apa arti dekan bagi mahasiswa, Rian Budiarto mengkolongkan mahasiswa ke dalam beberapa kategori. Menurut Rian, ketua Kelompok Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD) bahwa mahasiswa ada dua kategori "Ini asumsi ya apakah kemudian mahasiswa masuk di kampus itu benar-benar mau belajar soal pengetahuan dan dinamika di dalam kampus, atau cuma mereka *pure* menjadi *academic oriented*."

Bagi mahasiswa yang lebih mengorientasikan kuliah untuk akademik, mereka memikirkan dekan ketika ada keperluan mendesak atau ketika mendekati *munaqosah*. Ayu Rustianti, mahasiswa semester VI jurusan KI ini mempunyai masalah ketika melakukan registrasi biaya pendidikan yang melibatkan peran dekan "Registrasi kemarin saya *gak* bisa bayar kuliah gara-gara Nomor Induk Mahasiswa (NIM) saya keblokir di fakultas, dikiranya saya *tuh* mahasiswa Drop Out (DO). Walaupun saya *gak* terlibat langsung, tapi dari pihak Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) itu perlu tanda tangan dekan (untuk menyatakan) bahwa saya bukan mahasiswa DO," katanya.

Meski pemilihan dekan telah lama usai dan dekan baru telah

8 

SLILIT ARENA | SENIN, 8 JUNI 2015 UNIVERSITARIA

terpilih, tetapi masih banyak mahasiswa yang tidak mengetahui dekan mereka saat ini. Sebanyak 45% mahasiswa mengaku tidak mengetahui dekan fakultasnya dan tidak mampu menjawab dengan benar nama dekan masing-masing. Itu sebanding dengan pengetahuan mereka tentang adanya pemilihan dekan. Kurangnya perhatian mahasiswa terhadap pemilihan dekan, karena selama ini fungsi dekan masih sebatas kepanjangan tangan dari rektor. Belum terlihat profesionalitas peran dekan di fakultas.

menggunakan fasilitas itu untuk kegiatan yang positif berkaitan dengan dinamika kampus."

Mahasiswa tidak pernah lagi diikutsertakan dalam pemilihan dekan secara langsung setelah sebelumnya pernah dilibatkan secara langsung pada masa rektor Amin Abdullah. Meskipun pemilihan dekan periode ini berbeda dengan pemilihan dekan sebelum-sebelumnya dan rentetan alur Pemilihan Dekan (Pildek) terpampang di depan kampus. Beberapa mahasiswa mengaku baru mengetahui adanya pemilihan dekan setelah dekan masing-masing fakultas selesai dilantik. Mahasiswa yang mengetahui adanya pemilihan dekan yang terselenggara Maret lalu sebanyak 56%.

Zamzam Affandi, Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya menuturkan "Visi-misi adab secara umum harus bersinergi ada bersinkronisasi dengan visi misi rektor, selain visi misi umum UIN Sunan Kalijaga yang sudah terpampang." Salah satu program ke depannya, melakukan kerjasama dengan sebuah institut di Iran di bidang penelitian dan pertukaran dosen.

Banyak mahasiswa yang mengamini bahwa dengan adanya dekan baru mampu memberi perbaikan terhadap perkembangan fakultas. Sebanyak 12% mahasiswa tidak setuju dan menjelaskan semuanya tergantung dari kebijakan dekan itu sendiri. Bahkan 6% sisanya tidak tahu sama sekali apa fungsi dekan terhadap pengembangan mutu fakultas.

Tahukah Anda Siapa Dekan di Fakultas Anda saat ini?

tidak	45%
ya	55%

Ada dua faktor yang mempengaruhi kurangnya kepedulian mahasiswa terhadap dekan masing-masing fakultasnya. Sebagai pengamat mahasiswa, Rian menjelaskan "problem kita saat ini karena secara struktural kita dihadapkan pada aturan-aturan yang ada semakin membatasi ruang gerak mahasiswa, dan problem kultural karena hadirnya *gadger* dan budaya baru di mana mahasiswa tidak dapat

Tahukah Anda Ada Pemilihan Dekan?

tidak	44%
ya	56%

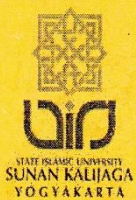
Perkembangan sebuah fakultas, serta maju atau tidaknya fakultas tergantung pada peran dekan masing-masing. Ketika pelantikan dekan, masing-masing dekan menyampaikan visi-misinya. Visi misi itu bersinergi dan melakukan sinkronisasi dengan visi misi rektor.

Apakah Diadakannya Pemilihan Dekan akan Memberi Perbaikan terhadap Perkembangan Fakultas?

tidak menjawab	6%
tidak	12%
ya	82%

Polling data dilakukan pada 11-12 Maret 2015 polling diambil dari 100 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.

www.lpmarena.com 9



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281
Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230, Email. fd@uin-suka.ac.id



NIM : 12210107 TA : 2015/2016 PRODI : Komunikasi dan Penyiaran Islam
NAMA : NURUL HIDAYATI YUNDA SMT : SEMESTER GENAP NAMA DPA : H. AKHMAD RIFA'I

No.	Nama Mata Kuliah	SKS	Kls	Jadwal Kuliah	No. Ujian	Pengampu	Paraf UTS	Paraf UAS
1	Skripsi/Tugas Akhir	6	D	MIN 07:00-12:00 R: FD-114	0	H. AKHMAD RIFA'I

Catatan Dosen Penasihat Akademik:

Sks Ambil : 6/24

Mahasiswa

NURUL HIDAYATI YUNDA
NIM: 12210107

Yogyakarta, 26/01/2016
Dosen Penasihat Akademik

H. AKHMAD RIFA'I
NIP. 2600905 198603 1 006





NAMA : NURUL HIDAYATI YUNaida
NIM : 12210107
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan/Program Studi : KPI (Komunikasi dan Penyiaran Islam)
Pembimbing I : Dr. H. Akhmad Rifai, M.Phil.
Pembimbing II : -
Judul : APLIKASI KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PERS MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA (ANALISIS ISI DALAM LAPORAN UTAMA BULETIN SLILIT ARENA UIN SUNAN KALIOJAGA)

No.	Tanggal	Konsultasi Ke:	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	21 Jan 2016	I	Diskusi awal proposal	
2	9 feb 2016	II	Revisi Proposal + diskusi teori	
3	17 feb 2016	III	Revisi Proposal + diskusi metode	
4	25 feb 2016	IV	ACC Proposal	
5	27 April 2016	V	Revisi Bab II	
6	12 Mei 2016	VI	Revisi Bab VI	
7	17 Mei 2016	VII	ACC Munqosyah Skripsi	

Yogyakarta, 14 Desember 2015

Pembimbing,

Dr. H. Akhmad Rifai, M.Phil.

NIP 19600905 198603 1 006



TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/b3.21.699/2015

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **NURUL HIDAYATI YUNAIDA**
Date of Birth : **February 28, 1994**
Sex : **Female**

took TOEC (Test of English Competence) held on **November 27, 2015** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	39
Structure & Written Expression	42
Reading Comprehension	45
Total Score	420

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, November 27, 2015
Director,



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005



شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02 / L4 / PM.03.2 / a3.21.688 / 2015

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Nurul Hidayati Yunaida :

تاريخ الميلاد : ٢٨ فبراير ١٩٩٤

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٢٦ نوفمبر ٢٠١٥, وحصلت
على درجة :

٤٩	فهم المسموع
٣٢	التراكيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٢٣	فهم المقروء
٣٤٧	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكاكرتا, ٢٦ نوفمبر ٢٠١٥
المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag

رقم التوظيف : ١٩٦٨.٠٩١٥١٩٩٨.٣١٠٠٥





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. 552230 Yogyakarta 55281

SERTIFIKAT

Nomor :UIN.02/MP KPI/PP.00.9/ 1610/2015

Panitia pelaksana Magang Profesi Mahasiswa Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan ke-30 tahun akademik 2015/2016,
Menyatakan :

Nama : Nurul Hidayati Yunaida
NIM : 12210107
Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jurusan : KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

Telah melaksanakan Magang Profesi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester ganjil tahun akademik 2015/2016 **SKH Merapi Yogya** dengan nilai A

Demikian sertifikat ini diberikan semoga dapat dimanfaatkan semestinya.

Mengetahui,
Ketua Jurusan KPI



Khoirul Ummatini, S.Ag, M.Si
NIP.197032810997032001

Yogyakarta, 30 Desember 2015

Ketua Panitia pelaksana

Nanang Mizwar Hasyim, M.Si.
NIP.198403072011011013



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/L.2/PP.06/P3.622/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama : Nurul Hidayati Yunaida
Tempat, dan Tanggal Lahir : Pati, 28 Februari 1994
Nomor Induk Mahasiswa : 12210107
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid Semester Khusus, Tahun Akademik 2014/2015 (Angkatan ke-86), di :

Lokasi : Jetis
Kecamatan : Saptosari
Kabupaten/Kota : Kab. Gunungkidul
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 25 Juni 2015 s.d. 31 Agustus 2015 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 97,50 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.

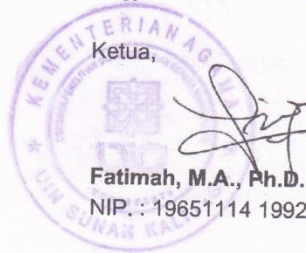


Yogyakarta, 09 Oktober 2015

Ketua,

Fatimah, M.A., Ph.D.

NIP. : 19651114 199203 2 001





Nomor: UIN.02/R.3/PP.00.9/2753.C/2012

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Sertifikat

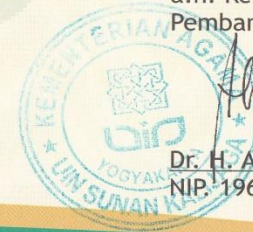
diberikan kepada:

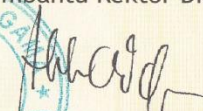
Nama : NURUL HIDAYATI YUNaida
NIM : 12210107
Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas dan kegiatan
SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI
Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2012/2013
Tanggal 10 s.d. 12 September 2012 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 19 September 2012
a.n. Rektor
Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan




Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil.
NIP. 19600905 198603 1006



UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : NURUL HIDAYATI YUNaida
NIM : 12210107
Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jurusan/Prodi : KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	80	B
2.	Microsoft Excel	60	C
3.	Microsoft Power Point	85	B
4.	Internet	100	A
5.	Total Nilai	81.25	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	



Yogyakarta, 7 Maret 2016

Kepala PTIPD

Agung Fatwanto, Ph.D.

NIP. 19770103 200501 1 003

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang





LABORATORIUM AGAMA

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email : fd@uin-suka.ac.id

SERTIFIKAT

Pengelola Laboratorium Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa :

NURUL HIDAYATI YUNaida

12210107

LULUS (80) *A*

Ujian sertifikasi Baca Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Laboratorium Agama
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 13 Juni 2014
Ketua

[Signature]
Dr. Sriharini, M.Si
NIP. 19710526 199703 2 001



Dekan

[Signature]
D. H. Waryono, M.Ag.
NIP. 19701010 199903 1 002



INTEGRATIF-INTERKONEKTIF



DEDIKATIF-INOVATIF



INKLUSIF-CONTINUOUS IMPROVEMENT



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281
Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230, Email. fd@uin-suka.ac.id

**TRANSKRIP NILAI SEMENTARA
PROGRAM SARJANA (S1)**

Nama : NURUL HIDAYATI YUNANDA
Tempat, Tanggal Lahir : PATI, 28 FEBRUARI 1994
Nomor Induk Mahasiswa : 12210107

Jurusan/Program Studi : KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
Tanggal Masuk : 1 SEPTEMBER 2012

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Nilai	Bobot
1	UIN-101-1-2	Akhlaq/Tasawuf	2	A	8,00
2	UIN-201-1-2	Al-Hadis	2	A/B	7,00
3	UIN-202-1-2	Al-Qur'an	2	A	8,00
4	UIN-204-1-2	Bahasa Inggris	2	A/B	7,00
5	USK-214-1-2	Filsafat Ilmu	2	A-	7,50
6	KPI-104-1-2	Ilmu Dakwah	2	A	8,00
7	UIN-103-1-2	Pancasila dan Kewarganegaraan	2	A-	7,50
8	KPI-208-1-3	Pengantar Ilmu Komunikasi	3	A	12,00
9	USK-215-1-2	Pengantar Studi Islam	2	B-	6,50
10	UIN-102-1-2	Tauhid	2	B-	6,50
11	UIN-203-1-2	Bahasa Arab	2	B-	6,50
12	UIN-205-1-2	Fikih/Ushul Fikih	2	B+	6,50
13	KPI-107-1-2	Hadis Dakwah	2	A	8,00
14	KPI-501-1-2	Islam dan Budaya Lokal	2	A-	7,50
15	KPI-210-1-2	Komunikasi Massa	2	A-	7,50
16	KPI-211-1-2	Komunikasi Politik	2	A/B	7,00
17	UIN-206-1-2	Sejarah Kebudayaan Islam	2	A/B	7,00
18	KPI-505-1-2	Studi Agama Kontemporer	2	B	6,00
19	KPI-106-1-2	Tafsir Ayat Dakwah	2	A-	7,50
20	KPI-209-1-3	Teori Komunikasi	3	A-	11,25
21	KPI-303-1-3	Desain Komunikasi Visual	3	B	9,00
22	KPI-506-1-2	Fikih Kontemporer	2	A-	7,50
23	KPI-401-1-3	Filsafat-Etika Komunikasi	3	B+	9,75
24	KPI-108-1-3	Fiqh Dakwah	3	B+	9,75
25	KPI-212-1-2	Komunikasi Kelompok	2	A-	7,50
26	KPI-213-1-2	Komunikasi Organisasi	2	A	8,00
27	KPI-302-1-2	Pengantar Jurnalistik	2	A-	7,50
28	KPI-405-1-2	Retorika Dakwah	2	B-	6,50
29	KPI-105-1-2	Sejarah Dakwah	2	A-	7,50

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Nilai	Bobot
30	NAS00003	Bahasa Indonesia	2	A/B	7,00
31	KPI02022	Hukum dan Etika Jurnalistik	2	A	8,00
32	KPI02023	Jurnalistik Cetak	3	A-	11,25
33	KPI04052	Kewirausahaan	3	A-	11,25
34	KPI02003	Komunikasi Antar Budaya	2	A-	7,50
35	KPI02010	Metodologi Penelitian Sosial	3	A	12,00
36	FDY03004	Psikologi Dakwah	2	A	8,00
37	KPI-402-1-3	Psikologi Komunikasi	3	A-	11,25
38	KPI02028	Reportase Media Cetak	3	A	12,00
39	KPI02020	Analisis Teks Media	3	A	12,00
40	KPI02021	Fotografi Jurnalistik	3	A	12,00
41	KPI-334-2-3	Jurnalistik Online	3	B+	9,75
42	KPI13049	Manajemen Redaksi	3	A	12,00
43	KPI02012	Metodologi Penelitian Komunikasi Kuantitatif	3	B-	8,25
44	KPI02025	Penulisan Artikel	3	A	12,00
45	KPI14053	Periklanan	2	A-	7,50
46	KPI02018	Sosiologi Komunikasi	2	A-	7,50
47	KPI02024	Jurnalistik Investigatif	3	A	12,00
48	KPI02009	Manajemen Media Massa	3	A	12,00
49	KPI02011	Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif	3	A	12,00
50	KPI13051	Penulisan Fiksi	3	A/B	10,50
51	KPI02026	Produksi Berita Media Cetak	3	A/B	10,50
52	KPI02017	Seminar Komunikasi	3	B+	9,75
53	KPI05058	Statistik Sosial	3	A	12,00
54	KPI02008	Magang Profesi	4	A	16,00
55	KPI02027	Produksi Media Cetak	3	A-	11,25
56	USK01003	Kuliah Kerja Nyata	4	A	16,00
57	USK01004	Skripsi/Tugas Akhir	6	A/B	21,00

Indeks Prestasi Kumulatif:
IPK : (538,00 / 146) = 3,68 (Tiga Koma Enam Delapan)

Predikat Kelulusan:
PUJIAN

Indeks Prestasi Kumulatif	Predikat Kelulusan
3,51 - 4,00	DENGAN PUJIAN (CUM LAUDE)
2,76 - 3,50	SANGAT MEMUASKAN
2,00 - 2,75	MEMUASKAN
0,00 - 1,99	GAGAL



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nurul Hidayati Yunaida
Tempat/Tgl. Lahir : Pati, 28 Februari 1994
Alamat : Ds. Bakaran Wetan Rt. 01/Rw. 02, Kec. Juwana,
Kab. Pati
Nama Ayah : Sunarto
Nama Ibu : Tumilah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- | | |
|------------------------------|------------------|
| a. SD Negeri 1 Bakaran Wetan | lulus tahun 2006 |
| b. SMP Negeri 1 Juwana | lulus tahun 2008 |
| c. MA Salafiyah Kajen | lulus tahun 2012 |
| d. UIN Sunan Kalijaga | sedang menempuh |

C. Prestasi

1. Juara 2 Lomba Presentasi Bahasa Arab PBA UIN Sunan Kalijaga 2012
2. Juara 3 Lomba Feature News Gebyar KPI 2012
3. Tulisan pernah dimuat di koran Kedaulatan Rakyat, Minggu Pagi, Koran Muria, dan Majalah Misteri

D. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Lembaga Pers Mahasiswa BUKIT KPI tahun 2013-2014
2. Sekretaris Redaksi Lembaga Pers Mahasiswa BUKIT KPI periode 2014-2015
3. Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa KORDISKA (Korp Dakwah Islamiyyah UIN Sunan Kalijaga) tahun 2013-2015
4. Koordinator Bidang Penerbitan Unit Kegiatan Mahasiswa KORDISKA (Korp Dakwah Islamiyyah UIN Sunan Kalijaga) periode 2015-2016